

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM DAERAH RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**EVALUASI KINERJA BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG DI
KAMPUNG PINANG SEBATANG TIMUR KECAMATAN TUALANG
KABUPATEN SIAK**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Ilmu Administrasi Publik
Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau

**Asep Saputra
NPM : 167110568**

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK

PEKANBARU

2021

Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM DAERAH RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : Asep Saputra
NPM : 167110568
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Evaluasi Kinerja Badan Permusyawaratan Kampung Di
Kampung Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang
Kabupaten Siak.

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai, relative telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penilaian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh Sarjana.

Turut Menyetujui

Pekanbaru, 24 Juni 2021

Program Studi Administrasi Publik

Pembimbing

Ketua

Lilis Suryani, S.Sos., M.Si

Drs. Zulkifli, M.Si

YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM DAERAH RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Asep Saputra
NPM : 167110568
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Evaluasi Kinerja Badan Permusyawaratan Kampung Di
Kampung Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang
Kabupaten Siak.

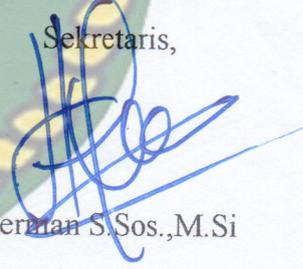
Naskah skripsi ini telah secara keseluruhan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana.

Pekanbaru, 24 Juni 2021

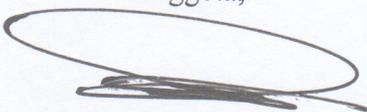
Ketua,


Drs. Zulkifli, M.Si

Sekretaris,

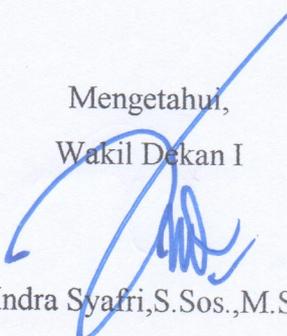

Herman S.Sos., M.Si

Anggota,


Prof. Dr. H. Sufian H, SH., M.Si

Mengetahui,

Wakil Dekan I


Indra Syafri, S.Sos., M.Si

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 871/UIR-FS/KPTS/2021
TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

- Mengingat** : 1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
2. PP Nomor: 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
4. SK Rektor UIR Nomor: 141/UIR/KPTS/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR
5. SK Rektor UIR Nomor: 391/UIR/KPTS/2020, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2020-2024.

- Memperhatikan** : Rekomendasi Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dan Wakil Dekan Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

MEMUTUSKAN

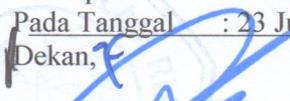
- Menetapkan** : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama : Asep Saputra
N P M : 167110568
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Evaluasi Kinerja Badan Permusyawaratan Kampung Di Kampung Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak

Struktur Tim :

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Drs. Zulkifli, M.Si. | Sebagai Ketua merangkap Penguji |
| 2. Herman, S.Sos., M.Si | Sebagai Sekretaris merangkap Penguji |
| 3. Prof. Dr. Sufian H. ., M.Si | Sebagai Anggota merangkap Penguji |

2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 23 Juni 2021
Dekan, 

Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si
NPK. 080102337

Tembusan Disampaikan Kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR
2. Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
3. Yth. Ketua Prodi
4. Arsip -----sk.penguji-----

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

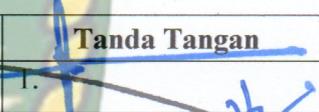
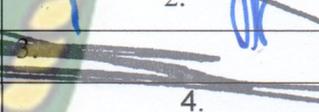
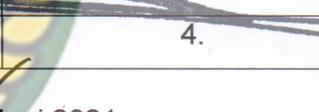
=====

BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI

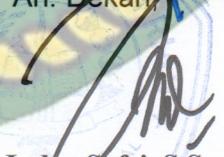
Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: 871/UIR-Fs/Kpts/2021 tanggal 23 Juni 2021 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Kamis tanggal, 24 Juni 2021 jam 10.00 – 11.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Asep Saputra
NPM : 167110568
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : **Evaluasi Kinerja Badan Permusyawaratan Kampung Di Kampung Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak**

Nilai Ujian : Angka : "78" ; Huruf : "B+"
Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. Zulkifli, M.Si	Ketua	1. 
2.	Herman, S.Sos., M.Si	Sekretaris	2. 
3.	Prof. Dr. Sufian H. ., M.Si	Anggota	3. 
4.		Notulen	4. 

Pekanbaru, 24 Juni 2021
An. Dekan


Indra Safri, S.Sos, M.Si
Wakil Dekan I Bid. Akademik

YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM DAERAH RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Asep Saputra
NPM : 167110568
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Evaluasi Kinerja Badan Permusyawaratan Kampung Di
Kampung Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang
Kabupaten Siak.

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh Mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administratif dan akademis, oleh karena itu disahkan sebagai sebuah karya ilmiah.

Pekanbaru, 24 Juni 2021

Ketua



Drs. Zulkifli, M.Si

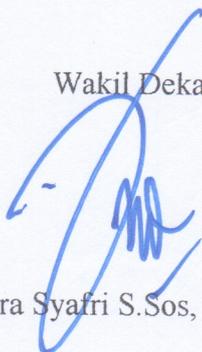
Sekretaris



Herman S.Sos., M.Si

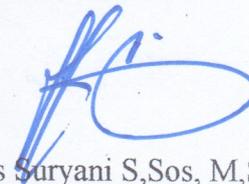
Turut Menyetujui :

Wakil Dekan 1



Indra Syafri S.Sos, M.Si

Program Studi Ilmu
Administrasi Publik



Lilis Suryani S,Sos, M,Si.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan mengucapkan alhamdulillah, penulis merasa sangat bersyukur atas petunjuk dan penerangan yang telah di berikan Allah SWT , sehingga penulis dapat merampungkan menyelesaikan Skripsi ini yang penulis beri judul : ***“Evaluasi Kinerja Badan Permusyawaratan Kampung Di Kampung Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak”***.

Salawat beriringkan salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan suri tauladan dan pengajaran yang baik, sehingga terbukalah berbagai hikmah ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi umat manusia hingga akhir zaman.

Penulisan Skripsi ini adalah salah satu syarat yang harus penulis tempuh di Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau, di mana penulis menekuni ilmu pengetahuan untuk menempuh wawasan penulis tentang ilmu-ilmu sosial dan ilmu politik.

Pada kesempatan yang baik ini, tidak lupa penulis mengucapkan terimakasih yang setulus-tulusnya baik secara langsung maupun tidak langsung atas segala dukungan, batuan, bimbingan, pengarahan, nasehat dan pemikiran dari berbagai pihak selama proses studi dan selama proses penyusunan skripsi ini.

Penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak prof. Dr. H. Syafrinaldi,SH., MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau yang menyediakan fasilitas dan juga memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu lembaga pendidikan yang beliau pimpin.
2. Ibu Lilis Suriani. S.Sos.,M.Si sebagai Ketua Program Studi Administrasi Publik dan seluruh dosen prodi ilmu administrasi publik yang telah memfasilitasi dan memberi ilmu pengetahuan sehingga telah memperluas wawasan dan sangat membantu penulis.
3. Bapak Drs. Zulkifli, M.Si. selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis dalam penulisan usulan penelitian ini.
4. Bapak dan ibu dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Riau khususnya Program Studi Administrasi Publik yang telah mendidik serta mengajarkan ilmu pengetahuan sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan ini.
5. Kepada Ayahanda Asnawi M dan ibuhanda tercinta Paiti Sumarni yang selalu mensertakan Do'a disetiap langkah kaki anaknya dan banting tulang bercucuran keringat demi pendidikan anaknya tercinta, serta memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan penelitian ini.
6. Terimakasih kepada teman-teman sekaligus sahabat 7sekawan 4sedulur (7S4S) Andrean, Edwardo Saputra, Eka Fitria Ningsih, M. Nur Ramadhani, M. Gemilang Rai Arasy, Rima Shandawi, Selly Selfiana, Witriono Putra, Yudi Harmes, Yumna Sari Singa, yang telah menjadi

sahabat selama diperantauan ini dalam sama-sama menuntut ilmu dan merekah selalau memberikan semangat dan dukungan.

7. Kawan-Kawan dari Organisasi Himia Publik sebagai tempat dan wadah penulis dalam menimba ilmu pengetahuan beserta pengalaman yang berharga selama berada di fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
8. Kawan-Kawan seperjuangan dari Administrasi Publik Kelas C angkatan 2016 yang telah memberikan penulis semangat dan motivasi dalam menyelesaikan Usulan Penelitian ini.

Mudah – Mudahan Allah SWT memberikan rahmat dan karunianya atas jasa yang diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini dan diletakkan disisi Allah yaitu Jannah atau Surga-Nya Amiin.

Akhir kata semoga Skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah ilmu dan pengetahuan bagi para pembaca.

Wabillahitaufikwalhidayah, wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru,24 Juni 2021

Penulis,

Ttd

Asep Saputra

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iii
SK TIM PENGUJI.....	iv
BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI.....	v
PENGESAHAN SKRIPSI.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTARGAMBAR.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xviii
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....	xix
ABSTRAK	xx
ABSTRACT	xxi
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	12
1. Tujuan penelitian	12
2. Kegunaan penelitian	13
BAB II: STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR	14
A. Studi Kepustakaan.....	14
1. Konsep Administrasi.....	14
2. Konsep Organisasi	20
3. Konsep Manajemen.....	23
4. Manajemen Sumber Daya Manusia	25
5. Konsep Evaluasi.....	29
6. Konsep Kinerja.....	36
B. Kerangka Pikir	40
C. Hipotesis	41
D. Konsep Operasional	41
E. Operasionalisasi Variabel.....	44
F. Teknik Pengukuran	45
BAB III: METODE PENELITIAN.....	54
A. Tipe Penelitian	54
B. Lokasi Penelitian.....	54
C. Populasi Dan Sampel	55
D. Teknik Pengumpulan Data	57
E. Jenis Dan Sumber Data	58

F. Teknik Penarikan Sempel	58
G. Teknik Analisis Data Dan Uji Hipotesis	60
H. Jadwal Kegiatan Penelitian	61

BAB IV: DISKRIPSI LOKASI PENELITIAN..... 61

A. Sejarah Singkat Kelurahan Perawang	62
B. Tugas dan Fungsi	68
C. Struktur Organisasi	73

BAB V: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... 76

A. Identitas Responden	76
1. Usia Responden.....	76
2. Jenis Kelamin	77
3. Tingkat Pendidikan	78
B. Hasil Pembahasan Penelitian Tentang Evaluasi Kinerja Badan Permusyawaratan Kampung Di Kampung Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.....	79
1. Efektifitas	79
2. Efisiensi.....	87
3. Kecukupan.....	97
4. Kesamaan/Pemerataan	105
5. Responsivitas	112
6. Ketepatan.....	119
7. Hasil Rekapitulasi Jawaban Responden.....	126

BAB VI: KESIMPULAN..... 129

A. Kesimpulan	129
B. Saran	131

DAFTAR PUSTAKA..... 133

DAFTAR LAMPIRAN..... 136

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
I.1 :	Jumlah Kelurahan dan Kampung Di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.....	7
I.2 :	Data Jumlah Pegawai Di BAPEKAM Kampung Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak	9
I.3 :	Data Jumlah Pertemuan BAPEKAM Kepada Masyarakat Pada tahun 2017-2019 di Kampung Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak	10
II.1:	Konsep Operasional Variabel Evaluasi Kinerja Badan Permasyarakatan Kampung Di Kampung Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak	44
III.1:	Populasi dan Sampel Penelitian Tentang Evaluasi Kinerja Badan Permasyarakatan Kampung Di Kampung Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak	56
III.2 :	Tabel Populasi dan Sampelm yang Terdiri dari, Kepala Dusun, RK, RT, Ketua LPM, Tokoh Agama, dan Masyarakat di Kampung Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang pada Penelitian Tentang Evaluasi Kinerja Badan Permasyarakatan Kampung Di Kampung Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Kecamatan Tualang	56
III.3:	Jadwal Kegiatan Penelitian Tentang Pelaksanaan Tugas Badan Permasyarakatan Desa Di Desa Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak	61
IV.1:	Batas-Batas Wilayah Kampung Pinang Sebatang Timur	64
IV.2:	Jarak Dari Kelurahan Ke Pusat Pemerintahan	65
IV.3:	Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur Di Pinang Sebatang Timur.....	74
IV.4:	Jumlah Penduduk Berdasarkan Gender / Jenis Kelamin, KK di Pinang Sebatang Timur.....	75

V.1:	Identitas Responden Tentang Evaluasi Kinerja Badan Permasyarakatan Kampung Di Kampung Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak	76
V.2:	Identitas Responden Tentang Evaluasi Kinerja Badan Permasyarakatan Kampung Di Kampung Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak	78
V.3:	Identitas Responden Tentang Evaluasi Kinerja Badan Permasyarakatan Kampung Di Kampung Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak	78
V.4:	Distribusi Tanggapan Responden Staf BAPEKAM Tentang Evaluasi Kinerja Badan Permasyarakatan Kampung Di Kampung Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Untuk Indikator Efektifitas.....	80
V.5:	Distribusi Tanggapan Responden untuk pihak eksternal atau Masyarakat di Desa Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Untuk Indikator Efektifitas	82
V.6:	Respon Masyarakat pada Penyelenggaraan Musyawarah Kampung Di Kampung Pinang Sebatang Timur, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak Tahun 2018-2020	85
V.7:	Data Aspirasi Masyarakat yang di tampung oleh Bapekam di Kampung Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Tahun 2020.....	86
V.8:	Distribusi Tanggapan Responden Staf BAPEKAM Tentang Evaluasi Kinerja Badan Permasyarakatan Kampung Di Kampung Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Untuk Indikator Efesiensi.....	87
V.9:	Distribusi Tanggapan Responden untuk pihak eksternal atau Masyarakat di Desa Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Untuk Indikator Efesiensi.....	90

V.10:	Data Pegawai BAPEKAM Yang Memberikan Pelayanan	94
V.11:	Data Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kampung di Kampung Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Tahun 2020.....	95
V.12:	Distribusi Tanggapan Responden Staf BAPEKAM Tentang Evaluasi Kinerja Badan Permusyawaratan Kampung Di Kampung Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Untuk Indikator Kecukupan.....	97
V.13:	Distribusi Tanggapan Responden untuk pihak eksternal atau Masyarakat di Desa Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Kabupaten Siak Untuk Indikator Kecukupan	100
V.14:	Data Manfaat Yang Sudah Diterima Oleh Masyarakat	104
V.15:	Distribusi Tanggapan Responden Staf BAPEKAM Tentang Evaluasi Kinerja Badan Permusyawaratan Kampung Di Kampung Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Untuk Indikator Kesamaan/Pemerataan	105
V.16:	Distribusi Tanggapan Responden untuk pihak eksternal atau Masyarakat di Desa Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Kabupaten Siak Untuk Indikator Kesamaan/Pemerataan	107
V.17:	Data Kinerja BAPEKAM Yang Sudah Sesuai Dengan Perencanaan Kerja	111
V.18:	Distribusi Tanggapan Responden Staf BAPEKAM Tentang Evaluasi Kinerja Badan Permusyawaratan Kampung Di Kampung Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Untuk Indikator Responsivitas	112
V.19:	Distribusi Tanggapan Responden untuk pihak eksternal atau Masyarakat di Desa Pinang Sebatang Timur Kecamatan	

Tualang Kabupaten Siak Kabupaten Siak Untuk Indikator Responsivitas	114
V.20: Data Tugas Dan Fungsi BAPEKAM Dalam Penyelenggaraan Musyawarah Kampung	118
V.21: Distribusi Tanggapan Responden Staf BAPEKAM Tentang Evaliasi Kinerja Badan Permusyawaratan Kampung Di Kampung Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Untuk Indikator Ketepatan	119
V.22: Distribusi Tanggapan Responden untuk pihak eksternal atau Masyarakat di Desa Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Kabupaten Siak Untuk Indikator Ketepatan	121
V.23: Data Target BAPEKAM dalam penyelenggaraan Musyawarah Kampung	125
V.24: Rekapitulasi Perindikator Staf BAPEKAM Tentang Evaliasi Kinerja Badan Permusyawaratan Kampung Di Kampung Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak ...	127
V.25: Rekapitulasi Per-indikator Tanggapan Responden untuk pihak eksternal atau Masyarakat di Desa Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Kabupaten Siak Untuk Indikator Ketepatan.....	129

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
II.1: Kerangka Pikir Evaluasi Kebijakan Badan Permusyawaratan Kampung Di Kampung Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak	41
IV. 1: Struktur Organisasi Pemerintahan Kampung Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak	66
IV.2: Struktur Organisasi Badan Permusyawaratan Kampung Di Kampung Pinang Sebatang Timur kecamatan Tualang Kabupaten Siak	73



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Daftar Kuisioner Untuk Masyarakat Responden Badan Permusyawaratan Kampung Pinang Sebatang Timur.....	137
2. Daftar Wawancara Ketua Badan Permusyawaratan Kampung Pinang Sebatang Timur.....	149
3. Daftar Wawancara Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Kampung Pinang Sebatang Timur.....	152
4. Hasil Rekapitulasi Telly Jawaban Responden Penelitian Tentang Evaluasi Kinerja Badan Permusyawaratan Kampung Di Kampung Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak	155
5. Dokumentasi Tentang Evaluasi Kinerja Badan Permusyawaratan Kampung Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak	159
6. SK Dekan Dari Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik No. 524/UIR-Fs/Kpts/2020 Tentang Penetapan Dosen Pembimbing Penulisan Skripsi Mahasiswa an. Asep Saputra.....	163
7. Surat Rekomendasi Riset Dari Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Nomor No. 1051/E-UIR/27-FS/2021, perihal izin penelitian an. Asep Saputra.....	164
8. Surat Rekomendasi No. 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/39453 dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Provinsi Riau, perihal izin penelitian an. Asep Saputra.....	165
9. Surat Rekomendasi No. 071/Kesbampol/352 dari Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, perihal izin penelitian an. Asep Saputra	166
10. Surat Keterangan No.110/PST/III/2021 Dari Kepenghuluan Pinang Sebatang Timur Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, tentang pelaksanaan riset dan pengumpulan data an. Asep Saputra.....	167

SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian konferehensi Skripsi yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Asep Saputra
NPM : 167110568
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Evaluasi Kinerja Badan Permusyawaratan Kampung Di Kampung Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian konferehensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya nyatakan :

1. Bahwa naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa keseluruhan persyaratan administratif, akademi dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang di tetapkan oleh Fakultas dan Universitas.
3. Bahwa, apabila di kemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian seminar yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara Republik Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 24 Juni 2021
Pelaku Pernyataan,

Materai

Rp. 6.000,-

Asep saputra

**EVALUASI KINEJA BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG DI
KAMPUNG PINANG SEBATANG TIMUR KECAMATAN TUALANG
KABUPATEN SIAK**

ABSTRAK

Oleh

ASEP SAPUTRA

167110568

Kata Kunci: Evaluasi, Kinerja Badan Permusyawaratan Kampung

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana Evaluasi Kinerja Badan Permusyawaratan Kampung Di Kampung Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak. Penelitian ini dilakukan di Kampung Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana Evaluasi Kinerja Badan Permusyawaratan Kampung Di Kampung Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak. Teknik Pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah Wawancara, Observasi, Kuesioner, Dokumentasi. Tipe Penelitian yang digunakan dalam Penelitian ini adalah survey deskriptif dengan melalui teknik pengumpulan data dijadikan sebagai acuan dasar untuk menganalisis masing-masing indikator Variabel yang diteliti, dengan Metode Kuantitatif. Dalam Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan menggunakan teknik sampling jenuh secara sensus. Jumlah Sampel sejalan dengan tujuan penelitian ini, maka populasi dan sampel pada penelitian ini berjumlah sampel sebanyak 61 orang, diambil dari Pegawai Badan Permusyawaratan Kampung dan Masyarakat yang menyampaikan aspirasi Kepada Badan Permusyawaratan Kampung. Setelah semua data di Evaluasi dengan penelitian Kuantitatif maka diperoleh hasil penelitian tentang Evaluasi Kineja Badan Permusyawaratan Kampung Di Kampung Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak untuk BAPEKAM berada pada kategori “Cukup Baik” sedangkan untuk Masyarakat berada pada kategori “Kurang Baik”. Hasil Penelitian ini menunjukkan Evaluasi Kineja Badan Permusyawaratan Kampung Di Kampung Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak berjalan dengan baik sesuai dengan standar yang telah di tetapkan.

**EVALUATION OF THE PERFORMANCE OF THE KAMPUNG
CONSULTANCY AGENCY IN KAMPUNG PINANG SEBATANG EAST,
TUALANG DISTRICT, SIAK REGENCY**

ABSTRACT

Oleh

ASEP SAPUTRA

167110568

Keywords: Evaluation, Performance of the Village Consultative Body

The purpose of the study was to find out how the Performance Evaluation of the Village Consultative Body in Kampung Pinang, East Sebatang, Kecamatan Tualang, Siak Regency. This research was conducted in Kampung Pinang Sebatang Timur, Kecamatan Tualang, Siak Regency. The problem in this research is how to evaluate the performance of the Village Consultative Body in Kampung Pinang, East Sebatang, Kecamatan Tualang, Siak Regency. Data collection techniques that the authors use in this study are interviews, observations, questionnaires, documentation. The type of research used in this study is a descriptive survey through data collection techniques used as a basic reference to analyze each indicator of the variables studied, with quantitative methods. In this study using a collection technique using a census saturated sampling technique. The number of samples is in line with the objectives of this study, so the population and sample in this study amounted to a sample of 61 people, taken from the Village and Community Consultative Body Employees who conveyed aspirations to the Village Consultative Body. After all the data is evaluated with quantitative research, the results of research on Evaluation of the Performance of the Village Consultative Body in Kampung Pinang Sebatang Timur, Kecamatan Tualang, Siak Regency for BAPEKAM are in the "Good Enough" category while for the Community it is in the "Not Good" category. The results of this study show that the evaluation of the performance of the Village Consultative Body in Kampung Pinang, East Sebatang, Kecamatan Tualang, Siak Regency is running well according to the standards that have been set.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah telah dilaksanakan serentak diseluruh Indonesia, undang-undang tersebut menjadi landasan pemberian otonomi secara luas kepada daerah kabupaten maupun kota, utamanya dalam mengeskpresikan potensi pembangunan yang dimiliki. Disamping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, kekhususan potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah daerah sebagai organisasi yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan serta kepentingan masyarakat senantiasa meningkatkan kinerjanya sesuai dengan perkembangan dan tuntutan masyarakat. Badan Permusyawaratan kampung (Bapekam) sebagai lembaga perwakilan di kampung juga harus melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana mestinya. Secara umum pemberian pelayanan yang baik oleh pemerintah kampung akan mampu memberikan dampak positif bagi pemerintah daerah itu sendiri. Pelayanan kebutuhan masyarakat dan publik hendaknya melibatkan masyarakat dalam pelaksanaannya.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan

nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat

Aparat pemerintah desa pada dasarnya muncul dan dibentuk berdasarkan partisipasi oleh masyarakat desa. Sebagai bentuk suatu sistem pemerintahan yang demokratis, masyarakat memilih secara langsung beberapa individu yang dipercaya dapat mengatur, melayani, melindungi dan menjadikan masyarakat dapat mencapai tingkat kesejahteraan hidup.

Perwujudan sistem demokrasi lantas tidak hanya sebatas pemilihan aparat pemerintahan secara langsung oleh masyarakat, lebih lanjut dibentuklah sebuah sistem kelembagaan desa yang mempunyai beberapa fungsi salah satunya adalah menampung aspirasi masyarakat. Melalui lembaga inilah masyarakat dapat lebih mengaplikasikan sistem demokrasi yang sesungguhnya.

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Siak Nomor 5 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Kampung, pasal 1 ayat (7) menjelaskan bahwa Desa atau yang disebut dengan nama lain kampung yang selanjutnya disebut Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas- batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat

bersadarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia.

Dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Siak Nomor 5 Tahun 2015 tentang perubahan penamaan Desa menjadi Kampung menjelaskan bahwa dengan semangat otonomi daerah dan mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Kabupaten Siak, perlu dilakukan perubahan penamaan dari Desa menjadi Kampung yang bertujuan untuk melestarikan penamaan lama yang pernah digunakan sebelum terbentuknya Kabupaten Siak, perubahan nama tersebut dalam rangka menata kembali penamaan dalam bahasa melayu untuk Desa dengan sebutan Kampung di Kabupaten Siak.

Setelah diberlakukannya perubahan nama Desa menjadi Kampung maka akan berubah pula seluruh sebutan perangkat, kelembagaan yang ada di Kampung. Seperti Kepala Desa menjadi Penghulu, Sekretaris Desa menjadi Kerani, Kepala Urusan menjadi Juru Tulis, Rukun Warga menjadi Rukun Kampung, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menjadi Badan Permusyawaratan Kampung (Bapekam).

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Siak Nomor 5 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Kampung, pasal 1 ayat (9) menjelaskan Pemerintahan Kampung adalah Badan Permusyawaratan Kampung dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Badan Permusyawaratan Kampung (Bapekam) menjadi salah satu bentuk demokrasi pada lingkup kampung.

Lembaga Badan Permusyawaratan Kampung harus dapat membangun hubungan yang positif dengan Penghulu, sebab Penghulu sebagai pemimpin dalam menjalankan sistem pemerintahan saling membutuhkan peran Badan Permusyawaratan Kampung. Oleh sebab itu hubungan yang harmonis diantara keduanya harus terjalin dengan baik. Badan Permusyawaratan Kampung memiliki fungsi kontrol yang bertujuan agar pemerintahan di kampung menjadi lebih demokratis, dan transparan.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Badan Permusyawaratan Kampung :

1. Kedudukan Bapekam:
 - a. Bapekam berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan kampung;
 - b. Bapekam merupakan wahana untuk melaksanakan Demokrasi Pancasila.
2. Bapekam memiliki fungsi:
 1. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Kampung bersama Kepala Kampung.
 2. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Kampung; dan
 3. melakukan pengawasan kinerja Kepala Kampung.
3. Tugas Bapekam:
 - a. Bapekam melakukan penggalan aspirasi masyarakat Langsung kepada kelembagaan kampung dan masyarakat kampung termasuk kelompok masyarakat miskin, masyarakat berkebutuhan khusus, perempuan,

kelompok marjinal. Penggalan aspirasi dilaksanakan berdasarkan keputusan musyawarah Bapekam yang dituangkan dalam agenda kerja Bapekam.

- b. Bapekam menampung aspirasi masyarakat di kampung Aspirasi masyarakat diadministrasikan dan disampaikan dalam musyawarah Bapekam.
- c. Bapekam mengelola aspirasi masyarakat kampung melalui pengadministrasian dan perumusan aspirasi berdasarkan pembidangan yang meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat kampung.
- d. Bapekam menyalurkan aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan dan atau tulisan. Penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan seperti penyampaian aspirasi masyarakat oleh Bapekam dalam musyawarah Bapekam yang dihadiri Kepala kampung.
- e. Bapekam melaksanakan Musyawarah Bapekam Dalam rangka menghasilkan keputusan Bapekam terhadap hal-hal yang bersifat strategis seperti musyawarah pembahasan dan penyepakatan rancangan Peraturan kampung, evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Kampung, menetapkan peraturan tata tertib Bapekam, dan usulan pemberhentian anggota Bapekam.

4. Wewenang Bapekam:

- a. membahas rancangan Peraturan Kampung bersama Penghulu;

- b. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan Kampung dan peraturan penghulu;
- c. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian penghulu;
- d. membentuk panitia pemilihan penghulu;
- e. menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- f. menyusun tata tertib Bapekam
- g. mengadakan perubahan peraturan Kampung bersama Penghulu;
- h. menetapkan calon Penghulu terpilih;
- i. menyelenggarakan musyawarah Bapekam;
- j. menyelenggarakan musyawarah Kampung;
- k. menyelenggarakan musyawarah Kampung khusus untuk pemilihan Penghulu antar waktu;
- l. melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Penghulu;
- m. melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Kampung; dan
- n. menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Kampung dan Lembaga Kampung lainnya.

5. Bapekam mempunyai hak:

- a. mengawasi dan Meminta keterangan tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung Kepada Pemerintah Kampung;

- b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan Kampung, pelaksanaan pembangunan Kampung, pembinaan kemasyarakatan Kampung, dan pemberdayaan masyarakat Kampung;
- c. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung;
- d. memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis, dan kunjungan lapangan seperti studi banding yang dilakukan di dalam negeri; dan
- e. penghargaan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten bagi pimpinan dan anggota Bapekam yang berprestasi.

Hadirnya Badan Permusyawaratan Kampung (Bapekam) di dalam kampung adalah salah satu media masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya demi kemajuan daerah tersebut, termasuk pada Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.

Tabel I.1 Jumlah Kelurahan dan Kampung Di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.

Kecamatan Tualang Siak		
No	Nama Kelurahan	Nama kampung
1	Perawang	Maredan
2.		Maredan barat
3.		Perawang Barat
4.		Pinang Sebatang
5.		Pinang Sebatang Barat
6.		Pinang Sebatang Timur
7.		Tualang

Sumber : Modifikasi Penulis 2021

Berdasarkan Tabel I.1 Di Kecamatan Tualang terdiri dari 1 (satu) kelurahan yaitu Kelurahan Perawang, dan terdiri dari 7 (tujuh) kampung yaitu Kampung Maredan, Kampung Maredan Barat, Kampung Perawang Barat, Kampung Pinang Sebatang, Kampung Pinang Sebatang Barat, Kampung Pinang Sebatang Timur, Kampung Tualang.

Kampung Pinang Sebatang Timur sebagai satu dari 7 (tujuh) kampung yang telah membentuk Badan Permusyawaratan Kampung (Bapekam) untuk membantu kinerja Penghulu dalam penyelenggaraan pemerintahan, seperti pada umumnya kantor Badan Permusyawaratan Kampung (Bapekam) berada pada wilayah Kantor Desa. Ketua Bapekam beserta anggotanya dipilih langsung oleh masyarakat kampung dan anggotanya dipilih berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis. Dengan keberadaan Badan Permusyawaratan Kampung (Bapekam) di Kampung diharapkan akan sesuai dengan fungsi dan tujuan berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Siak Nomor 5 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Kampung (Bapekam).

Lalu dalam melaksanakan program kerja belum sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat, dalam hal ini masyarakat mengharapkan adanya perbaikan jalan di Kampung Pinang Sebatang Timur tetapi masih kurangnya respon ataupun tanggapan dari Bapekam .

Selanjutnya dalam perihal pengawasan terhadap pemerintahan kampung yang diawasi oleh BAPEKAM, BAPEKAM masih belum bisa mengawasi dengan baik perihal anggaran dan pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Kampung,

sehingga masyarakat merasa kurang puas oleh kinerja yang dilakukan oleh BAPEKAM.

Tabel I.2 Data Jumlah Pegawai Di BAPEKAM Kampung Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.

No.	Nama	Pendidikan	Jabatan
1.	Syofia Yardi	SMA	Ketua
2.	Rahman	SMA	Wakil Ketua
3.	Syartunis, S.Pd.I	S1	Sekretaris
4.	Dedi Eka Putra	SMA	Ketua Bidang penyelenggaraan pemerintahan kampung dan pembinaan kemasyarakatan
5	Bambang P	SMA	Ketua bidang pembangunan kampung pemberdayaan masyarakat kampung
6.	Jumel Efendi Zein	SMA	Anggota
7.	Yusnidar	SMA	Anggota
8.	Bantu Lumban Batu	SMA	Anggota
9.	Nurhayati	SMA	Anggota

Sumber : Modifikasi Penulis 2021

Berdasarkan gambar 1.2 Badan Permusyawaratan Kampung (Bapekam) di Kampung Pinang Sebatang Timur terdiri dari 9 anggota termasuk Ketua Bapekam, Wakil Ketua Bapekam dan Sekretaris. Hal ini sesuai dalam Peraturan Daerah Kabupaten Siak No. 5 Tahun 2015 pada Pasal (9) ayat (1) jumlah anggota Badan Permusyawaratan Kampung ditetapkan, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang, dengan memperhatikan Wilayah, perempuan, penduduk, dan kemampuan keuangan Kampung.

Tabel. I.3 Data Jumlah Pertemuan BAPEKAM Kepada Masyarakat Pada tahun 2017-2019 di Kampung Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.

No	Nama Kegiatan	Waktu	Tempat
1.	Musyawarah Pembangunan Infrastruktur Kampung.	26 januari 2017	Aula Kampung
2.	Pembahasan Tentang Kerusakan Jalan Di Simpang Bunut.	12 Februari 2017	Aula Kampung
3.	Pembahasan Mengenai Surat Pemberitahuan Kepada Penghulu 6 Bulan Sebelum Masa Jabatannya Berakhir	12 April 2017	Aula Kampung
4.	Pembahasan tentang rencana pembentukan panitia pemilihan Penghulu Kampung Pinang Sebatang Timur.	8 Mei 2017	Kantor Bapekam Pinang Sebatang Timur
5.	Pembahasan Tentang Peran Bapekam dalam menyukseskan pemilihan Penghulu Kampung Pinang Sebatang Timur	20 Juli 2017	Kantor Bapekam Pinang Sebatang Timur
6	Pengajuan rancangan pengajuan kampung	8 Januari 2018	Aula Kampung
7	Pembahasan Tentang Kerusakan Jalan Pinang Sebatang Timur.	15 Februari 2018	Aula Kampung
8	Pembahasan Tentang Penyiraman Jalan Di Desa Pinang Sebatang Timur.	10 April 2018	Aula Kampung
9	Pembahasan Tentang pembangunan jalan yang ada di Pinang Sebatang Timur.	17 Juni 2018	Aula Kampung
10	Penyusunan RKP Kampung Melalui Musyawarah Kampung (MUSKAM)	2 November 2018	Aula Kampung
11	Pembahasan Tentang Peraturan Ronda di Desa Pinang Sebatang Timur	18 februari 2019	Aula Kampung
12	Pembahasan Tentang Gotong Royong 2 minggu sekali	5 Maret 2019	Aula Kampung
No	Nama Kegiatan	Waktu	Tempat
13	Pembahasan Tentang Pemakaian Ambulan yang Ada di Pinang Sebatang Timur.	15 Juli 2019	Aula Kampung

14	Pembahasan Tentang Pramuskam Di Kampung Pinang Sebatang Timur	23 Oktober 2019	Aula Kampung
----	---	-----------------	--------------

Sumber : Sumber Kantor BAPEKAM Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak 2021

Berdasarkan Tabel I.3 Data Jumlah Pertemuan BAPEKAM Kepada Masyarakat Pada tahun 2017- 2019 di Kampung Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Terdiri dari 14 kali pertemuan.

Dengan mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 5 Tahun 2015 yang telah disebutkan diatas, BAPEKAM di kampung pinang sebatang timur kecamatan tualang kabupaten siak dapat menjalankan fungsinya untuk memperjuangkan dan mengakomodasikan kepentingan masyarakat. Dalam kaitan ini maka BAPEKAM maupun Pemerintah kampung di kampung pinang sebatang timur kecamatan tualang kabupaten siak harus memiliki sumber daya manusia yang profesional, mantap dan dapat diandalkan kinerja organisasinya secara keseluruhan, sehingga Pemerintah Kampung dan BAPEKAM akan mampu memberikan respon terhadap setiap percepatan kemajuan dan dinamika yang berkembang.

Salah satu tugas pokok yang dilaksanakan Badan Permusyawaratan Kampung (BAPEKAM) adalah kewajiban dalam menyalurkan aspirasi dan meningkatkan kehidupan masyarakat desa sebagaimana juga diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Siak No. 5 Tahun 2015 Tentang pokok-pokok Pemerintahan Daerah, BAPEKAM dituntut mampu menjadi aspirator dan artikulator antara masyarakat kampung dengan pejabat atau instansi yang berwenang. Tugas dan peran tersebut

diwujudkan dalam proses pembuatan peraturan kampung dengan memperjuangkan aspirasi masyarakat, tetapi pada kenyataannya:

1. Berdasarkan hasil pra survei yang peneliti temukan, BAPEKAM kurang mengadakan pertemuan atau rapat dengan Masyarakat untuk mendapatkan aspirasi sehingga masyarakat sulit untuk menyampaikan aspirasinya.
2. Berdasarkan hasil pra survei yang peneliti temukan, kurangnya Kinerja Bapekam dalam melaksanakan Program kerja yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Kampung (Bapekam) sehingga dalam pelaksanaannya dapat dikatakan tidak efektif.
3. Berdasarkan hasil pra survei yang peneliti temukan, kurangnya pengawasan BAPEKAM terhadap Kinerja Pemerintah Kampung Di Kampung Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena-fenomena yang peneliti temui dilapangan serta telah diuraikan diatas, maka peneliti merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:
“Evaluasi Kinerja Badan Permusyawaratan Kampung Di Kampung Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana kinerja BAPEKAM di kampung pinang sebatang timur kecamatan tualag kabupaten siak.
2. Untuk mengetahui apa saja faktor hambatan yang menjadi kendala Badan Permusyawaratan Kampung di kampung pinang sebatang timur

Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan atau manfaat dari penelitian ini adalah :

- a. Kegunaan teoritis, yaitu bermanfaat memberikan sumbangan pemikiran atau memperkaya konsep-konsep, teori-teori terhadap ilmu pengetahuan dari penelitian, terutama tentang kinerja BAPEKAM.
- b. Kegunaan akademis, yaitu sebagai referensi dan bahan pertimbangan bagi peneliti yang akan melakukan penelitian yang akan datang.
- c. Kegunaan praktis, bagi Pemerintahan daerah di kampung pinang sebatang timur kecamatan tualang kabupaten siak dapat dijadikan masukan dalam upaya peningkatan kinerja BAPEKAM dalam Pemerintahan Daerah.

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

Dalam penulisan karya ilmiah atau suatu penelitian diperlukan konsep landasan atau pijakan sebagai pedoman untuk mengemukakan dan memahami permasalahan penelitian agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam penelitian ini. Selanjutnya dapat dilihat konsep teori yang berhubungan dengan penelitian serta akan diuraikan beberapa teori yang digunakan dalam penulisan ini.

1. Konsep Administrasi

Secara etimologis, sebagaimana yang dikemukakan oleh Syafri (2012;3) bahwa administrasi berasal dari bahasa latin *ad* dan *ministrare*, yang berarti “membantu, melayani, atau memenuhi”, serta *administration* yang berarti “pemberian bantuan, pemeliharaan, pelaksanaan, pimpinan dan pemerintahan, pengelolaan”.

Pertama-tama marilah kita melihat pada pengertian administrasi dan ilmu administrasi itu sendiri, sebelum menguraikan berbagai unsur-unsur dan fungsi dari bagian unsur tersebut lebih jauh. Beberapa sarjana telah memberikan pengertian antara lain sebagai berikut.

Menurut White (Syafri 2012;9) Administration can be defined as the activities of group efforts, public, private, civil or military. Jadi, baginya administrasi adalah suatu proses yang umum ada pada usaha kelompok-kelompok,

baik pemerintah maupun swasta, baik sipil maupun militer, baik dalam ukuran besar maupun kecil.

Menurut Siagian (dalam Syafie 2010;14) Administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan dari keputusan-keputusan yang telah diambil dan pelaksanaan itu pada umumnya dilakukan oleh dua orang manusia atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Menurut Adams (Syafri 2012;8) administrasi adalah kemampuan mengkoordinasikan berbagai kekuatan sosial.

Menurut Atmosudirjo (Zulkifli dan Yogia 2014;12) juga menjelaskan bahwa kerjasama manusia dalam mencapai tujuan, sebagai objek studi ilmu administrasi terdapat sepuluh dimensi penting yang perlu dipahami dalam konsep administrasi yaitu:

- a. Administrasi merupakan suatu fenomena sosial, suatu perwujudan tertentu dalam masyarakat modern. Eksistensi dari pada administrasi berkaitan dengan organisasi, artinya administrasi terdapat didalam organisasi.
- b. Administrasi merupakan suatu hayat atau kekuatan yang memberikan hidup atau gerak kepada suatu organisasi. Tanpa administrasi yang sehat maka organisasi tidak akan sehat pula. Pembangkit administrasi sebagai suatu kekuatan atau energi atau hayat adalah 'administrator' yang harus pandai mengerakkan seluruh sistemnya yang terdiri atas manajer, staffer, dan personilnya.
- c. Administrasi merupakan suatu fungsi yang tertentu untuk mengendalikan, menggerakkan, mengembangkan, dan mengarahkan suatu organisasi yang

dijalankan oleh administrator dibantu oleh bawahannya, terutama para manajer dan staffer.

- d. Administrasi merupakan suatu kelompok orang-orang yang secara bersama-sama merupakan ‘badan pimpinan’ dari pada suatu organisasi.
- e. Adminitrasi merupakan suatu seni (*art*) yang merupakan bakat, ilmu pengetahuan dan pengalaman.
- f. Adminitrasi merupakan suatu proses penyelenggaraan bersama atau proses kerjasama antara sekelompok orang-orang tertentu untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang telah ditentukan dan direncanakan sebelumnya. Kerjasama orang-orang tersebut berlangsung secara dan melalui organisasi.
- g. Adminitrasi merupakan suatu jenis tingkah laku atau sikap kelakuan sosial yang tertentu (*administrative behaviour or administration as special type of social behaviour*) yang memerlukan sikap dan mental tertentu serta merupakan suatu type tingkah laku manusia tertentu (*special type of behaviour*).
- h. Administrasi merupakan suatu teknik atau praktek yang tertentu, suatu tatacara yang merupakan kemampuan atau mengerjakan sesuatu yang memerlukan kemampuan atau mengerjakan kemampuan, kemahiran, keterampilan, yang hanya diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan.
- i. Adminitrasi merupakan suatu sistem yang tertentu, yang merupakan input, transpormasi, pengelolaan dan output tertentu.
- j. Administrasi merupakan suatu menejemen tertentu yang merupakan ‘*overall management*’ dari suatu organisasi. Pada hakekatnya manajemen

merupakan pengendalian dari sumberdaya-sumberdaya menuju tercapainya suatu prapta (*objective*) tertentu. Sumberdaya-sumberdaya (*resources*) dimaksud meliputi: orang-orang (*man*), uang (*money*), mesin-mesin (*machines*), bahan atau peralatan (*material*), tenaga atau energi (*energy*), dan waktu (*time*). Dalam istilah administrasi tecangkup adanya pesan, tugas dan tanggung jawab, dan kepercayaan yang diberikan oleh para pemilik organisasi.

Menurut Gie (Syafiie 2003;4) Administrasi adalah segenap rangkaian kegiatan pentaan terhadap pekerjaan pokok yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam kerja mencapai tujuan tertentu.

Selanjutnya menurut Nawawi (dalam Syafiie, 2003;5) mendefinisikan bahwa administrasi adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan sebagai proses pengendalian usaha kerjasama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan sebelumnya.

Jadi dari seluruh pendapat para ahli dapat saya simpulkan bahwa Administrasi merupakan sekumpulan orang yang bekerja sama didalam suatu organisasi pemerintahan untuk mencapai suatu tujuan organisasi secara efektif dan efesien.

Definisi para ahli tentang administrasi ini sangat banyak sehingga tidak perlu bagi penulis sajikan satu persatu. Karena pada prinsipnya mempunyai pengertian yang sama, yaitu antara lain:

- a. Kerja sama
- b. Banyak orang, dan,

c. Untuk mencapai tujuan bersama.

Alternatif prinsip-prinsip umum administrasi yang dijumpai dalam referensi ilmu administrasi, Fayol (Zulkifli 2005;71) mengemukakan terdapat 14 prinsip umum administrasi yaitu:

- a. Pembagian kerja
- b. Pendelegasian dan wewenang
- c. Disiplin
- d. Kesatuan perintah
- e. Kesatuan arah dan tujuan
- f. Mendahulukan atau mengutamakan atau menempatkan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi
- g. Pengupahan atau penggajian
- h. Sentralisasi
- i. Skala hierarki
- j. Tata tertib
- k. Keadilan
- l. Stabilitas jabatan
- m. Prakarsa atau inisiatif
- n. Solidaritas sekelompok kerja

Selain dari prinsip-prinsip umum administrasi perlu kita pahami bahwasanya terdapat unsur-unsur administrasi. Menurut Syafri (2012;11) unsur-unsur administrasi itu memiliki 8 bagian yaitu:

- a. Organisasi

- b. Manajemen
- c. Komunikasi
- d. Kepegawaian
- e. Keuangan
- f. Perbekalan
- g. Tata usaha
- h. Hubungan masyarakat

Dari uraian mengenai administrasi diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kegiatan administrasi merupakan kegiatan/proses yang sistematis dimana kegiatan tersebut melibatkan beberapa unsur penting guna mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien.

Administrasi menentukan kemana arah dan tujuan organisasi. Administrasi sangat penting didalam menentukan dan mengatur kegiatan organisasi. Kegiatan organisasi yang baik dan terstruktur akan mewujudkan organisasi yang sehat dan dinamis. Begitu juga dengan Negara sebagai organisasi publik yang begitu besar.

Pelaksanaan administrasi yang baik akan menentukan keberhasilan suatu Negara. Untuk menjalankan dan menentukan kualitas administrasi yang dijalankan oleh negara tergantung kepada sumber daya manusia yang dimilikinya. Kumpulan sumber daya tersebut membentuk suatu kesatuan yang dinamakan sebagai organisasi.

2. Konsep Organisasi

Administrasi dan organisasi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Kegiatan administrasi mengarahkan pencapaian tujuan organisasi yang efektif dan efisien, dan organisasi merupakan sarana untuk mencapai tujuan.

Menurut Makmur (2007;107) Organisasi adalah suatu bentuk persekutuan social dari sekelompok manusia yang saling berinteraksi dan bereaksi ke dalam suatu ikatan pengaturan dan keteraturan, dengan memiliki fungsi dan tugas sebagai suatu kesatuan yang mengarah pada pencapaian tujuan serta mempunyai batas-batas yang jelas, sehingga dapat dipisahkan secara tegas masing-masing manusia yang terikat dalam persekutuan.

Menurut Prajudi Atmosudirjo dalam Makmur 2007:107, mengatakan bahwa organisasi adalah suatu kelompok yang terdiri dari dua orang atau lebih yang dengan sadar bekerja sama secara terpadu dalam suatu konteks tertentu, menurut batasan-batasan dan fungsi-fungsi tertentu guna mencapai suatu tujuan bersama tertentu atau suatu perangkat tujuan-tujuan bersama tertentu.

Dari batasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa organisasi merupakan suatu wadah atau suatu system saling mempengaruhi antara orang dalam kelompok yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Organisasi juga sebagai tata hubungan social, dalam hal ini seorang individu melakukan proses interaksi sesamanya didalam organisasi tersebut.

Menurut John D. Millet dalam syafiie 2010:51 mengatakan bahwa organisasi adalah sebagai kerangka struktur dimana pekerjaan dari beberapa orang diselenggarakan untuk mewujudkan suatu tujuan bersama.

Organisasi adalah proses kegiatan ditata/diatur menurut sifat, bidang, jenis urgensinya, kegiatan selaku pimpinan bantuan staf, maupun pelaksana operasional. Proses kegiatan tersebut merupakan system usaha kerjasama sekelompok manusia secara rasional untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Fathoni, 2006;4).

Chester I. Bernard (dalam zulkifli 2015:99) mengatakan organisasi yaitu suatu system aktivitas kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih.

Organisasi merupakan proses merancang struktur formal, mengelompokan dan mengatur serta membagi tugas diantara para anggota untuk mencapai tujuan.

Jadi organisasi dapat didefinisikan sebagai berikut:

1. Organisasi dalam arti badan yaitu kelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu.
2. Organisasi dalam arti bagan yaitu gambaran skematis tentang hubungan kerjasama dari orang orang yang terlibat dalam organisasi untuk mencapai tujuan bersama.

Unsur-unsur dasar yang membentuk organisasi yaitu :

1. Adanya tujuan bersama
2. Adanya kerjasama dua orang atau lebih
3. Adanya pembagian tugas

4. Adanya kehendak untuk bekerja sama

Sedangkan menurut James D. Mooney (dalam zulkifli 2015;99) Organisasi adalah bentuk setiap perserikatan manusia untuk pencapaian suatu tujuan bersama.

Dari beberapa defenisi dan penjelasan yang telah disampaikan oleh beberapa ahli tersebut, maka hal itu dapat membuktikan ahwa dewasa ini masyarakat dimanapun berada tidak lepas dari praktik-praktik organisasi dalam kehidupannya. Dilingkungan masyarakat, baik itu organisasi formal maupun informal selalu ada seseorang yang dianggap lebih dari yang lain yang merupakan bentuk organisasi secara hierarki.

Menurut H. A. Simon (dalam syafiie 2010:51) mengatakan bahwa organisasi adalah sebagai pola komunikasi yang lengkap dan hubungan-hubungan lain dalam suatu kelompok orang-orang.

Menurut Chester I Barnard (dalam syafiie 2010:51) mengatakan bahwa organisasi adalah sebagai sebuah system tentang aktivitas kerja sama dua orang atau lebih dari sesuatu yang tidak berwujud dan tidak pandang bulu, yang sebagian besar tentang persoalan silaturahmi.

Penulis menyimpulkan bahwa organisasi merupakan suatu wadah atau suatu system saling mempengaruhi antara orang dalam kelompok yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Organisasi juga sebagai tata hubungan social, dalam hal ini seseorang individu melakukan proses interaksi sesamanya didalam organisasi tersebut. organisasi diciptakan sebagai kolektivitas yang

sengaja dibentuk untuk mencapai suatu tujuan khusus tertentu yang sedikit banyak didasarkan pada asas kelangsungan.

3. Konsep Manajemen

Istilah manajemen (*management*) telah diartikan oleh berbagai pihak dengan perspektif yang berbeda. Manajemen pada hakekatnya berfungsi untuk melakukan semua kegiatan-kegiatan yang perlu dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan dalam batas-batas kebijaksanaan umum yang telah ditentukan pada tingkat administrasi.

Menurut Manulang (dalam Zulkifli 2015;4) pengertian manajemen dapat dilihat dari tiga pengertian :

- a. Manajemen sebagai proses
- b. Manajemen sebagai suatu kolektivitas manusia
- c. Manajemen sebagai ilmu (*science*) dan seni (*art*)

Manullang mengemukakan (dalam Badrudin 2017;3) bahwa Manajemen adalah seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, dan pengawasan sumber daya untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan.

Menurut Badrudin (2017;2) Manajemen merupakan disiplin ilmu yang bertugas mencari kebenaran dalam predikat dimensi teoritis dan metodologi yang harus diuji dan dibuktikan berdasarkan fakta/data secara objektif kebenarannya. Oleh karena itu manajemen sebagai ilmu penting untuk dikembangkan agar didapatkan kebenaran ilmu.

Dari penjelasan para ahli, penulis berkesimpulan bahwa manajemen adalah kerangka kerja yang terdiri dari berbagai komponen yang secara keseluruhan saling berkaitan yang diorganisir sedemikian rupa dalam rangka mencapai suatu tujuan, serta pentingnya manajemen bagi setiap organisasi terutama pada bagian manajerial, karena setiap manajer atau pemimpin harus memiliki ilmu manajemen yang bertujuan untuk mengatur dari pada organisasi yang dipimpinnya.

Siagian dalam (Zulkifli, 2005;85) mengemukakan fungsi-fungsi manajemen terdiri dari:

1. Perencanaan (*planning*)
2. Pengorganisasian (*organizing*)
3. Pemberian motivasi (*motivating*)
4. Pengawasan (*Controlling*)
5. Penilaian (*Evaluating*)

Sementara menurut Siswanto (2005;2) manajemen adalah seni dan ilmu dalam perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pemotivasian, dan pengendalian terhadap orang dan mekanisme kerja untuk mencapai tujuan.

Dari penjelasan diatas manajemen dapat diartikan sebagai seni dan ilmu yaitu seni yang dimaksud sebagai suatu keahlian, kemahiran, kemampuan, dan keterampilan dalam aplikasi ilmu pengetahuan untuk mencapai tujuan, sementara manajemen suatu ilmu ialah akumulasi pengetahuan yang telah disistematiskan dan diorganisasikan untuk mencapai kebenaran umum (*general purpose*) (dalam Siswanto, 2005;3).

Selanjutnya Hasibuan (2012;2) manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Manajemen ini terdiri dari 6 unsur (6M) yaitu : Man, Money, Methode, Machines, Materials dan market.

Berdasarkan pendapat diatas tentang konsep manajemen dapat disimpulkan manajemen adalah ilmu dan seni yang mengatur proses pemanfaatan sumber daya yang ada dalam rangka usaha untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan.

Dari beberapa defenisi yang diuraikan diatas, dapat disimpulkan bahwa manajemen merupakan aktivitas atau proses untuk mencapai tujuan melalui kerjasama dengan orang lain, baik di dalam organisasi maupun diluar organisasi dengan membangun *net working* seperti pelanggan, public maupun pihak-pihak lain demi kesuksesan organisasi.

4. Manajemen Sumber Daya Manusia

Menurut Hasibuan (2019; 10) Manajemen sumber daya manusia adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat.

Manajemen sumber daya manusia merupakan salah satu bidang dari manajemen umum yang meliputi segi perencanaan, pengorganisasian pelaksanaan dan pengendalian. (Veithzal Rivai,2014:4).

Fungsi manajemen sumber daya manusia yang dikemukakan oleh Hasibuan (2012; 21-23) antara lain sebagai berikut:

a. Perencanaan

Perencanaan (*Human Resources planning*) adalah merencanakan tenaga kerja secara efektif serta efisien agar sesuai dengan kebutuhan perusahaan dalam membantu terwujudnya tujuan.

b. Pengorganisasian

Pengorganisasian adalah kegiatan untuk mengorganisasi semua karyawan dengan menetapkan pembagian kerja, hubungan kerja, delegasi wewenang, integrasi, dan koordinasi dalam bagian organisasi (*organization chart*)

c. Pengarahan

Pengarahan (*Directing*) adalah kegiatan mengarahkan semua karyawan, agar mau bekerja sama dan bekerja efektif serta efisien dalam membantu tercapainya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat.

d. Pengendalian

Pengendalian (*controlling*) adalah kegiatan mengendalikan semua karyawan agar menaati peraturan-peraturan perusahaan dan bekerja sesuai dengan rencana.

e. Pengadaan

Pengadaan (*procurement*) adalah proses penarikan, seleksi, penempatan, orientasi, dan induksi untuk mendapatkan karyawan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan.

f. Pengembangan

Pengembangan (*development*) adalah proses peningkatan keterampilan teknis, teoritis, konseptual, dan moral karyawan melalui pendidikan dan pelatihan.

g. Kompensasi

Kompensasi (*compensation*) adalah pemberian balas jasa langsung (*direct*) dan tidak langsung (*indirect*), uang atau barang kepada karyawan sebagai imbalan jasa yang diberikan kepada perusahaan.

h. Pengintegrasian

Pengintegrasian (*integration*) adalah kegiatan untuk mempersatukan kepentingan perusahaan dan kebutuhan karyawan, agar tercipta kerja sama yang serasi dan saling menguntungkan.

i. Pemeliharaan

Pemeliharaan (*maintenance*) adalah kegiatan untuk memelihara atau meningkatkan kondisi fisik, mental, dan loyalitas karyawan, agar mereka tetap mau bekerja sama sampai pension.

j. Kedisiplinan

Kedisiplinan merupakan fungsi MSDM yang terpenting dan kunci terwujudnya tujuan karena tanpa disiplin yang baik sulit terwujud tujuan yang maksimal.

k. Pemberhentian

Pemberhentian (*separation*) adalah putusnya hubungan kerja seseorang dari perusahaan.

Manajemen Sumber Daya Manusia yang dijelaskan oleh Simamora (dalam Sutrisno, 2014;5) ialah pendayagunaan, pengembangan, penilaian, pemberian balas jasa, dan pengelolaan individu anggota organisasi atau kelompok pekerja. Sedangkan Umar (dalam Sutrisno, 2014; 7), menjelaskan manajemen Sumber Daya Manusia menurut tugasnya dapat dikelompokkan atas tiga fungsi yaitu:

- a. Fungsi Manajerial: Perencanaan, Pengorganisasian, Pengarahan, dan Pengendalian
- b. Fungsi Operasional: Pengadaan, Pengembangan, Kompensasi, Pengintegrasian, Pemeliharaan, dan Pemutusan hubungan kerja
- c. Fungsi ketiga ialah kedudukan manajemen sumber daya manusia dalam mencapai tujuan organisasi perusahaan secara terpadu.

Sementara menurut Schuler *et al.* (dalam Sutrisno, 2014;8), setidaknya MSDM memiliki tiga fungsi utama yaitu:

- a. Memperbaiki tingkat produktifitas
- b. Memperbaiki kualitas kehidupan kerja
- c. Meyakinkan organisasi telah memenuhi aspek-aspek legal

Dalam menjalankan fungsi manajemen, seorang manajer dituntut harus mampu mengarahkan, menempatkan, dan mendayagunakan para bawahan atau anggota dalam organisasi agar kinerja dapat terarah dan sistematis. Sehingga, setiap kebijakan yang dirumuskan dalam upaya mencapai tujuan bersama dapat terlaksana secara efektif dan efisien.

5. Konsep Evaluasi

Evaluasi biasanya ditujukan untuk menilai sejauh mana kesuksesan kinerja kebijakan publik, guna untuk dipertanggung jawabkan kepada masyarakat. Se jauh mana tujuan dicapai, maka evaluasi diperlukan untuk melihat kesenjangan antara “harapan dengan kenyataan”. Kebijakan bermanfaat untuk memberikan masukan badi proses pengambilan keputusan kebijakan yang akan datang agar tidak mengulangi kesalahan yang sama.

Evaluasi menurut dunn menyamakan evaluasi dengan penaksiran (appraisal), pemberian angka (rating) dan penilaian (assessment), kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis haasil kebijakan dalam arti satuan nilai.

Siagian menyatakan evaluasi adalah sebagian proses pengukuran dan perbandingan dari hasil-hasil pekerjaan yang menyatakan dicapai dengan hasil-hasil yang seharusnya dicapai.

Menurut Wirawan (2015;3) Evaluasi adalah proses mengumpulkan informasi mengenai objek evaluasi dan menilai objek evaluasi dengan membandingkannya dengan standar evaluasi.

Menurut Hamzah (2012;87) evaluasi merupakan proses penilaian sejak pemberian, pengumpulan, dan pemberian data (informasi) kepada pengambilan keputusan yang akan dipakai untuk pertimbangan apakah program perlu diperbaiki, diteruskan, atau diberhentikan sedangkan menurut Provus (dalam Badrudin, 2013;251) mengartikan evaluasi sebagai perbedaan apa yang ada

dengan suatu standar tertentu yakni untuk mengetahui apakah terdapat suatu selisih atau tidak.

Menurut Arifin (2014;5) mengatakan bahwa evaluasi adalah suatu proses bukan suatu hasil (produk). Hasil yang diperoleh dari kegiatan evaluasi adalah kualitas sesuatu, baik yang menyangkut tentang nilai atau arti, sedangkan kegiatan untuk sampai pemberian nilai dan arti itu adalah evaluasi.

Menurut Rusby (2017;158) evaluasi kinerja adalah metode penilaian terhadap pelaksanaan tugas seseorang atau sekelompok orang atau unit-unit kerja dalam suatu organisasi sesuai tujuan atau standar kinerja yang telah ditetapkan lebih dahulu.

Menurut Anderson (dalam Hafis 2015;86) mengatakan bahwa secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi dan penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak. Dalam tataran ini evaluasi kebijakan dilihat sebagai kegiatan yang fungsional. Dalam artian bahwa evaluasi kebijakan dilakukan tidak hanya pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Dengan demikian evaluasi kebijakan bisa pada tahap perumusan masalah kebijakan, program-program yang diusulkan dari perumusan masalah kebijakan, tahap implementasi kebijakan, maupun pada tahap dampak atau hasil kebijakan.

Lester dan Stewart (dalam Hafis 2015;87) menyatakan bahwa evaluasi kebijakan dapat dibedakan kedalam dua tugas yang berbeda. Pertama, dengan menentukan konsekuensi-konsekuensi apa yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan

dengan cara menggambarkan dampaknya. Kedua, dengan menilai keberhasilan atau kegagalan dari suatu kebijakan berdasarkan standar atau kriteria yang telah ditentukan sebelumnya.

Menurut Taliziduhu Ndraha (2011;201) evaluasi adalah proses perbandingan antara standar dengan fakta dan analisis hasilnya. Terdapat tiga model evaluasi yaitu sebagai berikut:

- a. Model *Before-after*, yaitu perbandingan antaraz sebelum dan sesudah tindakan perlakuan (*treadment*) tolak ukurnya adalah kondisi *before*.
- b. Model *Das sollen-das sein*, yaitu perbandingan antara yang seharusnya dengan yang senyatanya. Tolak ukurnya adlaah *Das sollen*.
- c. Model kelompok *kontrol-kelompok tes*, ysitu perbandingan antara kelompok kontrol (tanpa perlakuan) dengan kelompok tes (diberi perlakuan). Tolak ukurnya adalah *kelompok kontrol*.

Evaluasi merupakan suatu proses untuk menyediakan informasi tentang sejauh mana suatu kegiatan tertentu telah dicapai, bagaimana perbedaan pencapaian dengan suatu strandar tertentu untuk mengetahui apakah ada selisih diantara keduanya, serta bagaimana manfaat yang dikerjakan itu bila dibandingkan dengan harapan yang ingin diperoleh (Umar, 2005;36).

Kriteria evaluasi menurut Tangkilisan (2003;62) ada tiga macam yaitu sebagai berikut:

1. Efektifitas yang mengidentifikasi apakah pencapaian tujuan yang diinginkan telah optimal.
2. Efisiensi menyangkut apakah manfaat yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai dari program publik sebagai fasilitas yang dapat memadai secara efektif.
3. Responsivitas yang menyangkut, mengkaji apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan/keinginan, preferensi atau nilai kelompok tertentu terhadap pemanfaatan suatu sumber daya.

Hasil evaluasi harus memberikan umpan balik kepada perencana, apakah program sudah berjalan sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan dan masalah-masalah apa yang menjadi hambatan selama program berjalan, umpan balik (feed back) merupakan bahan dari perencana untuk melakukan perencanaan program pembangunan selanjutnya (Bratakusumah, 2004;267).

Evaluasi dapat diartikan sebagai proses mekanisme untuk mensistematisasikan, dan meningkatkan aktivitas pemerintah dan hasil-hasilnya sehingga pejabat publik dapat bertindak serta bertanggung jawab, kreatif dan seefisien mungkin. Menurut Vendung (dalam Wirawan 2011;16).

Menurut Akdon (dalam Badrudin, 2015;260) mengungkapkan indikator kinerja yaitu kinerja input, proses, output, outcome. Dari indikator tersebut itu kita harus membuat skema umum penilaian dan membuat seperangkat instrument yang meliputi:

1. *Input* yaitu masukan yang diperlukan untuk pelaksanaan kebijakan.

2. *Proses* yaitu bagaimana sebuah kebijakan diwujudkan dalam bentuk pelayanan langsung kepada masyarakat.
3. *Output* (hasil) yaitu hasil dari pelaksanaan kebijakan.
4. *Outcome* (dampak) yaitu apakah suatu pelaksanaan kebijakan berdampak nyata terhadap kelompok sasaran sesuai dengan tujuan.

Menurut Siagian (2002;174) Evaluasi (penilaian) merupakan kegiatan sadar untuk membandingkan hasil yang seharusnya dicapai dan yang menurut kenyataan dicapai. Artinya penilaian harus dapat ditemukan apakah hasil yang dapat dicapai melebihi sasaran yang telah ditentukan atau sama dengan yang diharapkan atau bahkan mungkin kurang dari yang telah dinyatakan sebagai target.

Evaluasi menurut Santoso (2004; 31) adalah proses penilaian yang sistematis mencakup pemberian nilai, atribut, apresiasi dan pengenalan permasalahan serta pemberian solusi-solusi atas permasalahan yang ditemukan berkaitan erat dengan perencanaan yang serta utuh adalah salah satu fungsi dalam siklus manajemen apa saja yang direncanakan.

Selanjutnya Winarno (2007: 230) mengemukakan enam langkah dalam Evaluasi kebijakan, yaitu:

1. Mengidentifikasi tujuan program yang akan di Evaluasi
2. Analisis terhadap masalah
3. Deskripsi dan standarisasi kegiatan
4. Pengukuran terhadap tingkat perubahan yang terjadi

5. Menentukan apakah perubahan yang diamati merupakan akibat dari kegiatan tersebut atau karena penyebab lain
6. Beberapa indikator untuk menentukan keberadaan suatu dampak.

Pendapat William N. Dunn istilah evaluasi mempunyai arti yaitu secara umum istilah evaluasi dapat disamakan dengan penafsiran (appraisal), pemberian angka (rating), dan penilaian (assessment). Kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya. Dalam arti yang lebih spesifik, evaluasi berkenan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan.

Kriteria evaluasi yang dikembangkan oleh Dunn (2013; 610), mencakup lima indikator yaitu:

1. Efektifitas adalah penilaian terhadap efektifitas ditunjukkan untuk menjawab ketepatan waktu pencapaian hasil/tujuan. Parameternya adalah ketepatan waktu.
2. Efisiensi adalah penilaian terhadap efisiensi ditujukan untuk menjawab usaha minimal untuk mencapai hasil maksimal.
3. Kecukupan dalam menjawab masalah adalah penilaian terhadap kecukupan ditujukan untuk melihat sejauh mana tingkat pencapaian hasil dapat memecahkan masalah.
4. Pemerataan adalah penilaian terhadap pemerataan ditujukan untuk melihat manfaat dan biaya dari kegiatan distribusi secara proporsional untuk aktor-aktor yang terlibat.

5. Responsivitas adalah penilaian terhadap responsivitas ditujukan untuk mengetahui hasil rencana/ kegiatan/ kebijaksanaan sesuai dengan preferensi/keinginan dari target grup. Dengan arti lain responsivitas yaitu menggambarkan kemampuan organisasi publik dalam menjalankan misi dan tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
6. Ketepatangunaan adalah penilaian terhadap ketepatangunaan ditujukan untuk mengetahui kegiatan/ rencana/ kebijaksanaan tersebut memberikan hasil/ keuntungan dan manfaat terhadap target grup. Standar tingkat keuntungan dan manfaat sangat relatif sesuai dengan sistem nilai yang berlaku pada target grup tersebut.

Pengertian diatas menjelaskana bahwa evaluasi merupakan hasil kebijakan dimana pada kenyataan mempunyai nilai dari hasil tujuan atau sasaran kebijakan. Bagian akhir dari suatu proses kerja adalah evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja membantu pemimpin untuk mengambil keputusan dalam suatu kebijakan, nilai yang dihasilkan dari evaluasi membuat suatu kebijakan bermanfaat bagi pelayanan publik.

Evaluasi adalah penilaian secara sistematis untuk melihat sejauh mana efisiensi suatu program masukan untuk memaksimalkan keluaran. Evaluasi juga digunakan untuk mencapai tujuan dari program pencapaian masyarakat. Evaluasi juga termasuk salah satu kegiatan yang dilakukan untuk mengukur keberhasilan suatu kebijakan. Perbandingan antara tujuan yang hendak dicapai dalam penyelesaian masalah dengan kejadian yang sebenarnya, sehingga dapat disimpulkan apakah suatu kebijakan harus direvisi atau dilanjutkan.

Evaluasi biasanya ditunjukkan untuk menilai sejauh mana kesuksesan kinerja kebijakan publik, guna untuk di pertanggung jawabkan kepada masyarakat. Sejauh mana tujuan dicapai, maka evaluasi diperlukan untuk melihat kesenjangan antara “harapan” dengan “kenyataan”.

Dari pengertian diatas mengenai evaluasi dapat di ambil suatu kesimpulan bahwa evaluasi merupakan proses penilaian atas kegiatan yang telah direncanakan, apakah sesuai dengan rencana atau tidak, sehingga bisa diadakan perbaikan atau penyempurnakan dari kegiatan tersebut.

6. Konsep Kinerja

Konsep kinerja dapat dilihat dari dua segi, yaitu kinerja pegawai (perindividu) dan kinerja organisasi. Kinerja pegawai adalah hasil kerja perserorangan dalam suatu organisasi. Sedangkan kinerja organisasi adalah totalitas hasil kerja yang dicapai dalam suatu organisasi (dalam Harbani Pasolong, 2010;175).

Menurut Mahsun (2017:25) Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam strategi planning suatu organisasi.

Menurut Anwar Prabu Mangkunegara Kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang di berikan kepadanya.

Menurut Hasibuan kinerja (prestasi kerja) adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman dan kesungguhan serta waktu (dalam Rusby, 2017;159)

Melaksanakan kinerja memberikan manfaat bagi organisasi, tim dan individu. Manajemen kinerja mendukung tujuan menyeluruh organisasi dengan mengkaitkan pekerjaan dari setiap pekerjaan dan manajer pada keseluruhan unit kerja. Kinerja dengan perumusan dan penetapan tujuan organisasi dicapai melalui serangkaian kegiatan, dengan mengarahkan sumberdaya yang diperlukan untuk pencapaian tujuan tersebut. Tujuan tersebut dirancang atas sumber daya yang diperlukan, baik sumber daya alam, sumber daya kapital, sumber daya manusia, teknologi dan mekanisme kerja yang ditempuh dalam mencapai tujuan organisasi (dalam Wibowo, 2014;3).

Dalam Wibowo (2014;70), kinerja organisasi tidak hanya dipengaruhi oleh sumber daya manusia di dalamnya, tetapi juga sumber daya lainnya seperti dana, bahan, peralatan, teknologi, dan mekanisme kinerja yang berlangsung dalam organisasi.

Adapun kinerja organisasional (dalam Wibowo, 2014;89), merupakan produk dari banyak faktor, termasuk struktur organisasi, pengetahuan, sumber daya bukan manusia, posisi strategis, dan proses sumber daya manusia. Kinerja memerlukan strategis, tujuan dan integrasi yaitu sebagai berikut :

- a. Strategi merupakan integrasi rencana tin dak yang sangat luas untuk mencapai tujuan organisasi.
- b. Tujuan adalah memperbaiki produktivitas sumber daya manusia.
- c. Strategi bersifat terintegrasi, semua faktor atau variabel saling berhubungan dan memberikan kontribusi pada kinerja.

Sedangkan kinerja organisasi menurut Wibawa (1992;64), dan Atmosudirdjo (1997;11), mengemukakan adalah sebagai efektifitas organisasi secara menyeluruh untuk kebutuhan yang ditetapkan dari setiap kelompok yang berkenaan melalui usaha-usaha yang sistematis dan meningkatkan kemampuan organisasi secara terus-menerus untuk mencapai kebutuhan secara efektif (dalam Harbani Pasolong, 2010;176).

Maka berdasarkan pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa kinerja mempunyai elemen yaitu :

- 1) Hasil kerja dicapai secara individual atau institusi, yang berarti kinerja tersebut adalah hasil akhir yang diperoleh secara sendiri-sendiri atau kelompok.
- 2) Dalam melaksanakan tugas, orang atau lembaga diberikan kewenangan dan tanggung jawab, yang berarti orang atau lembaga di beri hak atau kekuasaan untuk ditindaklanjuti, sehingga pekerjaannya dapat dilakukan dengan baik.
- 3) Pekerjaan haruslah dilakukan secara tegas, yaitu berarti dalam melakukan tugas individu atau lembaga tertentu saja harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan.

- 4) Pekerjaan tidaklah bertentangan dengan moral atau etika, artinya selain mengikuti aturan yang telah ditetapkan, tentu saja pekerjaan tersebut haruslah sesuai moral dan etika yang berlaku umum.

Dalam buku Moehariono (2011;162-162), terdapat tiga konsep yang dapat digunakan mengukur kinerja organisasi publik yaitu :

1. Responsivitas (*Responsiveness*), yaitu menggambarkan kemampuan organisasi publik dalam menjalankan misi dan tujuan adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
2. Responsibilitas (*Responsibility*), yaitu pelaksanaan kegiatan organisasi publik dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan secara implisit maupun eksplisit.
3. Akuntabilitas (*accountability*), menunjuk kepada seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik yang diharapkan dari masyarakat, bisa berupa penilaian dari wakil rakyat, pejabat dan masyarakat.

Dapat disimpulkan bahwa indikator kinerja organisasi merupakan ukuran hasil kerja pegawai dalam mencapai tujuan organisasi melalui proses pencapaian prestasi kerja, target, tujuan, tolak ukur organisai, sasaran dan keterampilan dalam pelaksanaan aktivitas untuk mencapai tujuan organisasi. Kinerja individu dengan kinerja organisasi merupakan suatu unsur yang tidak dapat dipisahkan, hal ini kinerja individu bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang diberikan organisasi untuk mencapai tujuan organisasi tersebut, sedangkan kinerja organisasi merupakan tempat/wadah dimana terdapat sumber daya manusia melakukan

serangkaian pekerjaan, dan terdapat sumber lain seperti peralatan, teknologi, mekanisme kerja dalam organisasi, bahan, dana dan adanya struktur, pengetahuan, posisi strategis tujuan dan integritas. Adanya indikator kinerja merupakan suatu pengukuran terhadap kinerja pada organisasi atau instansi, serta melihat tingkat kinerja suatu program yang dijalankan oleh unit kerja karena tanpa pengukuran kinerja akan sulit untuk menilai hasil kerja dari suatu kegiatan/program.

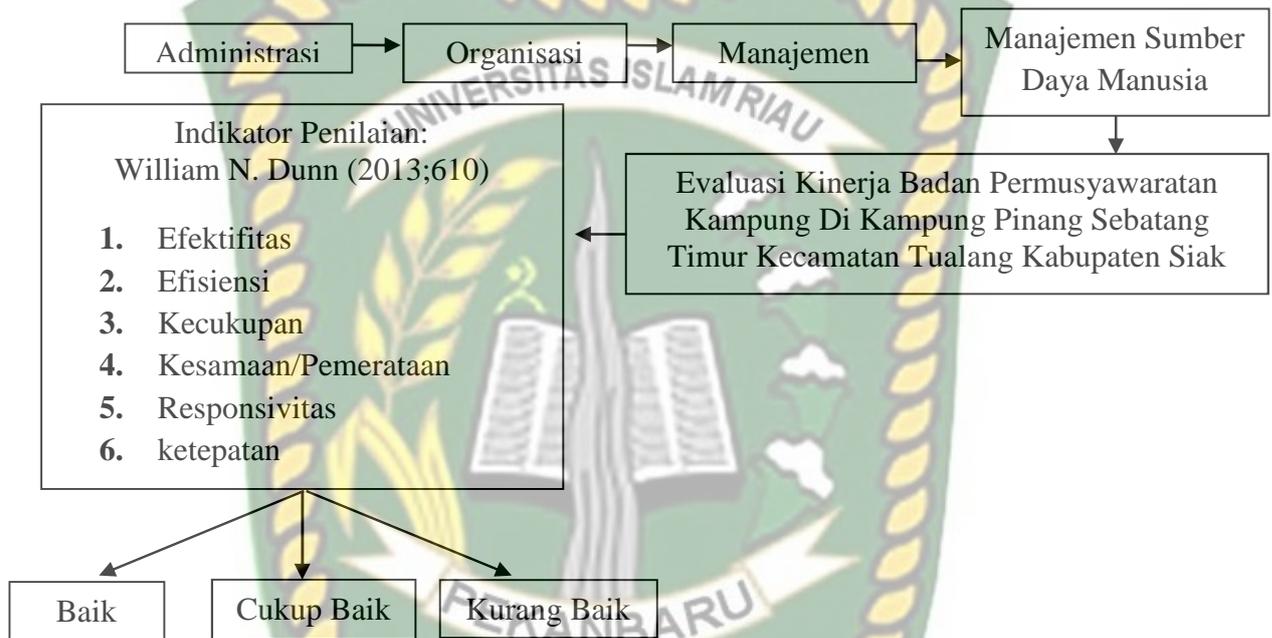
Jadi, evaluasi kinerja adalah suatu metode atau proses penilaian dan pelaksanaan tugas seseorang atau sekelompok orang atau unit-unit kerja dalam suatu organisasi sesuai dengan standar kinerja atau tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu.

B. Kerangka Pikir

Kerangka pikir adalah untuk membentuk, dan menjelaskan pemikiran dan konsep dalam menganalisa dan memecahkan masalah yang dihadapi sehubungan dengan penelitian ini, dengan memaparkan keterkaitan antara variabel penelitian dengan indikator-indikator tertentu, berdasarkan konsep maupun teori-teori yang dianggap relevan

Adapun kerangka pikir peneliti dalam penelitian ini dapat di lihat pada gambar di bawah ini:

Gambar II.1: Kerangka Pikir Evaluasi Kebijakan Badan Permusyawaratan Kampung Di Kampung Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.



Sumber: Olahan Penulis 2021

C. Hipotesis

Diduga pelaksanaan Tugas Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak belum berjalan dengan baik.

D. Konsep Operasional

Untuk memudahkan dalam menganalisa penelitian ini maka ada beberapa konsep yang akan dijelaskan sebagai acuan dalam penelitian, diantaranya adalah:

1. administrasi adalah Administrasi adalah segala kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan, dimulai dari proses pemikiran, proses pelaksanaan sampai proses tercapainya tujuan.
2. Organisasi adalah sebagai suatu kelompok individu yang diorganisasi untuk mencapai tujuan tertentu. Organisasi memiliki tujuan umum dan tujuan spesifik, untuk mencapai tujuan tersebut maka di buat norma aturan yang dipatuhi oleh semua anggota organisasi.
3. Manajemen adalah usaha yang dilakukan secara bersama-sama untuk menentukan dan mencapai tujuan-tujuan organisasi.
4. Manajemen sumber daya manusia adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat.
5. Badan Permusyawaratan Kampung disingkat BAPEKAM adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokrasi.
6. Evaluasi atau penilaian adalah suatu proses analisis data yang diperoleh melalui proses pengawasan untuk menentukan hasil faktual dari pelaksanaan pengawasan itu.
7. Kinerja organisasi tidak hanya dipengaruhi oleh sumber daya manusia di dalamnya, tetapi juga sumber daya lainnya seperti dana, bahan, peralatan, teknologi, dan mekanisme kinerja yang berlangsung dalam organisasi.
8. Efektifitas adalah suatu kondisi yang menunjukkan tingkat keberhasilan atau

pencapaian suatu tujuan yang diukur dengan kualitas, kuantitas, dan waktu, sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya.

9. Efisiensi adalah suatu ukuran keberhasilan sebuah kegiatan yang dinilai berdasarkan besarnya biaya/ sumber daya yang digunakan untuk mencapai hasil yang diinginkan.
10. Kecukupan adalah kecukupan masih berhubungan dengan efektivitas dengan mengukur atau memprediksi seberapa jauh alternatif yang ada dapat memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi.
11. perataan adalah kebijakan yang akibatnya atau usaha secara adil didistribusikan. Suatu program tertentu mungkin dapat efektif, efisien, dan mencukupi apabila biaya-manfaat merata. Kunci dari perataan yaitu keadilan atau kewajaran.
12. Responsivitas adalah kemampuan birokrasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, serta mengembangkan program-program pelayanan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
13. Ketetapan adalah Kriteria yang dipakai untuk menseleksi sejumlah alternatif untuk dijadikan rekomendasi dengan menilai apakah hasil dari alternatif yang direkomendasikan tersebut merupakan pilihan tujuan yang layak. Kriteria kelayakan dihubungkan dengan rasionalitas substantif, karena kriteria ini menyangkut substansi tujuan bukan cara atau instrumen untuk merealisasikan tujuan tersebut

E. Operasional Variabel

Tabel II.1: Konsep Operasional Variabel Evaluasi Kinerja Badan Permasyarakatan Kampung Di Kampung Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak

Konsep	Variabel	Indikator	Item Penilaian	Skala Ukuran
Evaluasi mempunyai arti yang berhubungan, masing masing menunjukkan pada aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan dan program secara umum istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (appraisal), pemberian angka (rating), dan penilai (assessment) William N. Dunn (2003;608)	Evaluasi Kinerja Badan Permasyarakatan Kampung Di Kampung Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak	1. Efektifitas	a. Menyelenggarakan musyawarah kampung b. menyalurkan aspirasi masyarakat kampung c. Menyusun rancangan peraturan kampung d. Kecepatan dalam menyelesaikan rencana peraturan Kampung	Baik Cukup Baik Kurang Baik
		2. Efisiensi	a. Pegawai yang memberikan pelayanan b. Kesesuaian anggaran pembangunan kampung c. Melakukan pengawasan kinerja kepada kepala kampung d. Konsistensi Pengawasan Kinerja kepada Kepala Kampung	Baik Cukup Baik Kurang Baik
		3. Kecukupan	a. Pembagian biaya yang di distribusikan merata b. Manfaat yang di terima oleh masyarakat c. Pembagian kerja yang merata di tiap pegawai Bapekam d. Penerimaan biaya yang diterima oleh Masyarakat	Baik Cukup Baik Kurang Baik

		4. Kesamaan/Pe merataan	a. Manfaat Kinerja BAPEKAM Bagi Masyarakat	Baik
			b. Manfaat Kinerja BAPEKAM bagi Pemerintah Kampung	Cukup Baik
			c. Hasil kinerja BAPEKAM sesuai dengan perencanaan kerja	Kurang Baik
			d. Hasil Kinerja BAPEKAM yang dirasakan Masyarakat oleh Masyarakat Kampung	
		5. Responsivitas	a. Melaksanakan tugas dan fungsi bapekam	Baik
			b. Tanggung jawab dalam memberikan pelayanan	Cukup Baik
c. Keadilan BAPEKAM dalam memberikan pelayanan.	Kurang Baik			
d. Semua keluhan Masyarakat di respon oleh BAPEKAM				
6. Ketepatan	a. target yang ingin dicapai BAPEKAM	Baik		
	b. pencapaian target BAPEKAM	Cukup Baik		
	c. Sejauh mana target yang telah tercapai	Kurang Baik		
	d. Ketepatan waktu dalam menyelesaikan target yang ditetapkan			

Sumber: Modifikasi Penulis 2021

F. Teknik Pengukuran

Dalam penelitian ini untuk pengukuran dari masing-masing indikator dalam evaluasi Kinerja Badan Permusyawaratan Kampung Di Kampung Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, di klasifikasikan dalam tiga kategori yaitu terlaksana, cukup terlaksana, dan kurang terlaksana.

Sedangkan untuk pengukurannya menggunakan teknik pengukuran *Skala Linkert*, yaitu menurut Sugiyono (2016;168) adalah skala pengukuran yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi sekelompok orang tentang fenomena-fenomena sosial yang terjadi di lokasi penelitian. Skala Linkert yaitu dengan memberikan nilai skor pada setiap kategori yang menjadi alternatif yaitu Baik 3, Cukup Baik 2, Kurang Baik 1.

Ukuran Variabel

$$\text{Interval} = \frac{\text{Total Skor Nilai Tertinggi} - \text{Total Skor Terendah} - 1}{\text{jumlah kategori}}$$

Dimana :

$$\text{Total Skor Tertinggi} = \text{Nilai Kategori Tertinggi (3)} \times \text{Jumlah Pertanyaan (3)} \\ \times \text{Jumlah Responden (59)} = 531$$

$$\text{Total Skor Terendah} = \text{Nilai Kategori Terendah (1)} \times \text{Jumlah Pertanyaan (3)} \\ \times \text{Jumlah Responden (59)} = 177$$

Berdasarkan rumus diatas, maka diperoleh pengkategorian interval sebagai berikut :

1. Responden Pengukuran tiap indikator untuk pihak internal staff

BAPEKAM:

$$\text{Total skor tertinggi} : 3 \times 3 \times 7 = 63 \quad \text{Interval} = \frac{63 - 21 - 1}{4} = 10$$

$$\text{Total skor terendah} : 1 \times 3 \times 7 = 21$$

1. Efektifitas

Baik : Apabila hasil penelitian terhadap indikator efektifitas telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan atau jawaban responden berada pada interval 53-63

Cukup Baik : Apabila hasil penelitian terhadap indicator efektifitas telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan atau jawaban responden berada pada interval 43-53

Kurang Baik : Apabila hasil penelitian terhadap indikator efektifitas telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan atau jawaban responden berada pada rata-rata 33 – 43

2. Efisiensi

Baik : Apabila hasil penelitian terhadap indikator efektifitas telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan atau jawaban responden berada pada interval 53-63

Cukup Baik : Apabila hasil penelitian terhadap indicator efektifitas telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan atau jawaban responden berada pada interval 43-53

Kurang Baik : Apabila hasil penelitian terhadap indikator efektifitas telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan atau jawaban responden berada pada rata-rata 33 – 43

3. Kecukupan

Baik : Apabila hasil penelitian terhadap indikator efektifitas telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan atau jawaban responden berada pada interval 53-63

Cukup Baik : Apabila hasil penelitian terhadap indicator efektifitas telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan atau jawaban responden berada pada interval 43-53

Kurang Baik : Apabila hasil penelitian terhadap indikator efektifitas telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan atau jawaban responden berada pada rata-rata 33 – 43

4. Kesamaan/Pemerataan

Baik : Apabila hasil penelitian terhadap indikator efektifitas telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan atau jawaban responden berada pada interval 53-63

Cukup Baik : Apabila hasil penelitian terhadap indicator efektifitas telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan atau jawaban responden berada pada interval 43-53

Kurang Baik : Apabila hasil penelitian terhadap indikator efektifitas telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan atau jawaban responden berada pada rata-rata 33 – 43

5. Responsivitas

Baik : Apabila hasil penelitian terhadap indikator efektifitas telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan atau jawaban responden berada pada interval 53-63

Cukup Baik : Apabila hasil penelitian terhadap indicator efektifitas telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan atau jawaban responden berada pada interval 43-53

Kurang Baik : Apabila hasil penelitian terhadap indikator efektifitas telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan atau jawaban responden berada pada rata-rata 33 – 43

6. Ketetapan

Baik : Apabila hasil penelitian terhadap indikator efektifitas telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan atau jawaban responden berada pada interval 53-63

Cukup Baik : Apabila hasil penelitian terhadap indicator efektifitas telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan atau jawaban responden berada pada interval 43-53

Kurang Baik : Apabila hasil penelitian terhadap indikator efektifitas telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan atau jawaban responden berada pada rata-rata 33 – 43

Pengukuran tiap indikator untuk pihak eksternal di tetapkan sebagai berikut :

$$\text{Total skor tertinggi} : 3 \times 3 \times 52 = 468 \quad \text{Interval} = \frac{468 - 156 - 1}{4} = 78$$

$$\text{Total skor terendah} : 1 \times 3 \times 52 = 156$$

1. Efektifitas

Baik : Apabila hasil penelitian terhadap indikator efektifitas telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan atau jawaban responden berada pada interval 390-468

Cukup Baik : Apabila hasil penelitian terhadap indicator efektifitas telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan atau jawaban responden berada pada interval 312-390

Kurang Baik : Apabila hasil penelitian terhadap indikator efektifitas telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan atau jawaban responden berada pada rata-rata 234 – 312

2. Efesiensi

Baik : Apabila hasil penelitian terhadap indikator efektifitas telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan atau jawaban responden berada pada interval 390-468

Cukup Baik : Apabila hasil penelitian terhadap indikator efektivitas telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan atau jawaban responden berada pada interval 312-390

Kurang Baik : Apabila hasil penelitian terhadap indikator efektivitas telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan atau jawaban responden berada pada rata-rata 234 – 312

3. Kecukupan

Baik : Apabila hasil penelitian terhadap indikator efektifitas telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan atau jawaban responden berada pada interval 390-468

Cukup Baik : Apabila hasil penelitian terhadap indicator efektivitas telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan atau jawaban responden berada pada interval 312-390

Kurang Baik : Apabila hasil penelitian terhadap indikator efektivitas telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan atau jawaban responden berada pada rata-rata 234 – 312

4. Kesamaan/Pemerataan

Baik : Apabila hasil penelitian terhadap indikator efektifitas telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan atau jawaban responden berada pada interval 390-468

Cukup Baik : Apabila hasil penelitian terhadap indikator efektivitas telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan atau jawaban responden berada pada interval 312-390

Kurang Baik : Apabila hasil penelitian terhadap indikator efektivitas telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan atau jawaban responden berada pada rata-rata 234 – 312

5. Responsivitas

Baik : Apabila hasil penelitian terhadap indikator efektifitas telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan atau jawaban responden berada pada interval 390-468

Cukup Baik : Apabila hasil penelitian terhadap indikator efektivitas telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan atau jawaban responden berada pada interval 312-390

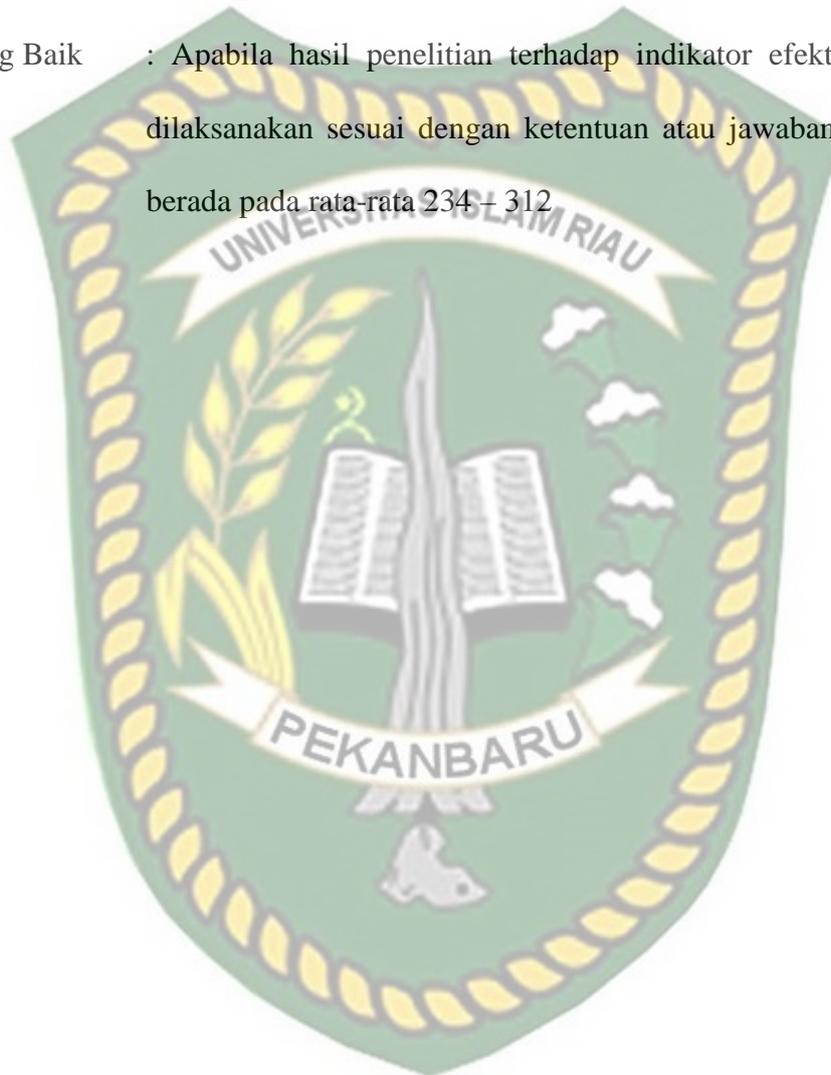
Kurang Baik : Apabila hasil penelitian terhadap indikator efektivitas telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan atau jawaban responden berada pada rata-rata 234 – 312

6. Ketetapan

Baik : Apabila hasil penelitian terhadap indikator efektifitas telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan atau jawaban responden berada pada interval 390-468

Cukup Baik : Apabila hasil penelitian terhadap indikator efektivitas telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan atau jawaban responden berada pada interval 312-390

Kurang Baik : Apabila hasil penelitian terhadap indikator efektivitas telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan atau jawaban responden berada pada rata-rata 234 – 312



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah survey deskriptif, yakni menggambarkan keadaan sebenarnya tentang apa yang terdapat pada saat penelitian dengan cara mengumpulkan data mengklarifikasikan dan menganalisisnya sehingga diperoleh perumusan analisa terhadap masalah yang dihadapi. Sehingga data yang diperoleh melalui teknik pengumpulan data dijadikan sebagai acuan dasar untuk menganalisis masing-masing indikator variabel yang diteliti, dengan metode penelitian kuantitatif.

Kemudian metode penelitian ini adalah metode kuantitatif. Karena metode penelitian kuantitatif menurut Sugiyono (2012;8) dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berdasarkan filsafat positivisme, dan digunakan untuk meneliti populasi dan sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kampung Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak. Alasan melakukan penelitian di Kampung Pinang Sebatang Timur karena Kinerja Badan Permusyawaratan Kampung dalam

melakukan tugas kepada masyarakat tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Menurut Sugiono (2003;90) populasi adalah wilayah generasi yang sendiri atas objek/subjek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulan.

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Kepala Badan Permusyawaratan Kampung, Wakil Badan Permusyawaratan Kampung, Sekretaris Badan Permusyawaratan Kampung, 2 Kepala Bidang, 4 Anggota Bapekam, Dusun, RK, RT, Ketua Karang Taruna, Ketua Lembaga Permasyarakatan, Tokoh Agama, Masyarakat.

2. Sampel

Menurut Sugiono (2003;91) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.

Untuk mendapatkan data informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik sensus yaitu teknik penentuan sampel dengan mempertimbangkan hal-hal tertentu, misalnya keterbatasan dana, tenaga, dan waktu.

Tabel III.1 : Tabel Populasi Dan Sampel yang Terdiri Dari, Ketua Badan Permusyawaratan Kampung, Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Kampung, Sekretaris Badan Permusyawaratan Kampung, dan Anggota Badan Permusyawaratan Kampung di Kampung Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang pada Penelitian Tentang Evaluasi Kinerja Badan Permusyawaratan Kampung Di Kampung Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.

No	Keterangan	Populasi	Sampel	Persentase
1	Ketua BAPEKAM	1	1	100%
2	Wakil Ketua BAPEKAM	1	1	100%
3	Sekretaris BAPEKAM	1	1	100%
4	Kepala Bidang BAPEKAM	2	2	100%
5	Anggota Bapekam	4	4	100%
	Jumlah	9	9	100%

Sumber : Modifikasi Penulis 2021

Tabel III.2 : Tabel Populasi dan Sampel yang Terdiri dari, Kepala Dusun, RK, RT, Ketua LPM, Tokoh Agama, dan Masyarakat di Kampung Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang pada Penelitian Tentang Evaluasi Kinerja Badan Permusyawaratan Kampung Di Kampung Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Kecamatan Tualang.

No	Keterangan	Populasi	Sampel	Persentase
1.	Kepala Dusun	3	3	100%
2.	RK	6	3	50%
3.	RT	24	12	50%

No	Keterangan	Populasi	Sampel	Persentase
4.	Ketua LPM	1	1	100%
5.	Tokoh Agama	6	3	50%
6.	Masyarakat	9038	30	3%
	Jumlah	9078	52	6%

Sumber : Modifikasi Penulis 2021

D. Teknik Pengumpulan data

Adapun yang menjadi Populasi dalam penelitian adalah seluruh institusi Badan Permusyawaratan Kampung di Kampung Pinang Sebatang Timur dalam penelitian ini penulis menarik sampel menggunakan teknik sampling jenuh secara sensus, karena jumlah populasi Badan Permusyawaratan Kampung Di Kampung Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak relatif sedikit dan mudahnya seluruh responden untuk di jumpai karena berada di tempat kerja yang sama sehingga memungkinkan untuk di sensus satu persatu dan mengambil informasi sumber data yang ada di Kampung Pinang Sebatang Timur 2020. Sugiono (2011:126) Sampling Jenuh adalah teknik bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel.

E. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang di peroleh secara langsung dari lapangan dengan sumber data adalah responden yang dijadikan sampel, serta pihak-pihak yang memahami dan relevan yang meliputi data dari beragam variabel terikat.

b. Data Sekunder

Merupakan sumber data dan informasi dan keterangan dari instansi yang berhubungan dengan penelitian ini. Data pelengkap yang di peroleh secara tidak langsung dari berbagai sumber yang tersedia dilokasi penelitian dan sudah dipublikasikan . data ini berupa arsip literatur yang berhubungan langsung dengan penelitian ini seperti susunan organisasi, data kepegawaian, tugas pokok dan fungsi Kepala Badan Permusyawaratan Kampung Di Kampung Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.

F. Teknik Penarikan Sampel

Untuk memperoleh data-data dan informasi lengkap yang dibutuhkan peneliti sebagai rujukan dalam penelitian ini, maka digunakan teknik pengumpulan data yang meliputi keterkaitan data secara langsung ataupun tidak langsung terhadap fokus penelitian.

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada peneliti ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Yaitu teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung , melakukan dialog atau percakapan kepada responden berdasarkan tujuan penyelidikan untuk memperoleh data secara langsung dari responden terkait dengan penelitian ini.

2. Observasi

Yaitu data yang diperoleh langsung oleh peneliti melalui hasil pengamatan penelitian dalam melakukan pengamatan secara langsung dilapangan untuk mendapatkan data yang erat hubungannya dengan penelitian ini.

3. Kuesioner,

biasanya berisikan tentang pertanyaan terstruktur dan jawaban yang cenderung kurang begitu mendalam. Kuesioner tersebut dimaksudkan sebagai suatu daftar pertanyaan untuk memperoleh data berupa jawaban-jawaban dari responden, yaitu orang yang memberi jawaban.

4. Dokumentasi

Yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menghimpun data yang berbentuk dokumen yang berisikan data penting, baik itu berbentuk teoritis ataupun data konkrit yang terdapat dilapangan dapat digunakan dan sangat diperlukan guna memperkuat hasil penelitian yang dilakukan.

G. Teknik Analisis Data Dan Uji Hipotesis

Dalam menganalisis data yang dikumpulkan peneliti menggunakan tipe penelitian Deskriptif dengan menggunakan metode Kuantitatif yaitu metode penelitian yang berlandaskan filsafat positivisme, dan digunakan untuk meneliti populasi dan sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument peneliti, analisis data bersifat kuantitatif / statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

Dalam Sugiono, (2009:15), bahwa peneliti menggunakan metode kuantitatif dalam menganalisis data meliputi deskriptif Kuantitatif, Kuesioner, Observasi, pedoman wawancara, Dokumentasi pribadi.



H. Jadwal Kegiatan Penelitian

**Tabel III.3: Jadwal Kegiatan Penelitian Tentang Pelaksanaan Tugas Badan
Permusyawaratan Kampung Di Desa Pinang Sebatang Timur
Kecamatan Tualang Kabupaten Siak**

NO	Jenis Kegiatan	Bulan dan Minggu Tahun 2020-2021																			
		Juli – Agustus-2020				September- Oktober- November 2020				Desember- Januari- Februari- 2021				Maret- April 2021				Mei-Juli2021			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan UP	X	X	X	X																
2	Seminar UP						X														
3	Revisi UP							X													
4	Revisi Kuisisioner												X								
5	Rekomendasi Survey												X								
6	Lapangan Survey												X								
7	Analisis Data													X							
8	Penyusunan dan Hasil Laporan														X						
9	Konsultasi Revisi Skripsi														X	X	X				
10	Ujian Konfrehensif Skripsi																	X			
11	Revisi Skripsi																		X		
12	Pengandaan Skripsi																			X	X

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat

1. Keadaan Kelurahan Perawang

Terbentuknya Kampung pinang sebatang timur sebagai sebuah institusi yang berperan dalam menjalankan roda pemerintahan dan pemberdayaan serta pembangunan masyarakat merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah otonomi Kabupaten Siak, yang bermanfaat untuk mempermudah masyarakat dalam hal pelaksanaan pengurusan Administrasi serta lebih mempererat hubungan antara pemerintah dengan masyarakat didalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kampung Pinang Sebatang Timur dulunya adalah Kampung Pinang Sebatang (induk), namun karena terjadi pemekaran pada tahun 2002 maka Kampung Pinang Sebatang dibagi menjadi 3, yakni Kampung Pinang Sebatang, Kampung Pinang Sebatang Timur dan Kampung Pinang Sebatang Barat.

Adapun dasar pembentukan Kampung Pinang Sebatang Timur ini adalah Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 38 Tahun 2002 tentang pembentukan Kampung Tualang, Kampung Pinang Sebatang, Kampung Maredan, Kampung Kuala Gasib, Kampung Teluk Timba, Kampung Buatan 1, Kampung Buatan 11, Kampung Pangkalan Pisang, Kampung Sengkemang, Kampung Rantau Panjang, Kampung Empang Pandan, Kampung Keranji Guguh, Kampung Pinang Sebatang Timur,

Kampung Pinang Sebatang Barat, Kampung Maredan Barat, Kampung Perawang Barat.

2. Profil Kelurahan Perawang

1. Nama Kampung : Pinang Sebatang Timur
2. Tahun Pembentukan : 20 September 2002 .
3. Dasar Hukum Pembentukan : Peraturan Daerah Kabupaten Siak No. 38 Tahun 2002'
4. Nomor Kode Wilayah : 1408042005.
5. Nomor Kode Pos : 28772 .
6. Kecamatan : Tualang
7. Kabupaten : Siak
8. Provinsi : Riau
9. Negara : Indonesia

Kampung Pinang Sebatang Timur merupakan salah satu kampung yang ada di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak. Dengan tugas menjalankan roda pemerintahan tingkat Kampung dan pemberdayaan serta pembangunan masyarakat yang merupakan perpanjangan tangan dari Pemerintah Kecamatan Tualang serta Pemerintah Kabupaten Siak. Keberadaan Kampung Pinang Sebatang Timur saat ini dipimpin oleh seorang Penghulu yang bernama Heri Suparjan,SE yang baru dilantik sebagai Kampung Pinang Sebatang Timur pada tanggal 6 April 2017. Penghulu Kampung Pinang Sebatang Timur dibantu oleh beberapa aparat Kampung yang terdiri dari

Kerani Kampung, 3 Kepala urusan, 3 juru tulis, 1staff juru tulis, 3 Kadus, 6 RK dan 24 RT

Adapun daerah yang menjadi batas-batas wilayah dari Kampung Pinang Sebatang Timur itu sendiri adalah sebagai berikut :

Tabel IV.1: Batas - Batas Wilayah Kampung Pinang Sebatang Timur

NO	ARAH	BATAS WILAYAH		
		DESA/KELURAHAN	KEC.	KAB/KOTA
1	Timur	Pinang Sebatang	Tualang	Siak
2	Selatan	Pinang Sebatang	Tualang	Siak dan Pekanbaru
3	Barat	Pinang Sebatang Barat	Tualang	Siak
4	Utara	Gasip	Koto Gasib	Siak

Adapun penjelasan dari tabel diatas yakni:

- a. Batas Sebelah Timur : Kampung Pinang Sebatang (Kecamatan Tualang)
- b. Batas Sebelah Barat : Kampung Pinang Sebatang Barat (Kecamatan Tualang)
- c. Batas Sebelah Utara : Berbatasan dengan Gasip Kecamatan Koto Gasip
- d. Batas Sebelah Selatan : Kampung Pinang Sebatang (Kecamatan Tualang) dengan pusat Pemerintahan, tersaji dalam table dibawah ini.

Adapun jarak dari Kampung Pinang Sebatang Timur ke kantor camat Tualang sebagai pusat kecamatan di kecamatan Tualang yakni sejauh 15 Km. lalu jarak antara kelurahan Perawang dengan kota Siak Sri Indrapura sebagai ibukota kabupaten Siak yakni sejauh 78 Km. Dan sejauh 60 Km pula jarak antara Kampung Pinang Sebatang Timur dengan kota Pekanbaru sebagai ibukota propinsi Riau.

Tabel IV.2: Jarak dari Kelurahan ke Pusat Pemerintahan

No	TUJUAN	JAUH JARAK
1	Ke Pemerintahan Kecamatan	15 Km
2	Ke Pemerintahan Kabupaten	78 Km
3	Ke Pemerintah Provinsi	60 Km

Adapun jarak dari Kampung Pinang Sebatang Timur ke kantor camat Tualang sebagai pusat kecamatan di kecamatan Tualang yakni sejauh 15 Km. lalu jarak antara Kampung Pinang Sebatang Timur dengan kota Siak Sri Indrapura sebagai ibukota kabupaten Siak yakni sejauh 78 Km. Dan sejauh 60 Km pula jarak antara Kampung Pinang Sebatang Timur dengan kota Pekanbaru sebagai ibukota propinsi Riau.

3. Struktur Kepengurusan Di Kampung Pinang Sebatang Timur

1. Struktur Organisasi Pemerintahan Di Kampung Pinang Sebatang Timur

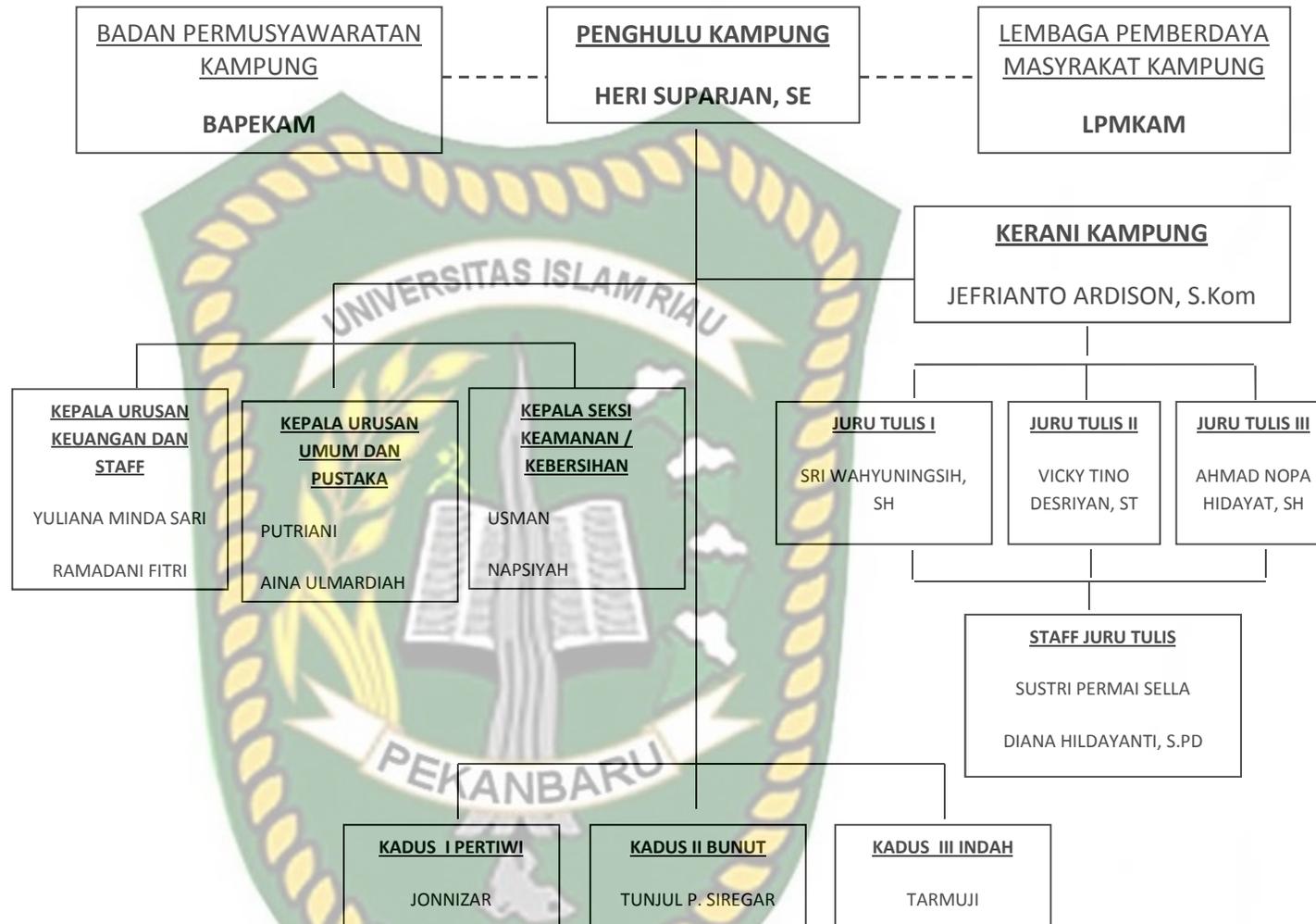
Adapun Kampung Pinang Sebatang Timur pada saat sekarang ini (2017) dipimpin oleh seorang Penghulu yang bernama Heri Suparjan S.E yang baru dilantik sebagai Penghulu Kampung Pinang Sebatang Timur pada bulan April tahun 2017 yang lalu, yang dibantu oleh seorang Kerani, 3 orang kepala urusan, dan beberapa orang staf yang membantu pekerjaan penghulu di kantor.

Adapun keterangan dari struktur Organisasi diatas yakni : 1. Penghulu Kampung : Heri Suparjan S.E 2. Kerani Kampung: Jefrianto Ardison,S.Kom, 3. Juru tulis 1: Sri Wahyunisih,S.h 4. Juru Tulis II: Vicky tino, 5.Juru Tulis: Juru Tulis III: Ahmad Nopa, 6. Kepala Urusan Keuangan Dan Staff: Yulia Minda Sari, 7. Kepala Urusan umum dan Pustaka: Putriani, 8. Kepala Seksi Keamanan/Kebersiahan: usman, 9.Staff Juru Tulis: Sustri Permai Sella, 10.Kadus 1 Pertiwi: Jonnizar, 11. Kadus II Bunut: Tunjul P.Siregar 12. Kadus III Indah: Tarmuji.

Gambar IV.1 : Struktur Organisasi Pemerintahan Kampung Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.

STRUKTUR PEMERINTAHAN KAMPUNG PINANG SEBATANG TIMUR

KECAMATAN TUALANG KABUPATEN SIAK



4. Gambaran Umum Badan Permusyawaratan Kampung (BAPEKAM) Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.

Badan Permusyawaratan Kampung atau yang disebut juga dengan nama lain, selanjutnya disingkat BAPEKAM adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kampung

Kedudukan:

1. Bapekam berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kampung.
2. Bapekam merupakan wahana untuk melaksanakan Demokrasi Pancasila

Bapekam memiliki fungsi:

1. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Kampung bersama Kepala Kampung.
2. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Kampung; dan
3. melakukan pengawasan kinerja Kepala Kampung.

Tugas Bapekam:

1. Bapekam melakukan penggalian aspirasi masyarakat Langsung kepada kelembagaan kampung dan masyarakat kampung termasuk kelompok masyarakat miskin, masyarakat berkebutuhan khusus, perempuan, kelompok marjinal. Penggalian aspirasi dilaksanakan berdasarkan keputusan musyawarah Bapekam yang dituangkan dalam agenda kerja Bapekam
2. Bapekam menampung aspirasi masyarakat di kampung Aspirasi masyarakat diadministrasikan dan disampaikan dalam musyawarah Bapekam

3. Bapekam mengelola aspirasi masyarakat kampung melalui pengadministrasian dan perumusan aspirasi berdasarkan pembedangan yang meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat kampung.
4. Bapekam menyalurkan aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan dan atau tulisan. Penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan seperti penyampaian aspirasi masyarakat oleh Bapekam dalam musyawarah Bapekam yang dihadiri Kepala kampung.
5. Bapekam melaksanakan Musyawarah Bapekam Dalam rangka menghasilkan keputusan BAPEKAM terhadap hal-hal yang bersifat strategis seperti musyawarah pembahasan dan penyepakatan rancangan Peraturan kampung, evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, menetapkan peraturan tata tertib Bapekam, dan usulan pemberhentian anggota BAPEKAM.

Wewenang Bapekam:

1. membahas rancangan Peraturan KAMPUNG bersama Penghulu;
2. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan Kampung dan peraturan penghulu;
3. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian penghulu;
4. membentuk panitia pemilihan penghulu;

5. menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
6. menyusun tata tertib Bapekam;
7. mengadakan perubahan peraturan Kampung bersama Penghulu;
8. menetapkan calon Penghulu terpilih;
9. menyelenggarakan musyawarah Bapekam;
10. menyelenggarakan musyawarah Kampung;
11. menyelenggarakan musyawarah Kampung khusus untuk pemilihan Penghulu antar waktu;
12. melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Penghulu;
13. melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Kampung; dan
14. menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Kampung dan Lembaga Kampung lainnya.

Bapekam mempunyai hak:

1. mengawasi dan Meminta keterangan tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung Kepada Pemerintah Kampung;
2. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan Kampung, pelaksanaan pembangunan Kampung, pembinaan kemasyarakatan Kampung, dan pemberdayaan masyarakat Kampung;

3. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung;
4. memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis, dan kunjungan lapangan seperti studi banding yang dilakukan di dalam negeri;
5. penghargaan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten bagi pimpinan dan anggota Bapekam yang berprestasi.

Anggota Bapekam Mempunyai Hak:

1. Mengajukan usul rancangan Peraturan Kampung
2. Mengajukan Pertanyaan
3. Menyampaikan usul dan pendapat
4. Memilih dan dipilih
5. Mendapat tunjangan dari anggaran pendapatan dan belanja kampung

Anggota Bapekam wajib:

1. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan undang-undang dasar negara kesatuan republik indonesia dan bhineka tunggal ika.
2. Melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kampung.
3. Menyerap, menampung, dan menindak lanjuti aspirasi Masyarakat Kampung.
4. Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok dan gelombang
5. Memproses pemilihan umum.

6. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan kampung
7. Menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat
8. Membina ketentraman dan ketertiban Masyarakat.
9. Menjaga nama baik institusi Bapekam dan
10. Mematuhi dan melaksanakan sumpah janji pelantikan
11. Bapekam berkewajiban melaporkan hasil kinerja kepada Bupati melalui Camat secara tertulis paling sedikit 1 kali dalam setahun
12. Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hasil kinerja Bapekam dan bantuan keuangan yang diberikan pemerintah daerah



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

C. Struktur Organisasi

Gambar IV.2: Struktur Organisasi Badan Permusyawaratan Kampung Di Kampung Pinang Sebatang Timur kecamatan Tualang Kabupaten Siak.

Struktur Organisasi BAPEKAM di Kampung Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.



Sumber : Modifikasi Penulis 2021

Berdasarkan gambar IV.2 Badan Permusyawaratan Kampung (Bapekam) di Kampung Pinang Sebatang Timur terdiri dari 9 anggota termasuk Ketua Bapekam, Wakil Ketua Bapekam dan Sekretaris. Hal ini sesuai dalam Peraturan Daerah Kabupaten Siak No. 5 Tahun 2015 pada Pasal (9) ayat (1) jumlah anggota Badan

Permusyawaratan Kampung ditetapkan, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang, dengan memperhatikan Wilayah, perempuan, penduduk, dan kemampuan keuangan Kampung.

5. Penduduk Kampung Pinang Sebatang Timur

1. Berdasarkan Umur

Tabel IV.3: Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur di Pinang Sebatang Timur

No	UMUR/USIA	JUMLAH
1	0 – 12 Bulan	450 Orang
2	1 - 5 Tahun	710 Orang
3	5 - 7 Tahun	820 Orang
4	7 - 15 Tahun	1321 Orang
5	15 - 56 Tahun	5768 Orang
6	> 56 Tahun	421 Orang
	Jumlah	9490 Orang

Adapun penduduk di wilayah Kampung Pinang Sebatang timur berdasarkan sensus terakhir pada tahun 2020, dari berbagai tingkatan umur yakni sebanyak 9490

orang yang berusia dibawah 1 tahun, lalu usia 1 sampai dengan 5 tahun sebanyak 710 orang. Kemudian anak-anak yang berusia 5 sampai dengan 7 tahun yakni sebanyak 820 orang. Dilanjutkan dengan anak-anak usia 7 sampai dengan 15 tahun sebanyak 1321 orang. Kemudian yang paling banyak penduduknya klasifikasi umur antara 15 sampai dengan 56 tahun yakni sebanyak 5768 orang dan yang terkakhir yang tergolong kedalam usia lanjut (lansia) hanya sebanyak 421 orang.

6. Berdasarkan Gender atau Jenis Kelamin

Tabel IV.4: Jumlah Penduduk Berdasarkan Gender / Jenis Kelamin, KK di Pinang Sebatang Timur

No	KATEGORI PENDUDUK	JUMLAH
1	Jumlah Penduduk Laki-Laki	710 Orang
2	Jumlah Penduduk Perempuan	4245 Orang
3	Jumlah Kepala Keluarga (KK)	4712 KK
Jumlah Total Penduduk Pinang Sebatang Timur		9490 Orang

Jumlah penduduk di Kampung Pinang Sebatang Timur adalah 43.378 orang/jiwa yang terdiri dari 9490 keluarga. Data tersebut berdasarkan data sensus terakhir tahun 2010. Yang mana terdiri dari 710 orang penduduk laki-laki dan sisanya 4245 orang perempuan. Serta terdiri dari 4712 KK (Kepala Keluarga)

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Responden

Pada bab V ini, Penulis akan menjelaskan atau menggambarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan, mengenai Evaluasi Kinerja Badan Permusyawaratan Kampung Di Kampung Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, sebelum menjelaskan hasil hasil penelitian, Penulis terlebih dahulu menjelaskan identitas responden yang penulis anggap merupakan hal yang penting dalam penelitian. Adapun identitas Responden sebagai berikut:

1. Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Umur

Umur ialah salah satu nya faktor yang cukup menentukan semangat kerja seseorang dalam melaksanakan pekerjaannya, selain itu, umur juga dapat berpengaruh pada produktifitas kerjanya, kemudian pada tabel berikut ini penulis akan memaparkan identitas responden berdasarkan umur. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel dibawah ini:

Tabel V.1 : Identitas Responden Tentang Evaluasi Kinerja Badan Permusyawaratan Kampung Di Kampung Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak

No	Umur Responden	Jumlah	Presentase
1	2	3	4
1	<20 tahun	-	-

No	Umur Responden	Jumlah	Presentase
2	21-30 Tahun	20	32%
3	31-40 Tahun	25	41%
4	41-50 Tahun	10	17%
5	>50 Tahun	6	10%
Jumlah		61 Orang	100%

Sumber : Data Olahan Peneliti, Tahun 2021

Berdasarkan Tabel di atas, dapat di ketahui bahwa dari 50 orang responden, maka di dapatkan bahwa : 20 orang (32%) yaitu responden berumur 21-30 tahun, 25 orang (41%) yaitu responden dengan umur 31- 40 tahun, 10 orang (17%) yaitu responden dengan umur 41-50 tahun, 6 orang (10%) yaitu responden dengan umur >50. Maka dapat disimpulkan bahwa identitas responden berdasarkan umur lebih didominasi oleh responden yang berumur 31-40 tahun.

2. Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Identitas responden berdasarkan jenis kelamin sangat penting dilakukan, jenis kelamin juga mempengaruhi emosional responden dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel V.2 : Identitas Responden Tentang Evaluasi Kinerja Badan Permusyawaratan Kampung Di Kampung Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Presentase
1	Laki-Laki	41	67%
2	Perempuan	20	33%
	Jumlah	61 Orang	100%

Sumber : Data Olahan Peneliti, Tahun 2021

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui ialah jumlah responden berdasarkan jenis kelamin, yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu 41 orang (67%) untuk laki-laki dan 20 orang (33%) untuk perempuan.

3. Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Kemudian dalam identitas responden yang berdasarkan pada penelitian ini mengenai tentang identitas tingkat pendidikan terakhir, maka tabel mengenai informasi pengelompokan pendidikan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel V.3 : Identitas Responden Tentang Evaluasi Kinerja Badan Permusyawaratan Kampung Di Kampung Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Presentase
1	SD	10	16%

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Presentase
2	SLTP	14	23%
3	SLTA/SMA/SMK	30	49%
4	Diploma I/II/III	5	8%
5	Strata 1(S1)	2	4%
6	Strata 2 (S2)	-	-
	Jumlah	61 Orang	100%

Sumber : *Data Olahan Peneliti, Tahun 2021*

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat di lihat bahwa responden dengan tingkat pendidikan SD ialah sebanyak 10 orang (16%), Responden pada tingkat SLTP ialah sebanyak 14 sebanyak (23%), Responden pada tingkat SLTA/SMA/SMK ialah sebanyak 30 orang (49%), Responden dengan tingkat pendidikan Diploma I/II/III ialah sebanyak 5 orang (8%), Responden dengan tingkat pendidikan Strata 1 (S1) ialah sebanyak 2 orang (4%), Responden dengan tingkat pendidikan Strata 2 (S2).

B. Hasil Penelitian Evaluasi Kinerja Badan Permusyawaratan Kampung Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak

1. Efektifitas

Efektifitas adalah suatu kondisi yang menunjukkan tingkat keberhasilan atau pencapaian suatu tujuan yang diukur dengan kualitas, kuantitas, dan waktu, sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya.

Berikut ini akan dijelaskan mengenai jawaban responden Tentang Evaluasi Kinerja Badan Permusyawaratan Kampung Di Kampung Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

Tabel V.4 : Distribusi Tanggapan Responden Staf BAPEKAM Tentang Evaluasi Kinerja Badan Permusyawaratan Kampung Di Kampung Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Untuk Indikator Efektifitas.

No	Item Penilaian	Kategori Penilaian			Total
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	2	3	4	5	6
1	Menyelenggarakan musyawarah kampung	4	3	0	7
2	menyalurkan aspirasi masyarakat kampung	4	2	1	7
3	Menyusun rancangan peraturan kampung	3	1	3	7
4	Kecepatan dalam menyelesaikan rencana peraturan Kampung	2	2	3	7
Jumlah		13	8	7	28
Skor		37	16	7	57
Kategori		BAIK			

Sumber: Data Olahan Peneliti, Tahun 2021

hasilnya dihitung yaitu:

Total skor tertinggi : $3 \times 3 \times 7 = 63$

$$\text{Interval} = \frac{63-21-1}{4} = 10$$

Total skor terendah : $1 \times 3 \times 7 = 21$

Sehingga dapat disimpulkan yaitu hasil hitungan pada kategori Baik dengan nilai 57 atau berada pada rentang 53-63.

Berdasarkan tabel V.4 di atas, maka dapat dilihat jawaban responden dari Staf BAPEKAM, yang indikatornya membahas tentang “Efektifitas” yang dilakukan terhadap 7 responden. Pada poin pertama yaitu *Menyelenggarakan musyawarah kampung*, memiliki 4 orang responden menjawab Baik, kemudian 3 orang responden menjawab Cukup Baik, dan 0 responden yang menjawab Kurang Baik. Kemudian untuk item selanjutnya yaitu mengenai *menyalurkan aspirasi masyarakat kampung*, sebanyak 4 orang responden menjawab Baik, kemudian 2 orang responden menjawab Cukup Baik, dan 1 orang responden yang menjawab Kurang Baik. Untuk item selanjutnya yaitu *Menyusun rancangan peraturan kampung*, sebanyak 3 orang responden yang menjawab Baik, dan 1 orang responden menjawab Cukup Baik, dan 3 responden menjawab Kurang Baik. Untuk item selanjutnya yaitu *Kecepatan dalam menyelesaikan rencana peraturan Kampung*, sebanyak 2 orang responden yang menjawab Baik, dan 2 orang responden menjawab Cukup Baik, dan 3 responden menjawab Kurang Baik.

Dari hasil yang telah penulis jabarkan di atas, selanjutnya dapat di simpulkan mengenai jawaban responden Staf BAPEKAM tentang Evaluasi Kinerja Badan Permusyawaratan Kampung Di Kampung Pinang Sebatang Timur Kecamatan

Tualang Kabupaten Siak, untuk indikator Efektifitas berada pada rentang skor 57 berada pada kategori “Baik”.

Tabel V.5 : Distribusi Tanggapan Responden untuk pihak eksternal atau Masyarakat di Desa Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Untuk Indikator Efektifitas.

No	Item Penilaian	Kategori Penilaian			Total
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	2	3	4	5	6
1	Menyelenggarakan musyawarah kampung	12	17	23	52
2	menyalurkan aspirasi masyarakat kampung	5	27	20	52
3	Menyusun rancangan peraturan kampung	10	20	22	52
4	Kecepatan dalam menyelesaikan rencana peraturan Kampung	6	16	30	52
Jumlah		33	80	95	208
Skor		99	160	95	354
Kategori		CUKUP BAIK			

Sumber: Data Olahan Peneliti, Tahun 2021

Berdasarkan Evaluasi tabel V.5 diatas dapat dinilai pengukuran indikator dengan rumus likert hasilnya dihitung yaitu:

$$\text{Total skor tertinggi} : 3 \times 3 \times 52 = 468$$

$$\text{Interval} = \frac{468-156-1}{4} = 78$$

$$\text{Total skor terendah} : 1 \times 3 \times 52 = 156$$

Sehingga dapat disimpulkan yaitu hasil hitungan pada kategori Cukup Baik dengan nilai 354 atau berada pada rentang 312-390.

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dilihat jawaban responden dari Masyarakat terhadap BAPEKAM, yang indikatornya membahas tentang “Efektifitas” yang dilakukan terhadap 52 responden. Pada poin pertama yaitu *Menyelenggarakan musyawarah kampung*, memiliki 12 orang responden menjawab Baik, kemudian 17 orang responden menjawab Cukup Baik, dan 23 responden yang menjawab Kurang Baik. Seharusnya BAPEKAM dalam Menyelenggarakan Musyawarah Kampung bisa lebih di tingkatkan lagi agar kedepannya bisa menjadi lebih baik.

Pada poin kedua yaitu *menyalurkan aspirasi masyarakat kampung*, sebanyak 5 orang responden menjawab Baik, kemudian 27 orang responden menjawab Cukup Baik, dan 20 orang responden yang menjawab Kurang Baik. Seharusnya BAPEKAM dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Kampung harus lebih di dengar lagi aspirasi atau masukan dari masyarakat.

Pada poin ketiga yaitu *Menyusun rancangan peraturan kampung*, sebanyak 10 orang responden yang menjawab Baik, dan 20 orang responden menjawab Cukup Baik, dan 22 responden menjawab Kurang Baik.

Pada poin keempat yaitu *Kecepatan dalam menyelesaikan rencana peraturan Kampung*, sebanyak 6 orang responden yang menjawab Baik, dan 16 orang responden menjawab Cukup Baik, dan 30 responden menjawab Kurang Baik.

Dari hasil yang telah penulis jabarkan di atas, selanjutnya dapat di simpulkan mengenai jawaban responden Masyarakat terhadap BAPEKAM tentang Evaluasi Kinerja Badan Permusyawaratan Kampung Di Kampung Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, untuk indikator Efektifitas berada pada rentang skor 354 berada pada kategori “Cukup Baik”, maka dari itu masyarakat harus meningkatkan efektifitasnya lagi agar dapat mendapatkan kategori Baik.

Selanjutnya berdasarkan hasil dari wawancara dengan Bapak Syofi Yardi, selaku Ketua Badan Permusyawaratan Kampung pada hari Selasa, tanggal 9-Maret-2021 pukul 09.00 WIB di Di Kantor Pinang Sebatang Timur mengenai indikator Efektifitas dengan pertanyaan Menurut Bapak/Ibu Ketua BAPEKAM, apakah efektifitas kinerja yang dilakukan BAPEKAM sudah berjalan sesuai yang ditetapkan ?beliau menjawab: *“Belum karna efektifitas itu yang kita bicarakan karna kita juga anggota bapekam juga tidak mengantor maksudnya tidak ada kantor, kantornya ada Cuma gk harus di kantor dia lebih banyak turun di masyarakat, kalau secara fungsi dan tugasnya sudah di lakukan, apakah sudah efektif atau belum ya mungkin kita belum begitu efektif dalam menjalankan tugas karena banyak halangan dan banyak keterbatasan juga, ya kita berusaha dan juga meminta masukan dari anggota-anggota BAPEKAM yang lain sesuai dengan tugasnya masing-masing kepala bidang pemerintahan dab bidang pembangunan”*.

Dengan pertanyaan yang sama, hasil wawancara dengan Bapak Rahman Selaku Wakil Badan Permusyawaratan Kampung pada hari Selasa, tanggal 9-Maret-2021 pukul 10.00 WIB di Di Kantor Pinang Sebatang Timur berikut jawaban beliau: *“kalau bicara tentang efektifitas kerjaan itu sesuai dengan tupoksi yang sudah ada dan di tetapkan oleh pemerintahan daerah, iya kita sudah berjalan sudah cukup baik dalam menjalankan tupoksinya masing-masing sesuai dengan tugasnya”*.

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan mengenai indikator Efektivitas, Peneliti melihat bahwa Evaluasi Kinerja Badan Permusyawaratan Kampung Di Kampung Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, dimana Data daftar Masyarakat yang di undang dalam penyelenggaraan Musyawarah Kampung, Data daftar Masyarakat yang menghadiri dalam Musyawarah Kampung, Data perancangan dalam penyelenggaraan peraturan Kampung, Data aspirasi masyarakat yang di tampung oleh BAPEKAM Sudah sesuai dengan standar

Operasional Prosedur (SOP), tetapi masih ada responden yang menilai kurang maka alangkah baiknya dilakukan peningkatan antusias masyarakat yang di undang.

Uraian data tabel dan hasil wawancara serta hasil pengamatan dilapangan, dapat di tarik kesimpulan bahwa jawaban responden Masyarakat terhadap indikator efektifitas Baik dan Cukup Baik karena responden merasa bahwa data di Badan Permusyawaratan Kampung masih ada Kurangnya.

Untuk mengetahui lebih lanjut dapat dilihat pada data sekunder pada indikator Efektivitas dalam menyelenggarakan Musyawarah Kampung yang penulis dapatkan melalui observasi dilapangan berikut:

Tabel V.6: Respon Masyarakat pada Penyelenggaraan Musyawarah Kampung Di Kampung Pinang Sebatang Timur, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak Tahun 2018-2020

No	Tahun	Masyarakat yang diundang	Masyarakat yang datang
1	2018	80 Orang	50 Orang
2	2019	80 Orang	47 Orang
3	2020	80 Orang	43 Orang

Sumber: Data Olahan Peneliti, Tahun 2021

Dari data Sekunder di atas dapat kita simpulkan bahwa Masyarakat yang di undang dari tahun 2018-2020 mengalami penurunan dari tahun ke tahun, yang mana dapat kita lihat dari jumlah 80 orang yang di undang hanya 50 orang yang hadir dan ini merupakan jumlah masyarakat terbanyak yang hadir pada penyelenggaraan Musyawarah Kampung dari rentang Tahun dari 2018-2020 dan jumlah 80 orang yang di undang hanya 43 orang yang hadir Masyarakat terdikit dari yang Menghadiri

Musyawarah Kampung dari tahun 2018-2020 di karena masalah covid yang mengakibatkan penurunan kehadiran masyarakat.

Tabel V.7: Data Aspirasi Masyarakat yang di tampung oleh Bapekam di Kampung Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Tahun 2020

No	Nama	Aspirasi Masyarakat Untuk Bapekam
1	Supardi	Diharapkan kepada kepala Kampung untuk memperbaiki jalan utama Kampung Yang Rusak yang diakibatkan oleh mobil besar perusahaan
2	Herman Ardiansya	Tidak adanya ronda, diharapkan kepada kepala Kampung untuk membuat ronda supaya Kampung lebih aman
3	Waimun	Tidak adanya sarana olahraga minimal lapangan bola voli
4	Hendri	Partisipasi Masyarakat rendah terhadap kegiatan Kampung, diharapkan kepada Kepala Kampung untuk dapat merangkul Masyarakat untuk menjalankan Kegiatan Kampung
5	Dulkamit	Dipermudah untuk Masyarakat Kampung Pinang Sebatang Timur untuk masuk perusahaan, dikarenakan perusahaan banyak mengambil pekerja dari luar Kampung Pinang Sebatang Timur
6	Jamal	Dilakukan penyiraman jalan dikarenakan jalan berdebu akibat mobil besar perusahaan lewat

Sumber: olahan penelitian Bapekam 2020

Dapat dilihat berdasarkan 2 kelompok responden yang telah dijabarkan penulis, kelompok pertama yaitu hasil dengan Struktur Bapekam 7 Orang yang membahas tentang Indikator “Efektifitas” dengan hasil “BAIK”. Kelompok 2 yaitu hasil kuisioner dengan Struktur Pemerintah Kampung, Lpm, Tokoh agama, dan Masyarakat yang membahas tentang indikator “Efektifitas” dengan hasil Cukup baik.

Dari hasil observasi yang peneliti temukan dilapangan untuk indikator Efektivitas dalam Menyelenggarakan Musyawarah Kampung adalah hanya sebagian masyarakat yang ikut hadir dalam Rapat yang di selenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Kampung untuk membahas rancangan kampung.

2. Efisiensi

Efisiensi adalah suatu ukuran keberhasilan sebuah kegiatan yang dinilai berdasarkan besarnya biaya/ sumber daya yang digunakan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Berikut ini akan dijelaskan mengenai jawaban responden Tentang Evaluasi Kinerja Badan Permusyawaratan Kampung Di Kampung Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

Tabel V.8 : Distribusi Tanggapan Responden Staf BAPEKAM Tentang Evaluasi Kinerja Badan Permusyawaratan Kampung Di Kampung Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Untuk Indikator Efisiensi.

No	Item Penilaian	Kategori Penilaian			Total
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	2	3	4	5	6
1	Pegawai yang memberikan pelayanan	1	2	4	7
2	Kesesuaian anggaran pembangunan kampung	0	3	4	7
3	Melakukan pengawasan kinerja kepada kepala kampung	3	2	2	7
4	Konsistensi Pengawasan Kinerja kepada Kepala Kampung	1	1	5	7
Jumlah		5	8	15	28
Skor		15	16	15	46
Kategori		CUKUP BAIK			

Sumber: Data Olahan Peneliti, Tahun 2021

Berdasarkan Evaluasi tabel V.8 diatas dapat dinilai pengukuran indikator dengan rumus likert hasilnya dihitung yaitu:

$$\text{Total skor tertinggi} : 3 \times 3 \times 7 = 63 \quad \text{Interval} = \frac{63-21-1}{4} = 10$$

$$\text{Total skor terendah} : 1 \times 3 \times 7 = 21$$

Sehingga dapat disimpulkan yaitu hasil hitungan pada kategori Cukup Baik dengan nilai 46 atau berada pada rentang 43-53.

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dilihat jawaban responden dari Masyarakat terhadap BAPEKAM, yang indikatornya membahas tentang “Efisiensi” yang dilakukan terhadap 7 responden. Pada poin pertama yaitu *Pegawai yang memberikan pelayanan*, memiliki 1 orang responden menjawab Baik, kemudian 2 orang responden menjawab Cukup Baik, dan 4 responden yang menjawab Kurang Baik. Seharusnya pegawai BAPEKAM yang memberikan pelayan kepada Masyarakat dapat di tingkatkan lagi agar Masyarakat merasa puas dalam mendapatkan pelayanan.

Pada Poin kedua yaitu mengenai *Kesesuaian Anggaran Pembangunan Kampung*, sebanyak 0 orang responden menjawab Baik, kemudian 3 orang responden menjawab Cukup Baik, dan 4 orang responden yang menjawab Kurang Baik. Seharusnya BAPEKAM dapat memenejemen atau pun mengatur anggaran yang akan di keluarkan sesuai dengan kebutuhan yang di perlukan.

Pada poin ketiga yaitu *Melakukan pengawasan kinerja kepada kepala kampung* , sebanyak 3 orang responden yang menjawab Baik, dan 2 orang responden menjawab Cukup Baik, dan 2 responden menjawab Kurang Baik. Seharusnya BAPEKAM perlu meningkatkan lagi kinerjanya dalam mengawasi kinerja kepala Kampung agar Kinerja Kepala Kampung Dapat lebih Baik lagi kedepannya.

Pada poin keempat yaitu *Konsistensi Pengawasan Kinerja kepada Kepala Kampung*, sebanyak 1 orang responden yang menjawab Baik, dan 1 orang responden

menjawab Cukup Baik, dan 5 responden menjawab Kurang Baik. Seharusnya kinerja Kepala Kampung harus lebih lagi di tingkatkan lagi kinerjanya agar Kepala kampung dapat konsisten lagi dalam bekerja

Dari hasil yang telah penulis jabarkan di atas, selanjutnya dapat di simpulkan mengenai jawaban responden Masyarakat terhadap Badan Permusyawaratan Kampung tentang Evaluasi Kinerja Badan Permusyawaratan Kampung Di Kampung Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, untuk indikator Efisiensi berada pada rentang skor 46 berada pada kategori “Cukup Baik”, maka dari itu Efisiensi masih perlu di tingkatkan lagi karena masih berada di kategorikan cukup baik, maka dari itu efisiensi harus perlu di perbaiki lagi supaya menjadi lebih baik lagi.

Tabel V.9 : Distribusi Tanggapan Responden untuk pihak eksternal atau Masyarakat di Desa Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Kabupaten Siak Untuk Indikator Efisiensi.

No	Item Penilaian	Kategori Penilaian			Total
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	2	3	4	5	6
1	Pegawai yang memberikan pelayanan	5	15	32	52
2	Kesesuaian anggaran pembangunan kampung	4	13	35	52

No	Item Penilaian	Kategori Penilaian			Total
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
3	Melakukan pengawasan kinerja kepada kepala kampung	8	10	34	52
4	Konsistensi Pengawasan Kinerja kepada Kepala Kampung	5	17	30	52
Jumlah		22	55	131	208
Skor		66	110	131	307
Kategori		KURANG BAIK			

Sumber: Data Olahan Peneliti, Tahun 2021

Berdasarkan Evaluasi tabel V.9 diatas dapat dinilai pengukuran indikator dengan rumus likert hasilnya dihitung yaitu:

$$\text{Total skor tertinggi} : 3 \times 3 \times 52 = 468 \quad \text{Interval} = \frac{468 - 156 - 1}{4} = 78$$

$$\text{Total skor terendah} : 1 \times 3 \times 52 = 156$$

Sehingga dapat disimpulkan yaitu hasil hitungan pada kategori Kurang Baik dengan nilai 307 atau berada pada rentang 234 – 312.

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dilihat jawaban responden dari Masyarakat terhadap BAPEKAM, yang indikatornya membahas tentang “Efisiensi” yang dilakukan terhadap 52 responden. Pada poin pertama yaitu *Pegawai yang memberikan pelayanan*, memiliki 5 orang responden menjawab Baik, kemudian 15 orang responden menjawab Cukup Baik, dan 32 responden yang menjawab Kurang

Baik. Seharusnya pegawai BAPEKAM yang memberikan pelayan kepada Masyarakat dapat di tingkatkan lagi agar Masyarakat merasa puas dalam mendapatkan pelayanan agar lebih baik lagi kedepannya.

Pada poin kedua selanjutnya yaitu mengenai *Kesesuaian Anggaran Pembangunan Kampung*, sebanyak 4 orang responden menjawab Baik, kemudian 13 orang responden menjawab Cukup Baik, dan 35 orang responden yang menjawab Kurang Baik. Seharusnya BAPEKAM dapat memenejemen atau pun mengatur anggaran yang akan di keluarkan sesuai dengan kebutuhan yang di perlukan.

pada poin ketiga yaitu *Melakukan pengawasan kinerja kepada kepala kampung* , sebanyak 8 orang responden yang menjawab Baik, dan 10 orang responden menajawab Cukup Baik, dan 34 responden menjawab Kurang Baik. Seharusnya BAPEKAM perlu meningkatkan lagi kinerjanya dalam mengawasi kinerja kepala Kampung agar Kinerja Kepala Kampung Dapat lebih Baik lagi kedepannya.

Pada poin keempat yaitu *Konsistensi Pengawasan Kinerja kepada Kepala Kampung*, sebanyak 5 orang responden yang menjawab Baik, dan 17 orang responden menajawab Cukup Baik, dan 30 responden menjawab Kurang Baik. Seharunya kinerja Kepala Kampung harus lebih lagi di tingkatkan lagi kinerjanya agar Kepala kampung dapat konsisten lagi dalam bekerja

Dari hasil yang telah penulis jabarkan di atas, selanjutnya dapat di simpulkan mengenai jawaban responden Masyarakat terhadap Badan Permusyawaratan Kampung tentang Evaluasi Kinerja Badan Permusyawaratan Kampung Di Kampung Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, untuk indikator Efisiensi berada pada rentang skor 307 berada pada kategori “Kurang Baik”, maka dari itu Efisiensi masih perlu di tingkatkan lagi karena masih berada di kategorikan kurang baik, maka dari itu efisiensi harus perlu di perbaiki lagi supaya menjadi lebih baik lagi.

Berdasarkan hasil dari wawancara dengan Bapak Syofi Yardi, selaku Ketua Badan Permusyawaratan Kampung pada hari Selasa, tanggal 9-Maret-2021 pukul 09.00 WIB di Di Kantor Pinang Sebatang Timur mengenai indikator Efisiensi dengan pertanyaan Menurut Bapak/Ibu Ketua BAPEKAM, apakah efisiensi kinerja yang dilakukanBAPEKAM sudah berjalan sesuai yang ditetapkan ?beliau menjawab: *“Seperti pernyataan saya sebelumnya efisien atau tidak efisien ya kita sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi kalau saya merasakan belum melaksanakan secara maksimal tugas bapekam itu”*.

Dengan pertanyaan yang sama, hasil wawancara dengan Bapak Rahman Selaku Wakil Badan Permusyawaratan Kampung pada hari Selasa, tanggal 9-Maret-2021 pukul 10.00 WIB di Di Kantor Pinang Sebatang Timur, berikut jawaban beliau: *“sudah juga karena kita berpijak kepada tupoksinya masing-masing tapi, oleh karena itu kami BAPEKAM sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mengerjakan tugas secara efisien”*.

Berdasarkan hasil dari observasi yang peneliti lakukan dilapngan mengenai indikator Efisiensi, peneliti melihat bahwa Evaluasi Kinerja Badan Permusyawaratan Kampung Di Kampung Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak sudah berjalan Cukup Baik dan Kurang Baik, maka dari itu Badan Permusyawaratan Kampung belum sesuai dengan Standar Oprasional Prosedur (SOP). Karena dapat dikatakan bahwa datanya belum tercapai, Data anggaran Pembangunan penyelenggaraan Musyawarah Kampung dan data Pegawai BAPEKAM yang

memberikan pelayanan belum sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang dijelaskan. Maka akan lebih baik dilakukan peningkatan Evaluasi Kinerja Badan Permusyawaratan Kampung Di Kampung Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.

Dari uraian tabel dan wawancara serta pengamatan ditarik kesimpulannya bahwa Evaluasi Kinerja Badan Permusyawaratan Kampung Di Kampung Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak belum berjalan dengan Baik, hal ini dibuktikan dari hasil jawaban responden pegawai BAPEKAM dan masyarakat.

Berikut ini adalah data sekunder dari Indikator Penelitian efisiensi.berikut data Pegawai BAPEKAM yang memberikan pelayanan:

Tabel V.10: Data Pegawai BAPEKAM yang Memberi pelayanan

No.	Nama	Pendidikan	Jabatan
1.	Syofia Yardi	SMA	Ketua
2.	Rahman	SMA	Wakil Ketua
3.	Syartunis, S.Pd.I	S1	Sekretaris
4.	Dedi Eka Putra	SMA	Ketua Bidang penyelenggaraan pemerintahan kampung dan pembinaan kemasyarakatan
5	Bambang P	SMA	Ketua bidang pembangunan kampung pemberdayaan masyarakat kampung
No.	Nama	Pendidikan	Jabatan
6.	Jumel Efendi Zein	SMA	Anggota
7.	Yusnidar	SMA	Anggota
8.	Bantu Lumban Batu	SMA	Anggota
9.	Nurhayati	SMA	Anggota

Sumber : Modifikasi Penulis 2021

Berdasarkan Tabel V.10 Badan Permusyawaratan Kampung (Bapekam) di Kampung Pinang Sebatang Timur terdiri dari 9 anggota termasuk Ketua Bapekam, Wakil Ketua Bapekam dan Sekretaris. Hal ini sesuai dalam Peraturan Daerah Kabupaten Siak No. 5 Tahun 2015 pada Pasal (9) ayat (1) jumlah anggota Badan Permusyawaratan Kampung ditetapkan, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang, dengan memperhatikan Wilayah, perempuan, penduduk, dan kemampuan keuangan Kampung.

Tabel V.11: Data Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kampung di Kampung Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Tahun 2020

No	PENDAPATAN	Nominal
1	Pendapatan Asli Kampung	Rp. -
2	Alokasi dana Kampung	Rp. 869.458.000
3	Dana Kampung	Rp 1.212.369.000
4	DBH Pajak dan Retribusi Daerah	Rp 38.033.000
5	Bantuan Keuangan Kabupaten	Rp. -
6	Bantuan Keuangan Provinsi	Rp. 200.000.000
Jumlah Pendapatan		Rp. 2.319.860.000

No	BELANJA	Nominal
1	Belanja Pegawai	Rp. 269.600.000
2	Belanja Barang Dan Jasa	Rp. 514.895.650
3	Belanja Modal	Rp. 1.454.134.600

4	Belanja Tak Terduga	Rp. 100.000.000
Jumlah Realisasi Belanja		Rp. 2.338.630.250
Surplus/(Defisit)		Rp. (18.770.250)

No	PEMBIAYAAN	Nominal
1	Penerimaan Pembiayaan	Rp. 177.656.250
2	Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 158.886.000
Pembiayaan NETTO		Rp. 18.770.250
Sisah Lebih Pembiayaan Anggaran		

No	Anggaran Belanja Kampung Perbidang	Nominal
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kampung	Rp. 677.355.550
2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kampung	Rp. 1.241.674.700
3	Bidang Pembinaan Masyarakat	Rp. 89.600.000
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 50.000.000
5	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Kampung	Rp. 100.000.000
JUMLAH REALISASI BELANJA		Rp. 2.338.630.250

Berdasarkan Tabel V.11 dilihat di atas Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Di Kampung Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak pada Tahun 2020 dengan Defisit (18.770.250) dengan total Belanja Rp. 2.338.630.250 dan Jumlah Pendapat Rp. 2.319.860.000.

Dapat dilihat berdasarkan 2 kelompok responden yang telah dijabarkan penulis, kelompok pertama yaitu hasil dengan Struktur Bapekam 7 Orang yang membahas tentang Indikator “Efisiensi” dengan hasil “CUKUP BAIK”. Kelompok 2 yaitu hasil kuisioner dengan Struktur Pemerintah Kampung, Lpm, Tokoh agama, dan Masyarakat yang membahas tentang indikator “Efisiensi” dengan hasil “KURANG BAIK”.

3. Kecukupan

Kecukupan adalah kecukupan masih berhubungan dengan efektivitas dengan mengukur atau memprediksi seberapa jauh alternatif yang ada dapat memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi.

Berikut ini akan dijelaskan mengenai jawaban responden Tentang Evaluasi Kinerja Badan Permusyawaratan Kampung Di Kampung Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

Tabel V.12 : Distribusi Tanggapan Responden Staf BAPEKAM Tentang Evaluasi Kinerja Badan Permusyawaratan Kampung Di Kampung Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Untuk Indikator Kecukupan.

No	Item Penilaian	Kategori Penilaian			Total
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	2	3	4	5	6
1	Pembagian biaya yang di distibusikan merata	2	2	3	7
2	Manfaat yang diterima oleh Masyarakat	1	3	3	7
3	Pembagian kerja yang merata di tiap pegawai Bapekam	1	3	3	7
4	Penerimaan biaya yang diterima oleh Masyarakat	2	2	3	7
Jumlah		6	10	12	28
Skor		18	20	12	50
Kategori		Cukup BAIK			

Sumber: Data Olahan Peneliti, Tahun 2021

Berdasarkan Evaluasi tabel V.12 diatas dapat dinilai pengukuran indikator dengan rumus likert hasilnya dihitung yaitu:

Total skor tertinggi : $3 \times 3 \times 7 = 63$

$$\text{Interval} = \frac{63-21-1}{4} = 10$$

Total skor terendah : $1 \times 3 \times 7 = 21$

Sehingga dapat disimpulkan yaitu hasil hitungan pada kategori Cukup Baik dengan nilai 50 atau berada pada rentang 33 – 43.

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dilihat jawaban responden dari Masyarakat terhadap BAPEKAM, yang indikatornya membahas tentang “Kecukupan” yang dilakukan terhadap 7 responden. Pada poin pertama yaitu *Pembagian biaya yang di distribusikan merata*, memiliki 2 orang responden menjawab Baik, kemudian 2 orang responden menjawab Cukup Baik, dan 3 responden yang menjawab Kurang Baik. Seharusnya BAPEKAM dalam pembagian biaya yang distribusikan buat masyarakat tidak ada perbedaan kasta diantara Masyarakat agar masyarakat dapat merasakan biaya yang di distribusikan secara merata.

Pada poin kedua selanjutnya yaitu mengenai *Manfaat yang di terima oleh Masyarakat*, sebanyak 1 orang responden menjawab Baik, kemudian 3 orang responden menjawab Cukup Baik, dan 3 orang responden yang menjawab Kurang Baik.

Pada poin ketiga yaitu *Pembagian kerja yang merata di tiap pegawai Bapekam*, sebanyak 1 orang responden yang menjawab Baik, dan 3 orang responden menjawab Cukup Baik, dan 3 responden menjawab Kurang Baik.

Pada poin keempat yaitu *Penerimaan biaya yang diterima oleh Masyarakat*, sebanyak 2 orang responden yang menjawab Baik, dan 2 orang responden menjawab Cukup Baik, dan 3 responden menjawab Kurang Baik. BAPEKAM dalam pendistribusian biaya yang telah dilakukan kepada masyarakat sudah cukup baik.

Dari hasil yang telah penulis jabarkan di atas, selanjutnya dapat di simpulkan mengenai jawaban responden Masyarakat terhadap Badan Permusyawaratan Kampung tentang Evaluasi Kinerja Badan Permusyawaratan Kampung Di Kampung Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, untuk indikator Kecukupan berada pada rentang skor 50 berada pada kategori “Cukup Baik”, maka dari itu Kecukupan masih perlu di perbaiki lagi karena masih berada di kategorikan cukup baik, maka dari itu kecukupan harus di tinggatkan lagi supaya menjadi lebih baik lagi.

Tabel V.13 : Distribusi Tanggapan Responden untuk pihak eksternal atau Masyarakat di Desa Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Untuk Indikator Kecukupan.

No	Item Penilaian	Kategori Penilaian			Total
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	2	3	4	5	6
1	Pembagian biaya yang di distribusikan merata	5	17	30	52
2	Manfaat yang diterima oleh masyarakat	7	10	35	52
3	Pembagian kerja yang merata di tiap pegawai	5	15	32	52

	Bapekam				
4	Penerimaan biaya yang diterima oleh Masyarakat	3	12	37	52
	Jumlah	20	54	134	208
	Skor	60	108	134	302
	Kategori	KURANG BAIK			

Sumber: Data Olahan Peneliti, Tahun 2021

Berdasarkan Evaluasi tabel V.13 diatas dapat dinilai pengukuran indikator dengan rumus likert hasilnya dihitung yaitu:

Total skor tertinggi : $3 \times 3 \times 52 = 468$

$$\text{Interval} = \frac{468-156-1}{4} = 78$$

Total skor terendah : $1 \times 3 \times 52 = 156$

Sehingga dapat disimpulkan yaitu hasil hitungan pada kategori Kurang Baik dengan nilai 302 atau berada pada rentang 234 – 312.

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dilihat jawaban responden dari Masyarakat terhadap BAPEKAM, yang indikatornya membahas tentang “Kecukupan” yang dilakukan terhadap 52 responden. Pada poin pertama yaitu *Pembagian biaya yang di distribusikan merata*, memiliki 5 orang responden menjawab Baik, kemudian 17 orang responden menjawab Cukup Baik, dan 30 responden yang menjawab Kurang Baik.

Kemudian untuk item selanjutnya yaitu mengenai *Manfaat yang diterima oleh masyarakat*, sebanyak 7 orang responden menjawab Baik, kemudian 10 orang responden menjawab Cukup Baik, dan 35 orang responden yang menjawab Kurang Baik. Untuk item selanjutnya yaitu *Pembagian kerja yang merata di tiap pegawai Bapekam*, sebanyak 5 orang responden yang menjawab Baik, dan 15 orang responden menjawab Cukup Baik, dan 32 responden menjawab Kurang Baik. Untuk item selanjutnya yaitu *Penerimaan biaya yang diterima oleh Masyarakat*, sebanyak 3 orang responden yang menjawab Baik, dan 12 orang responden menjawab Cukup Baik, dan 37 responden menjawab Kurang Baik. Dari hasil yang telah penulis jabarkan di atas, selanjutnya dapat di simpulkan mengenai jawaban responden Masyarakat terhadap Badan Permusyawaratan Kampung tentang Evaluasi Kinerja Badan Permusyawaratan Kampung Di Kampung Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, untuk indikator Kecukupan berada pada rentang skor 302 berada pada kategori “Kurang Baik”, maka dari itu kecukupan di Pinang Sebatang Timur masih perlu di tingkatkan lagi karena masih berada di kategorikan kurang baik, maka dari itu Kecukupan di Kampung Pinang Sebatang Timur harus perlu di perbaiki lagi supaya menjadi lebih baik lagi.

Berdasarkan hasil dari wawancara dengan Bapak Syofi Yardi, selaku Ketua Badan Permusyawaratan Kampung pada hari Selasa, tanggal 9-Maret-2021 pukul 09.00 WIB di Di Kantor Pinang Sebatang Timur mengenai indikator Kecukupan dengan pertanyaan Menurut Bapak/Ibu Ketua BAPEKAM, apakah anggaran yang diberikan sudah sesuai dengan kecukupan yang telah di anggarkan Pemerintah kampung ? beliau menjawab: “*anggaran yang di berikan memang sesuai dengan apa yang di ajukan masyarakat karena penggunaan anggaran itu kan kita minta masukan dari masyarakat melalui Pramuskam kemudian ke Muskam dengan BAPEKAM dari*

itu kita bicarakan mana yang memang skala prioritas untuk anggaran itu, kalau kita bicarakan kecukupan yang telah kita bicarakan namanya juga anggaran terbatas ya, kalau untuk hal-hal yang prioritas oke sudah bisa kita jalankan sesuai dengan tujuan”.

Dengan pertanyaan yang sama, hasil wawancara dengan Bapak Rahman, selaku Wakil Badan Permusyawaratan Kampung pada hari Selasa, tanggal 9-Maret-2021 pukul 10.00 WIB di Di Kantor Pinang Sebatang Timur, berikut jawaban beliau: *“masalah anggara kalau kita banding-bandingkan dengan yang lain sudah cukup memadai karena disitu pemerintahan daerah sudah menetapkan persentasi anggaran itu sendiri”.*

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan untuk indikator Kecukupan, peneliti melihat bahwa Evaluasi Kinerja Badan Permusyawaratan Kampung Di Kampung Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak sudah berjalan dengan Cukup Baik dan Kurang Baik, maka dari itu berarti evaluasi kinerja dalam indikator Kecukupan belum berjalan sesuai dengan Standar Oprasional Prosedur (SOP). Karena Data biaya yang didistribusikan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan Musyawarah Kampung belum merata sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang telah dijalankan. Maka dari itu BAPEKAM harus meningkatkan lagi kepeduliannya kepada Masyarakat.

Berdasarkan uraian data tabel dan hasil wawancaara diatas serta hasil pengamatan di lapangan dapat di tarik kesimpulan bahwa jawaban responden mengenai indakator Kecukupan belum berjalan dengan baik, maka dari itu BAPEKAM dalam mendistribusikan anggaran kepada Masyarakat harus merata sesuai dengan Standar Oprasional Prosedur agar menjadi lebih baik lagi.

Berikut ini adalah data sekunder dari Indikator Penelitian Kecukupan.

berikut Data Manfaat apa saja yang sudah di terima oleh Masyarakat:

Tabel V.14: Data Manfaat yang sudah diterima oleh Masyarakat

No.	Manfaat apa saja yang diterima Masyarakat	Tahun
1.	Perbaikan Jalan Pinang Sebatang Timur	2018-2020
2.	Peraturan Musyawarah Kampung	2019-2020
3.	Musyawarah Kampung	2019-2020

Sumber: Data Olahan Peneliti, Tahun 2021

Berdasarkan tabel V.14 diatas tentang Data Manfaat yang sudah diterima oleh Masyarakat. Pada poin pertama adalah perbaikan jalan Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak bagi Masyarakat di tahun 2018-2020. Pada poin kedua yaitu peraturan Musyawarah Kampung dari Tahun 2019-2020. Pada poin ketiga yaitu Musyawarah Kampung Pinang Sebatang Timur pada Tahun 2019-2020.

Dapat dilihat berdasarkan 2 kelompok responden yang telah dijabarkan penulis, kelompok pertama yaitu hasil dengan Struktur Bapekam 7 Orang yang membahas tentang Indikator “Kecukupan” dengan hasil “CUKUP BAIK”. Kelompok 2 yaitu hasil kuisisioner dengan Struktur Pemerintah Kampung, Lpm, Tokoh agama, dan Masyarakat yang membahas tentang indikator “Kecukupan” dengan hasil “KURANG BAIK”.

4. Kesamaan/Pemerataan

Perataan adalah kebijakan yang akibatnya atau usaha secara adil didistribusikan. Suatu program tertentu mungkin dapat efektif, efisien, dan mencukupi apabila biaya-manfaat merata. Kunci dari perataan yaitu keadilan atau kewajaran.

Berikut ini akan dijelaskan mengenai jawaban responden Tentang Evaluasi Kinerja Badan Permusyawaratan Kampung Di Kampung Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

Tabel V.15 : Distribusi Tanggapan Responden Staf BAPEKAM Tentang Evaluasi Kinerja Badan Permusyawaratan Kampung Di Kampung Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Untuk Indikator Kesamaan/Pemerataan.

No	Item Penilaian	Kategori Penilaian			Total
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	2	3	4	5	6
1	Manfaat Kinerja BAPEKAM bagi Masyarakat	5	1	1	7
2	Manfaat Kinerja BAPEKAM bagi Pemerintah Kampung	4	2	1	7
3	Hasil kinerja BAPEKAM sesuai dengan perencanaan kerja	4	1	2	7
4	Hasil Kinerja BAPEKAM yang dirasakan Masyarakat oleh Masyarakat Kampung	3	2	2	7
Jumlah		16	6	6	28
Skor		36	12	6	54
Kategori		BAIK			

Sumber: Data Olahan Peneliti, Tahun 2021

Berdasarkan Evaluasi tabel V.15 diatas dapat dinilai pengukuran indikator dengan rumus likert hasilnya dihitung yaitu:

$$\text{Total skor tertinggi} : 3 \times 3 \times 7 = 63 \quad \text{Interval} = \frac{63-21-1}{4} = 10$$

$$\text{Total skor terendah} : 1 \times 3 \times 7 = 21$$

Sehingga dapat disimpulkan yaitu hasil hitungan pada kategori Kurang Baik dengan nilai 54 atau berada pada rentang 53-63.

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dilihat jawaban responden dari Masyarakat terhadap BAPEKAM, yang indikatornya membahas tentang “Kesamaan/Pemerataan” yang dilakukan terhadap 7 responden. Pada poin pertama yaitu *Manfaat Kinerja BAPEKAM bagi Masyarakat*, memiliki 5 orang responden menjawab Baik, kemudian 1 orang responden menjawab Cukup Baik, dan 1 responden yang menjawab Kurang Baik. Kemudian untuk item selanjutnya yaitu mengenai *Manfaat Kinerja BAPEKAM bagi Pemerintah Kampung*, sebanyak 4 orang responden menjawab Baik, kemudian 2 orang responden menjawab Cukup Baik, dan 1 orang responden yang menjawab Kurang Baik. Untuk item selanjutnya yaitu *Hasil kinerja BAPEKAM sesuai dengan perencanaan kerja*, sebanyak 4 orang responden yang menjawab Baik, dan 1 orang responden menjawab Cukup Baik, dan 2 responden menjawab Kurang Baik. Untuk item selanjutnya yaitu *Hasil Kinerja BAPEKAM yang dirasakan Masyarakat oleh Masyarakat Kampung*, sebanyak 3

orang responden yang menjawab Baik, dan 2 orang responden menjawab Cukup Baik, dan 2 responden menjawab Kurang Baik.

Dari hasil yang telah penulis jabarkan di atas, selanjutnya dapat di simpulkan mengenai jawaban responden Masyarakat terhadap Badan Permusyawaratan Kampung tentang Evaluasi Kinerja Badan Permusyawaratan Kampung Di Kampung Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, untuk indikator Kecukupan berada pada rentang skor 54 berada pada kategori “Baik”.

Tabel V.16: Distribusi Tanggapan Responden untuk pihak eksternal atau Masyarakat di Desa Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Kabupaten Siak Untuk Indikator Kesamaan/Pemerataan.

No	Item Penilaian	Kategori Penilaian			Total
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	2	3	4	5	6
1	Manfaat Kinerja BAPEKAM Bagi Masyarakat	8	18	26	52
2	Manfaat Kinerja BAPEKAM bagi Pemerintah Kampung	8	10	34	52
4	Hasil Kinerja BAPEKAM yang dirasakan Masyarakat oleh Masyarakat Kampung	5	16	31	52
Jumlah		27	59	122	208
Skor		81	118	122	321
Kategori		CUKUP BAIK			

Sumber: Data Olahan Peneliti, Tahun 2021

Berdasarkan Evaluasi tabel V.16 diatas dapat dinilai pengukuran indikator dengan rumus likert hasilnya dihitung yaitu:

$$\text{Total skor tertinggi} : 3 \times 3 \times 52 = 468 \qquad \text{Interval} = \frac{468-156-1}{4} = 78$$

$$\text{Total skor terendah} : 1 \times 3 \times 52 = 156$$

Sehingga dapat disimpulkan yaitu hasil hitungan pada kategori Cukup Baik dengan nilai 321 atau berada pada rentang 312-390.

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dilihat jawaban responden dari Masyarakat terhadap BAPEKAM, yang indikatornya membahas tentang “Kesamaan/Pemerataan” yang dilakukan terhadap 52 responden. Pada poin pertama yaitu *Manfaat Kinerja BAPEKAM Bagi Masyarakat* memiliki 8 orang responden menjawab Baik, kemudian 18 orang responden menjawab Cukup Baik, dan 26 responden yang menjawab Kurang Baik. Kemudian untuk item selanjutnya yaitu mengenai *Manfaat Kinerja BAPEKAM bagi Pemerintah Kampung*, sebanyak 8 orang responden menjawab Baik, kemudian 10 orang responden menjawab Cukup Baik, dan 34 orang responden yang menjawab Kurang Baik. Untuk item selanjutnya yaitu *Hasil kinerja BAPEKAM sesuai dengan perencanaan kerja*, sebanyak 6 orang responden yang menjawab Baik, dan 15 orang responden menjawab Cukup Baik, dan 31 responden menjawab Kurang Baik. Untuk item selanjutnya yaitu *Hasil Kinerja BAPEKAM yang dirasakan Masyarakat oleh Masyarakat Kampung*,

sebanyak 5 orang responden yang menjawab Baik, dan 16 orang responden menjawab Cukup Baik, dan 31 responden menjawab Cukup Baik. Dari hasil yang telah penulis jabarkan di atas, selanjutnya dapat di simpulkan mengenai jawaban responden Masyarakat terhadap Badan Permusyawaratan Kampung tentang Evaluasi Kinerja Badan Permusyawaratan Kampung Di Kampung Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, untuk indikator Kesamaan/Pemerataan berada pada rentang skor 321 berada pada kategori “Cukup Baik”, maka dari itu Pemerataan di Pinang Sebatang Timur masih perlu di tingkatkan lagi karena masih berada di kategorikan Cukup baik, maka dari itu Kecukupan di Kampung Pinang Sebatang Timur harus perlu di perbaiki lagi supaya menjadi lebih baik lagi.

Berdasarkan hasil dari wawancara dengan Bapak Syofi Yardi, selaku Ketua Badan Permusyawaratan Kampung pada hari Selasa, tanggal 9-Maret-2021 pukul 09.00 WIB di Di Kantor Pinang Sebatang Timur mengenai indikator Kesamaan/Permerataan dengan pertanyaan Menurut Bapak/Ibu Ketua BAPEKAM, apakah pemerataan pelayanan yang dilakukan Pemerintah Kampung sudah sesuai dengan di tetapkan? beliau menjawab: *“kalau masalah pelayanan Masyarakat tentang pemerataan Masyarakat kita sudah berusaha dan saya sudah menengok juga sudah lumayan baguslah untuk di kampung pinang sebatang timur kecamatan tualang ini, karena di dalam naungan pemerintahan pak heri ini sudah di tetapkan di pos nya masing-masing sudah lumayan bagus”*.

Dengan pertanyaan yang sama, hasil wawancara dengan Bapak Rahman, selaku Wakil Badan Permusyawaratan Kampung pada hari Selasa, tanggal 9-Maret-2021 pukul 10.00 WIB di Di Kantor Pinang Sebatang Timur, berikut jawaban beliau: *“kalau pemerataan pemerintahan kampung sudah cukup baik, karena kita sudah cukup adil dalam mengawasi dari pada kinerja-kinerja pemerintah kampung di kampung pinang sebatang timur”*.

Kemudian hasil dari observasi yang dilakukan peneliti dilakukan dilapangan mengenai indikator Kesamaan/Pemerataan, peneliti melihat bahwa Evaluasi Kinerja Badan Permusyawaratan Kampung Di Kampung Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak sudah berjalan dengan Baik dan Cukup Baik. Sudah berjalan dengan Baik Sesuai Dengan Standar Operasional Prosedurnya, tetapi masih ada penilaian dari responden yang menyatakan Cukup Baik dikarenakan Masih merasa Kurang akan Pengawasan Kinerja BAPEKAM terhadap Kepala Kampung Pinang Sebatang Timur. Akan lebih baik BAPEKAM dalam mengawasi Kinerja Kepala Kampung agar Masyarakat dapat menilai BAPEKAM dalam Kinerjanya Sudah berjalan Sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP).

Dari uraian tabel dan wawancara serta hasil pengamatan ditarik kesimpulan bahwa Badan Permusyawaratan Kampung Di Kampung Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak sudah berjalan dengan Baik. Dimana Badan Permusyawaratan Kampung sudah melaksanakan Tugasnya Sesuai dengan Standar Operasional Prosedurnya (SOP). Hal ini dibuktikan dari hasil jawaban BAPEKAM yang menyatakan Baik, karena BEPEKAM sudah merasa Baik dalam melakukan Pengawasannya kepada Kepala Kampung.

Berikut ini adalah data sekunder dari Indikator Penelitian Kesamaan/Pemerataan. berikut Data kinerja BAPEKAM yang sudah sesuai dengan perencanaan kerja:

Tabel V.17: Data Kinerja BAPEKAM yang sudah sesuai dengan Perencanaan Kerja

No.	Data Kinerja BAPEKAM yang sudah sesuai dengan perencanaan kerja	Tahun Perencanaan Kerja
1.	Pengawasan Kinerja BAPEKAM terhadap Kepala Kampung Pinang Sebatang Timur	2018-2020
2.	Peraturan Pembangunan Jalan yang ada di Pinang Sebatang Timur	2018-2020
3.	Peraturan pemakaian ambulan gratis bagi Masyarakat Pinang sebatang Timur	2019-2020

Sumber: Data Olahan Peneliti, Tahun 2021

Berdasarkan dari tabel V.17 di atas tentang Data Kinerja BAPEKAM yang sudah sesuai dengan perencanaan kerja. Yang mana pada poin pertama tentang pengawasan Kinerja BAPEKAM yang sudah sesuai dengan Perencanaan Kerja pada tahun 2018-2020 sudah sesuai dengan yang direncanakan oleh BAPEKAM. Pada poin kedua yaitu Peraturan Pembangunan Jalan yang ada di Pinang Sebatang Timur pada tahun 2018-2020 sudah berjalan sesuai dengan yang direncanakan BAPEKAM kepada Masyarakat. Pada Poin ketiga yaitu Peraturan pemakaian ambulan gratis bagi Masyarakat Pinang sebatang Timur pada tahun 2019-2020 sudah berjalan sudah dirasakan oleh Masyarakat Kampung Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.

Dapat dilihat berdasarkan 2 kelompok responden yang telah dijabarkan penulis, kelompok pertama yaitu hasil dengan Struktur Bapekam 7 Orang yang membahas

tentang Indikator “Kesamaan/Pemerataan” dengan hasil “BAIK”. Kelompok 2 yaitu hasil kuisisioner dengan Struktur Pemerintah Kampung, Lpm, Tokoh agama, dan Masyarakat yang membahas tentang indikator “Kesamaan/Pemerataan” dengan hasil “Cukup BAIK”

5. Responsivitas

Responsivitas adalah kemampuan birokrasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, serta mengembangkan program-program pelayanan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Berikut ini akan dijelaskan mengenai jawaban responden Tentang Evaluasi Kinerja Badan Permusyawaratan Kampung Di Kampung Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

Tabel V.18 : Distribusi Tanggapan Responden Staf BAPEKAM Tentang Evaluasi Kinerja Badan Permusyawaratan Kampung Di Kampung Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Untuk Indikator Responsivitas.

No	Item Penilaian	Kategori Penilaian			Total
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Melaksanakan tugas dan fungsi BAPEKAM	3	2	2	7
2	Tanggung jawab dalam memberikan pelayanan	3	3	1	7
3	Semua keluhan Masyarakat di respon oleh BAPEKAM	3	2	2	7
Jumlah		11	10	7	28
Skor		33	20	7	60
Kategori		BAIK			

Sumber: Data Olahan Peneliti, Tahun 2021

Berdasarkan Evaluasi tabel V.18 diatas dapat dinilai pengukuran indikator dengan rumus likert hasilnya dihitung yaitu:

$$\text{Total skor tertinggi} : 3 \times 3 \times 7 = 63 \quad \text{Interval} = \frac{63-21-1}{4} = 10$$

$$\text{Total skor terendah} : 1 \times 3 \times 7 = 21$$

Sehingga dapat disimpulkan yaitu hasil hitungan pada kategori Baik dengan nilai 60 atau berada pada rentang 53-63.

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dilihat jawaban responden dari Masyarakat terhadap BAPEKAM, yang indikatornya membahas tentang “Responsivitas” yang dilakukan terhadap 7 responden. Pada poin pertama yaitu *Melaksanakan tugas dan fungsi BAPEKAM*, memiliki 3 orang responden menjawab Baik, kemudian 2 orang responden menjawab Cukup Baik, dan 2 responden yang menjawab Kurang Baik. Kemudian untuk item selanjutnya yaitu mengenai *Tanggung jawab dalam memberikan pelayanan*, sebanyak 3 orang responden menjawab Baik, kemudian 3 orang responden menjawab Cukup Baik, dan 1 orang responden yang menjawab Kurang Baik. Untuk item selanjutnya yaitu *Keadilan BAPEKAM dalam memberikan pelayanan*, sebanyak 2 orang responden yang menjawab Baik, dan 3 orang responden menjawab Cukup Baik, dan 2 responden menjawab Kurang Baik. Untuk item selanjutnya yaitu *Semua keluhan Masyarakat di respon oleh BAPEKAM*,

sebanyak 3 orang responden yang menjawab Baik, dan 2 orang responden menjawab Cukup Baik, dan 2 responden menjawab Cukup Baik.

Dari hasil yang telah penulis jabarkan di atas, selanjutnya dapat di simpulkan mengenai jawaban responden Masyarakat terhadap Badan Permusyawaratan Kampung tentang Evaluasi Kinerja Badan Permusyawaratan Kampung Di Kampung Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, untuk indikator Responsivitas berada pada rentang skor 60 berada pada kategori “Baik”.

Tabel V.19: Distribusi Tanggapan Responden untuk pihak eksternal atau Masyarakat di Desa Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Kabupaten Siak Untuk Indikator Responsivitas.

No	Item Penilaian	Kategori Penilaian			Total
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Melaksanakan tugas dan fungsi BAPEKAM	6	12	34	52
2	Tanggung jawab dalam memberikan pelayanan	7	12	33	52
3	Keadilan BAPEKAM dalam memberikan pelayanan.	6	10	36	52
4	Semua keluhan Masyarakat di respon oleh BAPEKAM	5	7	40	52
Jumlah		24	41	143	208
Skor		93	82	143	318
Kategori		CUKUP BAIK			

Sumber: Data Olahan Peneliti, Tahun 2021

Berdasarkan Evaluasi tabel V.19 diatas dapat dinilai pengukuran indikator dengan rumus likert hasilnya dihitung yaitu:

$$\text{Total skor tertinggi} : 3 \times 3 \times 52 = 468 \qquad \text{Interval} = \frac{468-156-1}{4} = 78$$

$$\text{Total skor terendah} : 1 \times 3 \times 52 = 156$$

Sehingga dapat disimpulkan yaitu hasil hitungan pada kategori Cukup Baik dengan nilai 318 atau berada pada rentang 312-390.

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dilihat jawaban responden dari Masyarakat terhadap BAPEKAM, yang indikatornya membahas tentang “Responsivitas” yang dilakukan terhadap 52 responden. Pada poin pertama yaitu *Melaksanakan tugas dan fungsi BAPEKAM*, memiliki 6 orang responden menjawab Baik, kemudian 12 orang responden menjawab Cukup Baik, dan 34 responden yang menjawab Kurang Baik. Kemudian untuk item selanjutnya yaitu mengenai *Tanggung jawab dalam memberikan pelayanan*, sebanyak 7 orang responden menjawab Baik, kemudian 12 orang responden menjawab Cukup Baik, dan 33 orang responden yang menjawab Kurang Baik. Untuk item selanjutnya yaitu *Keadilan BAPEKAM dalam memberikan pelayanan*, sebanyak 6 orang responden yang menjawab Baik, dan 10 orang responden menjawab Cukup Baik, dan 36 responden menjawab Kurang Baik. Untuk item selanjutnya yaitu *Semua keluhan Masyarakat di respon oleh BAPEKAM*, sebanyak 5 orang responden yang menjawab Baik, dan 7 orang responden menjawab Cukup Baik, dan 40 responden menjawab Cukup Baik.

Dari hasil yang telah penulis jabarkan di atas, selanjutnya dapat di simpulkan mengenai jawaban responden Masyarakat terhadap Badan Permusyawaratan Kampung tentang Evaluasi Kinerja Badan Permusyawaratan Kampung Di Kampung Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, untuk indikator Kecukupan berada pada rentang skor 318 berada pada kategori “Cukup Baik”, maka dari itu Responsivitas masih perlu di perbaiki lagi karena masih belum mencapai yang ingin dicapai yaitu baik di Kampung Pinang Sebatang Timur harus di tingkatkan lagi agar menjadi lebih baik lagi kedepannya.

Berdasarkan hasil dari wawancara dengan Bapak Syofi Yardi, selaku Ketua Badan Permusyawaratan Kampung pada hari Selasa, tanggal 9-Maret-2021 pukul 09.00 WIB di Di Kantor Pinang Sebatang Timur mengenai indikator Responsivitas dengan pertanyaan Menurut Bapak/Ibu Ketua BAPEKAM, apakah Responsivitas BAPEKAM dalam menerima aspirasi masyarakat sudah berjalan dengan baik ? beliau menjawab: *“Sudah, cuman dalam menerima responsivitas atau merespon kita terhadap aspirasi dari masyarakat tentu kita juga tidak semuanya harus kita tampung karena kita juga banyak yang kita pertimbangkan disana bersama BAPEKAM, jadi kalau aspirasi- aspirasi masyarakat kita tampung tetapi tidak semua bisa kita dilaksanakan, karena kemampuan dari Pemerintah desa apalagi aspirasi dalam bentuk pembangunan untuk penggunaan anggaran karena secara fungsi dan tugas BAPEKAM itukan mengawasi yang menggunakan anggaran kalau masalah-masalah masyarakat yang lain tetap kita tampung dan kita bantu untuk menyelesaikan masalah tersebut”*.

Dengan pertanyaan yang sama, hasil wawancara dengan Bapak Rahman, selaku Wakil Badan Permusyawaratan Kampung pada hari Selasa, tanggal 9-Maret-2021 pukul 10.00 WIB di Di Kantor Pinang Sebatang Timur, berikut jawaban beliau: *“kalau boleh dikatakan baik, tetapi masih kurang karena kita kadang-kadang menyampaikan aspirasi itu dalam satu hari itu kadang tidak ada, tetapi seandainya ada masyarakat yang datang tetap kita layani dengan sebaik-baiknya Pemerintah kampung mau pun BAPEKAM itu sendiri.*

Kemudian dari hasil observasi yang dilakukan peneliti di lapangan mengenai indikator Responsivitas, peneliti melihat bahwa Evaluasi Kinerja Badan Permusyawaratan Kampung Di Kampung Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak sudah Baik dan berjalan sesuai dengan peraturan BAPEKAM, tetapi masih ada penilaian dari Responden Masyarakat yang menyatakan Kurang Baik atau Cukup Baik dikarenakan masih kurang akan pelayanan yang diberikan oleh Badan Permusyawaratan Kampung dikatakan bahwa Badan Permusyawaratan Kampung membahas dan menyepakati peraturan Kampung di Pinang Sebatang Timur kurang sesuai dengan Standar Oprasional Prosedurnya, maka akan lebih Baiknya dilakukan peningkatan Evaluasi Kinerja Badan Permusyawaratan Kampung Di Kampung Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.

Dari uraian tabel dan wawancara serta hasil pengamatan ditarik kesimpulan bahwa Badan Permusyawaratan Kampung di Kampung Pinang Sebatang Timur Sudah Berjalan dengan Baik, sebaiknya Masyarakat dalam memberikan Penilaian kepada Badan Permusyawaratan Kampung harus berkontribusi langsung dalam membahas dan menyepakati rencana Peraturan Kampung agar Masyarakat dapat melihat hasil Kinerja Badan Permusyawaratan Kampung.

Berikut ini adalah data sekunder dari Indikator Penelitian Responsivitas. berikut Data tugas dan fungsi BAPEKAM dalam penyelenggaraan Musyawarah Kampung.

Tabel V.20: Data tugas dan fungsi BAPEKAM dalam penyelenggaraan Musyawarah Kampung

No	Data tugas dan fungsi BAPEKAM dalam penyelenggaraan Musyawarah Kampung	Tahun
1.	Membahas dan menyetujui rancangan Peraturan Kampung	2017-2020
2.	Melakukan Evaluasi Kepala Kampung	2018-2019
3.	Menciptakan hubungan kerja yang harmonis	2017-2020

Sumber: Data Olahan Peneliti, Tahun 2021

Berdasarkan dari tabel V.20 di atas tentang Data tugas dan fungsi BAPEKAM dalam penyelenggaraan Musyawarah Kampung. Yang mana pada poin pertama tentang Membahas dan menyetujui rancangan Peraturan Kampung pada tahun 2017-2020. Pada poin kedua yaitu Melakukan Evaluasi Kepala Kampung pada tahun 2018-2019. Maka dari itu BAPEKAM harus bisa mengevaluasi Kinerja Kepala Kampung agar Kampung Pinang Sebatang Timur dapat Lebih Baik Lagi Pada Poin ketiga yaitu Menciptakan hubungan kerja yang harmonis pada tahun 2018-2020. Agar Kinerja BAPEKAM dan Kepala Kampung dapat berjalan dengan baik.

Dapat dilihat berdasarkan 2 kelompok responden yang telah dijabarkan penulis, kelompok pertama yaitu hasil dengan Struktur Bapekam 7 Orang yang membahas tentang Indikator “Responsivitas” dengan hasil “BAIK”. Kelompok 2 yaitu hasil kuisioner dengan Struktur Pemerintah Kampung, Lpm, Tokoh agama, dan

Masyarakat yang membahas tentang indikator “Responsivitas” dengan hasil “CUKUP BAIK”.

6. Ketepatan

Ketepatan adalah Kriteria yang dipakai untuk menseleksi sejumlah alternatif untuk dijadikan rekomendasi dengan menilai apakah hasil dari alternatif yang direkomendasikan tersebut merupakan pilihan tujuan yang layak. Kriteria kelayakan dihubungkan dengan rasionalitas substantif, karena kriteria ini menyangkut substansi tujuan bukan cara atau instrumen untuk merealisasikan tujuan tersebut.

Berikut ini akan dijelaskan mengenai jawaban responden Tentang Evaluasi Kinerja Badan Permusyawaratan Kampung Di Kampung Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

Tabel V.21 : Distribusi Tanggapan Responden Staf BAPEKAM Tentang Evaluasi Kinerja Badan Permusyawaratan Kampung Di Kampung Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Untuk Indikator Ketepatan.

No	Item Penilaian	Kategori Penilaian			Total
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	target yang ingin dicapai BAPEKAM	2	3	2	7

2	pencapaian target BAPEKAM	3	2	2	7
3	Sejauh mana target yang telah tercapai	2	3	4	7
4	Ketepatan waktu dalam menyelesaikan target yang ditetapkan	3	3	1	7
Jumlah		10	11	7	28
Skor		30	22	7	59
Kategori		BAIK			

Sumber: Data Olahan Peneliti, Tahun 2021

Berdasarkan Evaluasi tabel V.21 diatas dapat dinilai pengukuran indikator dengan rumus likert hasilnya dihitung yaitu:

$$\text{Total skor tertinggi} : 3 \times 3 \times 7 = 63 \quad \text{Interval} = \frac{63-21-1}{4} = 10$$

$$\text{Total skor terendah} : 1 \times 3 \times 7 = 21$$

Sehingga dapat disimpulkan yaitu hasil hitungan pada kategori Baik dengan nilai 59 atau berada pada rentang 53-63.

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dilihat jawaban responden dari Masyarakat terhadap BAPEKAM, yang indikatornya membahas tentang “Ketetapan” yang dilakukan terhadap 7 responden. Pada poin pertama yaitu *target yang ingin dicapai BAPEKAM*, memiliki 2 orang responden menjawab Baik, kemudian 3 orang responden menjawab Cukup Baik, dan 2 responden yang menjawab Kurang Baik.

Kemudian untuk item selanjutnya yaitu mengenai *Tanggung jawab dalam memberikan pelayanan*, sebanyak 3 orang responden menjawab Baik, kemudian 2 orang responden menjawab Cukup Baik, dan 2 orang responden yang menjawab Kurang Baik. Untuk item selanjutnya yaitu *Keadilan BAPEKAM dalam memberikan pelayanan* sebanyak 2 orang responden yang menjawab Baik, dan 3 orang responden menjawab Cukup Baik, dan 4 responden menjawab Kurang Baik. Untuk item selanjutnya yaitu *Semua keluhan Masyarakat di respon oleh BAPEKAM*, sebanyak 3 orang responden yang menjawab Baik, dan 3 orang responden menjawab Cukup Baik, dan 1 responden menjawab Kurang Baik.

Dari hasil yang telah penulis jabarkan di atas, selanjutnya dapat di simpulkan mengenai jawaban responden Masyarakat terhadap Badan Permusyawaratan Kampung tentang Evaluasi Kinerja Badan Permusyawaratan Kampung Di Kampung Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, untuk indikator Kecukupan berada pada rentang skor 59 berada pada kategori “Baik”

Tabel V.22: Distribusi Tanggapan Responden untuk pihak eksternal atau Masyarakat di Desa Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Untuk Indikator Ketepatan.

No	Item Penilaian	Kategori Penilaian			Total
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	target yang ingin dicapai BAPEKAM	3	15	34	52
2	pencapaian target BAPEKAM	4	17	31	52

3	Sejauh mana target yang telah tercapai	3	21	28	52
4	Ketepatan waktu dalam menyelesaikan target yang ditetapkan	2	10	40	52
Jumlah		24	41	143	208
Skor		34	126	133	293
Kategori		KURANG BAIK			

Sumber: Data Olahan Peneliti, Tahun 2021

Berdasarkan Evaluasi tabel V.22 diatas dapat dinilai pengukuran indikator dengan rumus likert hasilnya dihitung yaitu:

Total skor tertinggi : $3 \times 3 \times 52 = 468$

$$\text{Interval} = \frac{468-156-1}{4} = 78$$

Total skor terendah : $1 \times 3 \times 52 = 156$

Sehingga dapat disimpulkan yaitu hasil hitungan pada kategori Kurang Baik dengan nilai 293 atau berada pada rentang 234 – 312

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dilihat jawaban responden dari Masyarakat terhadap BAPEKAM, yang indikatornya membahas tentang “Ketepatan” yang dilakukan terhadap 52 responden. Pada poin pertama yaitu *target yang ingin dicapai BAPEKAM*, memiliki 3 orang responden menjawab Baik, kemudian 15 orang responden menjawab Cukup Baik, dan 34 responden yang menjawab Kurang Baik. Kemudian untuk item selanjutnya yaitu mengenai *pencapaian target BAPEKAM*, sebanyak 4 orang responden menjawab Baik, kemudian 17 orang responden menjawab Cukup Baik, dan 31 orang responden yang menjawab Kurang Baik. Untuk

item selanjutnya yaitu *Sejauh mana target yang telah tercapai* sebanyak 3 orang responden yang menjawab Baik, dan 21 orang responden menjawab Cukup Baik, dan 28 responden menjawab Kurang Baik. Untuk item selanjutnya yaitu *Ketepatan waktu dalam menyelesaikan target yang ditetapkan*, sebanyak 2 orang responden yang menjawab Baik, dan 10 orang responden menjawab Cukup Baik, dan 40 responden menjawab Cukup Baik.

Dari hasil yang telah penulis jabarkan di atas, selanjutnya dapat di simpulkan mengenai jawaban responden Masyarakat terhadap Badan Permusyawaratan Kampung tentang Evaluasi Kinerja Badan Permusyawaratan Kampung Di Kampung Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, untuk indikator Ketepatan berada pada rentang skor 293 berada pada kategori “Kurang Baik”, maka dari itu Badan Permusyawaratan Kampung dalam Ketepatan masih perlu di perbaiki lagi karena masih belum mencapai yang ingin dicapai yaitu Baik di Kampung Pinang Sebatang Timur harus di tingkatkan lagi agar menjadi lebih baik lagi kedepannya.

Berdasarkan hasil dari wawancara dengan Bapak Syofi Yardi, selaku Ketua Badan Permusyawaratan Kampung pada hari Selasa, tanggal 9-Maret-2021 pukul 09.00 WIB di Di Kantor Pinang Sebatang Timur mengenai indikator Ketepatan dengan pertanyaan Menurut Bapak/Ibu Ketua BAPEKAM, apakah ketepatan BAPEKAM dalam menilai kinerja Pemerintah Kampung, sudah sesuai dengan yang ditetapkan ? beliau menjawab: *“selama ini kami hampir 2 tahun sudah sesuai dengan jalurnya atau sesuai dengan tugas dan fungsinya pemerintah kampung ini baik itu kinerjanya dalam penggunaan anggaran atau pun dalam hal-hal lainnya dalam memerintahkan kampung ini, memang itulah tugas kita untuk mengawasi pemerintah kampung ini sudah sesuai apa belum dengan yang diharapkan, tetapi dalam sekian banyak yang dilakukan tentu ada juga yang menilai ini bagus ini atau tidak bagusnnya karena tidak semuanya suka dengan kinerja BAPEKAM, tetapi secara*

garis besar karena pemerintah sekarang sudah sangat berhati-hati terhadap penggunaan anggaran”.

Dengan pertanyaan yang sama, hasil wawancara dengan Bapak Rahman, selaku Wakil Badan Permusyawaratan Kampung pada hari Selasa, tanggal 9-Maret-2021 pukul 09.00 WIB di Di Kantor Pinang Sebatang Timur, berikut jawaban beliau: *“Ketepatan, sudah, karena semua sudah ada tupoksinya masing-masing sehingga dari Pemerintahan kampung dan staff itu sendiri dan BAPEKAM sudah berjalan dengan baik”.*

Kemudian dari hasil observasi yang dilakukan peneliti di lapangan mengenai indikator Kecukupan, peneliti melihat bahwa Evaluasi Kinerja Badan Permusyawaratan Kampung Di Kampung Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak sudah Baik dan berjalan sesuai dengan peraturan BAPEKAM, tetapi masih ada penilaian dari Responden Masyarakat yang menyatakan Kurang Baik dikarenakan masih kurang akan Data target BAPEKAM dalam penyelenggaraan Musyawarah Kampung dikatakan bahwa Badan Permusyawaratan Kampung Mengupayakan pemberdayaan Masyarakat melalui kegiatan Olahraga, kesenian, dan sosial kurang sesuai dengan Standar Oprasional Prosedurnya, maka akan lebih Baiknya dilakukan peningkatan Evaluasi Kinerja Badan Permusyawaratan Kampung Di Kampung Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.

Dari uraian tabel dan wawancara serta hasil pengamatan ditarik kesimpulan bahwa Badan Permusyawaratan Kampung di Kampung Pinang Sebatang Timur Sudah Berjalan dengan Baik, sebaiknya Masyarakat dalam memberikan Penilaian kepada Badan Permusyawaratan Kampung harus berkontribusi langsung dalam

membahas dan menyepakati rencana Peraturan Kampung agar Masyarakat dapat melihat hasil Kinerja Badan Permusyawaratan Kampung.

Berikut ini adalah data sekunder dari Indikator Penelitian Ketepatan. berikut Data target BAPEKAM dalam penyelenggaraan Musyawarah Kampung:

Tabel V.23: Data Target BAPEKAM dalam penyelenggaraan Musyawarah Kampung

No	Data Target BAPEKAM Dalam Penyelenggaraan Musyawarah Kampung	Tahun
1.	Mengupayakan pemberdayaan Masyarakat melalui kegiatan Olahraga, kesenian, dan sosial.	2018-2020
2.	Melakukan pembentukan panitia pemilihan Kepala Kampung	2017-2018
3.	Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang merata terutama Kampung-Kampung, salah satunya Kampung Pinang Sebatang Timur	2018-2020

Sumber: Data Olahan Peneliti, Tahun 2021

Berdasarkan dari tabel V.23 di atas tentang Data target BAPEKAM dalam penyelenggaraan Musyawarah Kampung. Yang mana pada poin pertama tentang Mengupayakan pemberdayaan Masyarakat melalui kegiatan Olahraga, kesenian, dan sosial pada tahun 2018-2020 sudah sesuai dengan penyelenggaraan Musyawarah Kampung oleh BAPEKAM. Pada poin kedua yaitu Melakukan panitia pemilihan Kepala Kampung pada tahun 2017-2018. Pada Poin ketiga yaitu Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang merata terutama Kampung-

Kampung, salah satunya Kampung Pinang Sebatang Timur pada tahun 2018-2020.

Dapat dilihat berdasarkan 2 kelompok responden yang telah dijabarkan penulis, kelompok pertama yaitu hasil dengan Struktur Bapekam 7 Orang yang membahas tentang Indikator “Ketepatan” dengan hasil “ BAIK”. Kelompok 2 yaitu hasil kuisioner dengan Struktur Pemerintah Kampung, Lpm, Tokoh agama, dan Masyarakat yang membahas tentang indikator “Ketepatan” dengan hasil “KURANG BAIK”.

C. Hasil Rekapitulasi Jawaban Responden Tentang Evaluasi Kinerja Badan permusyawaratan Kampung Dikampung Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.

Untuk mengetahui hasil rekapitulasi dari observasi yang penulis lakukan di Kampung Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Kabupaten Siak, yang mana penulis telah melakukan wawancara langsung kepada Ketua Badan Permusyawaratan Kampung dan Masyarakat Di Kampung, juga melakukan pengumpulan data kuisioner kepada masyarakat Kampung Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak. Berdasarkan indikator yang telah di tetapkan, maka hasil rekapitulasinya dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel V.24: Rekapitulasi Perindikator Staf BAPEKAM Tentang Evaluasi Kinerja Badan Permusyawaratan Kampung Di Kampung Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.

No	Item Penilaian	Kategori Penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	2	3	4	5	7
1	Efektifitas	13	8	7	28
2	Efisiensi	5	8	15	28
3	Kecukupan	6	10	12	28
4	Kesamaan/Pemerataan	16	6	6	28
5	Responsivitas	11	10	7	28
6	Ketepatan	10	11	7	28
Jumlah		61	53	54	168
Skor		183	106	54	343
Kategori		Cukup Baik			

Sumber : Data Olahan Peneliti, Tahun 2021

Berdasarkan tabel V.24 Di atas, dapat di ketahui rekapitulasi jawaban responden Staf BAPEKAM dapat dinyatakan dengan menggunakan rumus likert dihitung yaitu:

Total skor tertinggi : $3 \times 3 \times 52 = 468$

$$\text{Interval} = \frac{468 - 156 - 1}{4} = 78$$

Total skor terendah : $1 \times 3 \times 52 = 156$

Sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil penghitungam berada pada kategori Baik dengan skor 343 atau berada pada rentang skor 312-390.

Rekapitulasi responden Staf BAPEKAM Tentang Evaliasi Kinerja Badan Permusyawaratan Kampung Di Kampung Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak. untuk kategori penilaian baik memiliki skor 183, untuk kategori penilain Cukup Baik memilki skor 106, dan untuk kategori Kurang baik memiliki skor 54. Sehingga dari keseluruhan item penilaian dapat disimpulkan yaitu untuk penilaian ini berada pada kategori “Cukup Baik” dengan nilai skor 343 atau berada pada rentan skor 312-390.

Sementara itu, berdasarkan observasi di lapangan dan pengambilan kuesioner, serta Evaluasi penulis sendiri mengenai Evaluasi Kinerja Badan Permusyawaratan Kampung Di Kampung Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak belum sepenuhnya melaksanakan Tugas nya dengan Baik, hal ini dapat dilihat BAPEKAM harus lebih melihat dan mendengar keluhan yang ada di dalam Masyarakat itu agar masyarakat dapat menikmati hasil Kinerja BAPEKAM.

Tabel V.25: Rekapitulasi Per-indikator Tanggapan Responden untuk pihak eksternal atau Masyarakat di Desa Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Kabupaten Siak Untuk Indikator Ketepatan.

No	Item Penilaian	Kategori Penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	2	3	4	5	7
1	Efektifitas	33	80	95	52
2	Efisiensi	22	55	131	52
3	Kecukupan	20	54	134	52
4	Kesamaan/Pemerataan	27	59	122	52
5	Responsivitas	24	41	143	52
6	Ketepatan	24	41	143	52
Jumlah		150	330	768	1248
Skor		450	660	768	1878
Kategori		KURANG BAIK			

Sumber : Data Olahan Peneliti, Tahun 2021

Berdasarkan tabel V.25 Di atas, dapat di ketahui rekapitulasi jawaban responden masyarakat yang Sudah memiliki akta kelahiran dapat dinyatakan dengan menggunakan rumus likert dihitung yaitu:

$$\text{Total skor tertinggi} : 3 \times 24 \times 52 = 3744 \quad \text{Interval} = \frac{3744 - 1248 - 1}{4} = 624$$

$$\text{Total skor terendah} : 1 \times 24 \times 52 = 1248$$

Sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil penghitungam berada pada kategori **Kurang Baik** dengan skor 1878 atau berada pada rentan skor 1872-2496.

Rekapitulasi responden Masyarakat terhadap Evaluasi Kinerja Badan Permusyawaratan kampung Di kampung Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak untuk kategori penilaian baik memiliki skor 450, untuk kategori penilain Cukup Baik memilki skor 660, dan untuk kategori kurang baik memiliki skor 22. Sehingga dari keseluruhan item penilaian dapat disimpulkan yaitu untuk penilaian ini berada pada kategori “Kurang Baik” dengan nilai skor 1878 atau berada pada rentan skor 1872-2496.

Sementara itu, berdasarkan observasi di lapangan dan pengambilan kuesioner, serta Evaluasi penulis sendiri mengenai Evaluasi Kinerja Badan Permusyawaratan kampung Di kampung Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, belum sepenuhnya melaksanakan Tugas nya dengan Baik, hal ini dapat dilihat dari pelayanan BAPEKAM berada pada kategori Kurang Baik. dimana pelayanan BAPEKAM tersebut sangat berperan dalam pelaksanaan setiap kegiatan Masyarakat

yang berada di Pinang Sebatang Timur, sehingga dapat memudahkan Masyarakat yang belum maksimal atau optimal, masih banyak hal-hal yang perlu di benahi kembali seperti, sarana dan prasarana, kualitas instruktur UPTD, waktu pelayanan yang diberikana harus sesuai dengan ketentuan, sehingga ketika pelaksanaan nya dapat dilaksanakan dengan baik, tetapi perlu ditingkatkan dalam pelayanan Badan Permusyawaratan Kampung Di Kampung Pinang Sebatang Timur bisa semakin baik lagi kedepannya.



BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Selanjutnya dapat di simpulkan mengenai jawaban responden Masyarakat terhadap BAPEKAM tentang Evaluasi Kinerja Badan Permusyawaratan Kampung Di Kampung Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, untuk indikator Efektifitas berada pada rentang skor 354 berada pada kategori “Cukup Baik”, maka dari itu masyarakat harus meningkatkan efektifitasnya lagi agar dapat mendapatkan kategori Baik.
2. Dari hasil yang telah penulis jabarkan di atas, selanjutnya dapat di simpulkan mengenai jawaban responden Masyarakat terhadap Badan Permusyawaratan Kampung tentang Evaluasi Kinerja Badan Permusyawaratan Kampung Di Kampung Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, untuk indikator Efisiensi berada pada rentang skor 46 berada pada kategori “Cukup Baik”, maka dari itu Efisiensi masih perlu di tingkatkan lagi karena masih berada di kategorikan cukup baik, maka dari itu efisiensi harus perlu di perbaiki lagi supaya menjadi lebih baik lagi.
3. Dari hasil yang telah penulis jabarkan di atas, selanjutnya dapat di simpulkan mengenai jawaban responden Masyarakat terhadap Badan Permusyawaratan Kampung tentang Evaluasi Kinerja Badan Permusyawaratan Kampung Di Kampung Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, untuk

indikator Kecukupan berada pada rentang skor 50 berada pada kategori “Cukup Baik”, maka dari itu Kecukupan masih perlu di perbaiki lagi karena masih berada di kategorikan cukup baik, maka dari itu kecukupan harus di tingkatkan lagi supaya menjadi lebih baik lagi.

4. Dari hasil yang telah penulis jabarkan di atas, selanjutnya dapat di simpulkan mengenai jawaban responden Masyarakat terhadap Badan Permusyawaratan Kampung tentang Evaluasi Kinerja Badan Permusyawaratan Kampung Di Kampung Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, untuk indikator Kesamaan/Pemerataan berada pada rentang skor 321 berada pada kategori “Cukup Baik”, maka dari itu Pemerataan di Pinang Sebatang Timur masih perlu di tingkatkan lagi karena masih berada di kategorikan Cukup baik, maka dari itu Kecukupan di Kampung Pinang Sebatang Timur harus perlu di perbaiki lagi supaya menjadi lebih baik lagi.
5. Dari hasil yang telah penulis jabarkan di atas, selanjutnya dapat di simpulkan mengenai jawaban responden Masyarakat terhadap Badan Permusyawaratan Kampung tentang Evaluasi Kinerja Badan Permusyawaratan Kampung Di Kampung Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, untuk indikator Responsivitas berada pada rentang skor 60 berada pada kategori “Baik”.
6. Dari hasil yang telah penulis jabarkan di atas, selanjutnya dapat di simpulkan mengenai jawaban responden Masyarakat terhadap Badan Permusyawaratan Kampung tentang Evaluasi Kinerja Badan Permusyawaratan Kampung Di

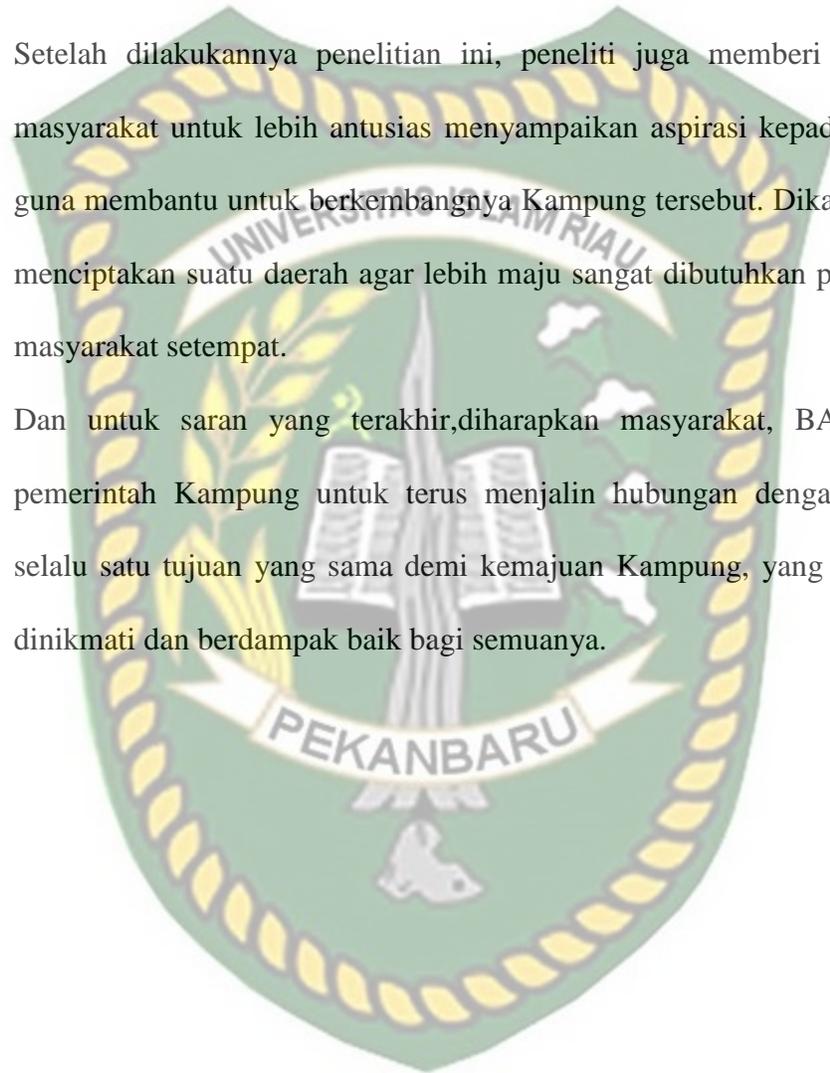
Kampung Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, untuk indikator Ketepatan berada pada rentang skor 293 berada pada kategori “Kurang Baik”, maka dari itu Badan Permusyawaratan Kampung dalam Ketepatan masih perlu di perbaiki lagi karena masih belum mencapai yang ingin dicapai yaitu Baik di Kampung Pinang Sebatang Timur harus di tinggkatkan lagi agar menjadi lebih baik lagi kedepannya.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang Evaluasi Kinerja Badan Permusyawaratan Kampung Di Kampung Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak peneliti memberikan saran, diantaranya:

1. Dalam mengatasi masalah-masalah yang disebutkan pada penelitian ini dimana Efektivitas dan Efisiensi Badan Permusyawaratan Kampung masih kategori cukup baik, maka diperlukan tindakan dari Ketua Badan Permusyawaratan Kampung untuk lebih meningkatkan kesadaran BAPEKAM dalam meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi, dapat dilakukan dalam bentuk arahan yang rutin ke BAPEKAM bahwa pentingnya Efektivitas dan Efisiensi untuk sama-sama meningkatkan Kinerja Organisasi Badan Permusyawaratan Kampung Di Kampung Pinang Sebatang Timur.

2. Dapat juga dilakukan dengan kepedulian BAPEKAM terhadap masyarakat, dan diharapkan juga untuk lebih bertindak dalam menyampaikan aspirasi Masyarakat terhadap Pemerintah Kampung .
3. Setelah dilakukannya penelitian ini, peneliti juga memberi saran kepada masyarakat untuk lebih antusias menyampaikan aspirasi kepada BAPEKAM guna membantu untuk berkembangnya Kampung tersebut. Dikarenakan untuk menciptakan suatu daerah agar lebih maju sangat dibutuhkan peran aktif dari masyarakat setempat.
4. Dan untuk saran yang terakhir, diharapkan masyarakat, BAPEKAM dan pemerintah Kampung untuk terus menjalin hubungan dengan baik, untuk selalu satu tujuan yang sama demi kemajuan Kampung, yang nantinya akan dinikmati dan berdampak baik bagi semuanya.



DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Fathoni, Aburrahmat, 2006. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara
- Hasibuan, Melayu, 2019. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta. Bumi Aksara
- Mahsum Mohamad, 2017. *Pengukuran Kinerja Sektor Publlik*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Makmur, 2007. *Filsafat Administrasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mifta Thoha. 2015. *Prilaku organisasi Konsep dasar dan Aplikasinya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- N. Dunn William, 2000. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Madah University Press.
- Pasalong, Harbari. 2008. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta Press
- Siagian P, Sondang, 2012. *Teori pengembangan organisasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Siagian P, Sondang, 2016. *Administrasi Pembangunan*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Siagian P, Sondang, 2016. *Filsafat Administrasi*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Siswanto, B, 2015. *Pengantar Manajemen*. Bandung, Bumi Aksara.
- Sugiyono, 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono, 2012, *Memahami Penelitian Kualitatif*, bandung, CV. Alfabeta

Sutrisno, Edy, 2016. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Syafei, Inu Kencana. 2003. *Sitem Administrasi Negara Republik Indonesia (SANRI)*. Jakarta : PT Bumi Aksara.

_____, 2010. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta: PT Rineka Cipta

Syafri, Wirman. 2012. *Studi Tentang Administrasi Publik*. Jakarta: Erlangga

Thoha, Miftah, 2015. *Kepemimpinan Dalam Manajemen*. Jakarta, Rajawali Pers

Terry, George R. 2013. *Prinsip-prinsip Manajemen*. Jakarta: PT Bumi Aksara

Thoha, Miftah, 2014. *Ilmu Administrasi Kontemporer*. Jakarta: Kencana

Tim Penyusun, 2013. Buku pedoman penulisan, Badan Penerbit FISIPOL. Pekanbaru: UIR

Wirawan, 2015. *Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia*. Jakarta; Salemba Empat.

Zainal, Veithzal Rivai, 2014. *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan dari Teori dan ke Praktek*. Jakarta: Rajawali Pers.

Zulkifli, dan Nurmasari. 2015. *Pengantar Manajemen*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh Publishing

Zulkifli & Yogia, Moris A. 2014. *Fungsi-Fungsi Manajemen (suatu bacaan pengantar)*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh.

Dokumen :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang No 9 Tahun 2015 Tentang: *Pemerintahan Daerah*

Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang: *Desa*

Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 5 Tahun 2015 tentang Badan
Permasyarakatan Kampung

